

**LAPORAN AKHIR TAHUN
PENELITIAN INSTITUSI (PI)**



JUDUL:

**KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PETERNAKAN
DAN PERIKANAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN**

Tahun ke- 1 dari rencana 2 tahun

OLEH:

Ketua : Dr. Ir. Angraini Sukmawati, MM NIDN: 0020106710

Anggota : 1. Dr. Sofyan Syaf NIDN: 0003107801

2. Dr. Ir. Wawan Oktariza, Msi NIDN: 0016106609

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Nomor: 011/SP2H/LT/DRPM/IV/2017 tanggal 20 April 2017 dan Addendum Kontrak Nomor: 011/SP2H/LH/DRPM/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOVEMBER 2017**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

Peneliti/Pelaksana
 Nama Lengkap : Dr. Ir ANGGRAINI SUKMAWATI, M.M.
 Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor
 NIDN : 0020106710
 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 Program Studi : Ilmu Manajemen
 Nomor HP : 08111180267
 Alamat suret (e-mail) : anggrainism@apps.ipb.ac.id

Anggota (1)
 Nama Lengkap : Dr SOFYAN SJAF
 NIDN : 0003107801
 Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor

Anggota (2)
 Nama Lengkap : Dr. Ir WAWAN OKTARIZA
 NIDN : 0016106609
 Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor

Institusi Mitra (jika ada)
 Nama Institusi Mitra : -
 Alamat : -
 Penanggung Jawab : -
 Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
 Biaya Tahun Berjalan : Rp 195,568,000
 Biaya Keseluruhan : Rp 195,568,000



Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

(Prof. Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec)
 NIP/NIK 196312271988111001

Bogor, 13 November 2017
 Ketua,

(Dr. Ir ANGGRAINI SUKMAWATI, M.M.)
 NIP/NIK 19671020 199403 2 001



Menyetujui,
 Kepala LPPM IPB

(Dr. Ir. Prastowo, M.Eng)
 NIP/NIK 195802171987031004

RINGKASAN

Sejatinya setiap kebijakan pembangunan bermuara pada solusi untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya atau kondisi yang mengarah ke arah perubahan lebih baik dari sebelumnya (Todaro 1998; Irawan 2014). Akan tetapi, pernyataan yang paradoks seringkali ditemukan, dimana pelaksana pembangunan atau pemerintah menyatakan sudah mencapai tujuan pembangunan dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan, tetapi kenyataannya yang dirasakan masyarakat tidak sebagaimana yang dinyatakan pemerintah. Tentang hal ini, Mabhul Haq (1983) berpandangan bahwa paradoks tersebut dikarenakan tujuh dosa perencanaan pembangunan yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Ketujuh dosa tersebut adalah permainan angka, pengendalian yang berlebihan, investasi yang menggiurkan, pendekatan yang dianggap benar, perencanaan dan pelaksanaan yang terpisah, sumberdaya manusia yang terabaikan, dan pertumbuhan tanpa keadilan. Secara praksis, untuk meminimalisir terjadinya “dosa perencanaan pembangunan” sebagaimana yang disampaikan Mabhul Haq tersebut, maka dibutuhkan suatu pendekatan yang mampu meletakkan humanisme dalam pembangunan, menghadirkan angka yang aktual, membangun investasi yang berasal dari komunitas, memformulasi pendekatan dialektikal, menyambungkan perencanaan dan pelaksanaan, dan menciptakan keadilan dalam capaian pertumbuhan. Adapun pendekatan yang memungkinkan tersebut diantaranya pendekatan partisipatif dan pendekatan kawasan perdesaan.

Terkait dengan kemiskinan, catatan National Geographic (2014) bahwa Indonesia memiliki 28,5 juta penduduk miskin, 62,8% adalah petani. Kemudian dalam 10 tahun terakhir, rata-rata 500 ribu keluarga tani meninggalkan lahan, menjadi masyarakat miskin kota setiap tahunnya. Gejala ini akan semakin parah apabila tidak adanya penanganan yang komprehensif dan tepat sasaran. Untuk itu, ruang partisipasi bagi warga miskin harus dibuka melalui pendekatan kawasan perdesaan yang diharapkan mampu memberikan model kebijakan pembangunan daerah secara partisipatif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di bidang peternakan dan perikanan khususnya dan pembangunan segala bidang pada umumnya.

Secara umum, kajian kebijakan pembangunan daerah ini bertujuan melakukan *action-research* formulasi model kebijakan pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. *Action research* ini memiliki empat luaran sebagai kontribusi pada ilmu pengetahuan. Adapun keempat luaran yang dimaksud, sebagai berikut: (a) model kebijakan pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya pengentasan kemiskinan; (b) publikasi jurnal nasional terakreditasi atau internasional (terindeks *scopus*); (c) *policy paper* terkait topik pembangunan daerah berbasis kawasan perdesaan untuk pengentasan kemiskinan; dan (d) penyaji atau pemakalah pada seminar nasional.

PRAKATA

Laporan kemajuan penelitian “**Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Peternakan Dan Perikanan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan**” disusun dengan maksud untuk melakukan *action-research* formulasi model kebijakan pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Formulasi yang dimaksud menitikberatkan pada partisipasi subyek atau pelaku utama dalam bidang peternakan dan perikanan (termasuk kelompok warga miskin desa), kelembagaan produksi di tingkat pelaku utama (peternak dan pembudidaya) dan kelembagaan penyangga produksi di tingkat daerah, pola pengorganisasian produksi dan pengolahan, pola kerjasama dengan para pihak, penguatan kapasitas dan pengembangan ekonomi solidaritas.

Penelitian ini didukung oleh berbagai pihak antara lain: Institut Pertanian Bogor (IPB), Pemerintah Daerah Kabupaten Malang (Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), masyarakat Kabupaten Malang, serta pihak lain yang membantu dalam terlaksananya penelitian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak tersebut atas dukungan dan kerjasama selama penelitian ini berlangsung.

Akhir kata, semoga laporan kemajuan penelitian ini bisa memberikan wawasan baru di dalam kegiatan peningkatan kualitas di bidang peternakan dan peternakan melalui kebijakan yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan.

Bogor, November 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
BAB 4. METODE PENELITIAN	12
BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	17
BAB 6. RENCANA TAHUN BERIKUTNYA	45
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

1	Sistematika Kegiatan Kajian Pembangunan Daerah di Bidang Peternakan dan Perikanan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan	13
2	Populasi Ternak Per Wilayah di Kabupaten Malang Tahun 2017	17
3	Daftar SPR Kabupaten Malang Tahun 2016	18
4	Deskripsi dan Akar Masalah	19
5	Persentase masyarakat peternak sapi potong di Desa Arjowilangun menurut sumber pendapatan	20
6	Persentase masyarakat peternak sapi potong di Desa Arjowilangun menurut pengeluaran	20
7	Persentase ketersediaan modal sumber daya berdasarkan persepsi masyarakat peternak sapi potong di Desa Arjowilangun	21
8	Persentase tingkat kemudahan akses modal sumber daya berdasarkan persepsi masyarakat peternak sapi potong di Desa Arjowilangun	22
9	Persentase tingkat penggunaan modal sumber daya berdasarkan persepsi masyarakat peternak sapi potong di Desa Arjowilangun	23
10	Bobot nilai analisis elemen faktor	25
11	Bobot nilai analisis elemen aktor terhadap faktor	25
12	Bobot nilai analisis elemen tujuan terhadap aktor	26
13	Bobot nilai analisis elemen alternatif terhadap tujuan	26
14	Luas Potensi Budidaya Kabupaten Malang	27
15	Luas Lahan Perikanan Budidaya Tahun 2012 – 2016 (dalam Ha)	27
16	Produksi Perikanan Budidaya Per Wadah Budidaya Tahun 2016	28
17	Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2012 – 2016	28
18	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Tahun 2016 (ton)	29
19	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2012 – 2016 (ton)	29
20	Jumlah Pembudidaya Ikan Tahun 2012 – 2016	30

21	Permasalahan, akar masalah dan dampak masalah yang dialami pembudidaya ikan di Desa Blayu	33
22	Tingkat kepentingan dan kedekatan aktor terhadap masyarakat pembudidaya ikan di Desa Blayu	34
23	Persentase masyarakat pemilik usaha budidaya ikan di Desa Blayu menurut sumber penghasilan terbesar	35
24	Persentase masyarakat pemilik usaha budidaya ikan di Desa Blayu menurut pengeluaran yang paling dominan dan kedua paling dominan	35
25	Persentase ketersediaan modal sumber daya berdasarkan persepsi masyarakat pemilik usaha budidaya perikanan di Desa Blayu	36
26	Persentase tingkat kemudahan akses modal sumber daya berdasarkan persepsi masyarakat pemilik usaha budidaya perikanan di Desa Blayu	37
27	Persentase tingkat penggunaan modal sumber daya berdasarkan persepsi masyarakat pemilik usaha budidaya perikanan di Desa Blayu	38
28	Analisis bobot faktor	42
29	Analisis bobot analisis elemen aktor terhadap faktor	42
30	Analisis bobot elemen tujuan terhadap elemen aktor	43
31	Analisis bobot elemen alternatif terhadap tujuan	43
32	Rencana Tahapan Berikutnya	45

DAFTAR GAMBAR

1	Pola mekanisme penggerak ekonomi lokal dan pedesaan di Kawasan Perdesaan	6
2	Peran dan fungsi BUMDes/BUMDes Bersama dalam Kawasan Perdesaan	7
3	Contoh Struktur Hierarki pada AHP	10
4	Struktur hierarki AHP bidang peternakan	15
5	Struktur hierarki AHP bidang perikanan	16
6	Stratifikasi sosial masyarakat di Kecamatan Kalipare, Desa Arjowilangun	19
7	Diagram venn terkait kelembagaan dan aktor yang berpengaruh	24
8	Struktur AHP Bidang Peternakan dan Bobot Prioritas	25
9	Stratifikasi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Wajak, Desa Blayu	31
10	Diagram venn terkait kelembagaan dan aktor yang berpengaruh	34
11	Struktur AHP Bidang Peternakan dan Bobot Prioritas	41

DAFTAR LAMPIRAN

1	Borang kuisisioner AHP Peternakan	48
2	Borang kuisisioner AHP Perikanan	51
3	Dokumentasi Kegiatan	62
4	Hasil pengolahan data AHP bidang peternakan	65
5	Hasil pengolahan data AHP bidang perikanan	67
6	Kuisisioner survey pola nafkah masyarakat	69

BAB 1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejatinya setiap kebijakan pembangunan bermuara pada solusi untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya atau kondisi yang mengarah ke arah perubahan lebih baik dari sebelumnya (Todaro 1998; Irawan 2014). Akan tetapi, pernyataan yang paradoks seringkali ditemukan, dimana pelaksana pembangunan atau pemerintah menyatakan sudah mencapai tujuan pembangunan dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan, tetapi kenyataannya yang dirasakan masyarakat tidak sebagaimana yang dinyatakan pemerintah. Tentang hal ini, Mab hul Haq (1983) berpandangan bahwa paradoks tersebut dikarenakan tujuh dosa perencanaan pembangunan yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Ketujuh dosa tersebut adalah permainan angka, pengendalian yang berlebihan, investasi yang menggiurkan, pendekatan yang dianggap benar, perencanaan dan pelaksanaan yang terpisah, sumberdaya manusia yang terabaikan, dan pertumbuhan tanpa keadilan.

Secara praksis, untuk meminimalisir terjadinya “dosa perencanaan pembangunan” sebagaimana yang disampaikan Mab hul Haq tersebut, maka dibutuhkan suatu pendekatan yang mampu meletakkan humanisme dalam pembangunan, menghadirkan angka yang aktual, membangun investasi yang berasal dari komunitas, memformulasi pendekatan dialektikal, menyambungkan perencanaan dan pelaksanaan, dan menciptakan keadilan dalam capaian pertumbuhan. Adapun pendekatan yang memungkinkan tersebut, pertama, pendekatan partisipatif. Pembangunan berparadigma partisipatif menitikberatkan pada keterlibatan warga masyarakat dalam seluruh proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring-evaluasi*). Suwandi (2012) mengatakan bahwa pendekatan partisipatif adalah perencanaan pembangunan yang menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat. Dalam konteks tersebut, maka perencanaan yang baik haruslah melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung).

Kedua, *pendekatan kawasan perdesaan*. Pendekatan yang tergolong baru ini menitikberatkan pada kerjasama antar desa, antar rumah tangga (petani, peternak, petambak, pembudidaya), penguatan kapasitas sumberdaya manusia, keterlibatan para pemangku kepentingan pembangunan, optimalisasi institusi ekonomi lokal dan menitikberatkan kekuatan solidaritas ekonomi (UU No. 6/2014). Selanjutnya, orientasi pengembangan kawasan perdesaan difokuskan untuk membangun desa-desa, mendorong kemampuan penyerapan tenaga kerja, mendorong kemampuan ekonomi lokal, dan mendorong kemampuan membangun keberdayaan warga desa. Hal ini disadari karena perdesaan memiliki ragam potensi sumberdaya yang dapat dijadikan sebagai basis pengembangan ekonomi lokal, apabila mampu dikelola dan dioptimalkan dengan baik sisi hulu – hilir dengan melakukan penguatan pelayanan dan pemberdayaan, serta menciptakan nilai tambah komoditas yang diproduksi oleh kawasan perdesaan (Tonny, Sjaf *et al.* 2016).

Dalam konteks kajian ini, dua pendekatan di atas (partisipasi dan kawasan perdesaan) dianggap mampu sebagai “jembatan” untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Terkait dengan kemiskinan, catatan National Geographic (2014) bahwa Indonesia memiliki 28,5 juta penduduk miskin, 62,8% adalah petani. Kemudian dalam 10 tahun terakhir, rata-rata 500 ribu keluarga tani meninggalkan lahan, menjadi masyarakat

miskin kota setiap tahunnya. Gejala ini akan semakin parah apabila tidak adanya penanganan yang komprehensif dan tepat sasaran. Untuk itu, ruang partisipasi bagi warga miskin harus dibuka melalui pendekatan kawasan perdesaan yang diharapkan mampu memberikan model kebijakan pembangunan daerah secara partisipatif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di bidang peternakan dan perikanan khususnya dan pembangunan segala bidang pada umumnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Peta Jalan Penelitian

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan amanat UU No. 6/2014 yang dimaksudkan sebagai pendekatan “membangun desa”. Pendekatan ini lebih bersifat “*top down*”, akan tetapi tetap mempertimbangkan prinsip partisipatif atau keterlibatan masyarakat, keterbukaan, kerjasama, dan lain-lain. Lebih jauh, pendekatan ini berorientasi mempercepat pembangunan desa (sosial, ekonomi, budaya dan infrastruktur) agar tujuan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat terwujud.

Pembangunan daerah berbasis kawasan perdesaan, peneliti sudah lakukan semenjak tahun 2005. Saat itu, peneliti melakukan penelitian tentang kerjasama antar desa berbasis partisipatif sebagai pilar pembangunan daerah. Penelitian ini diorientasikan sebagai naskah akademik untuk menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Partisipatif (PKPBM). Pasca diterbitkannya Permendagri tersebut, sepanjang tahun 2007 – 2013 peneliti terlibat melakukan penguatan kapasitas aparat desa dan *action-research* di 32 kabupaten. Dari kegiatan yang dilakukan tersebut, teridentifikasi beberapa persoalan, antara lain: lemahnya data spasial dalam pembangunan kawasan perdesaan, tingkat keakuratan data dalam menghitung potensi kawasan, minimnya pengetahuan terkait pengelolaan kawasan perdesaan, lemahnya kapasitas kelembagaan kawasan perdesaan dan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Kemudian pada tahun 2013 – 2014, saat legislatif dan eksekutif mendorong diterbitkannya Undang-Undang tentang Desa, peneliti terlibat untuk melakukan perbaikan nomenklatur (pasal) tentang kawasan perdesaan. Pada tahun 2014, kawasan perdesaan akhirnya masuk dalam Bab IX Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa. Dengan masuknya nomenklatur kawasan perdesaan dalam UU No. 6/2014, maka pendekatan kawasan perdesaan menjadi legal formal dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Pada tahun 2015, peneliti terlibat dalam perumusan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes, PDTT) tentang pembangunan kawasan perdesaan. Selanjutnya sepanjang tahun 2015 – 2016, peneliti melakukan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan di 13 kabupaten pulau Sulawesi. Untuk mempertajam instrumen pembangunan kawasan perdesaan, bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan peneliti dari transdisiplin ilmu, melakukan penelitian tentang pengukuran indikator kawasan perdesaan yang memiliki basis tipologi berbeda. Penelitian ini menghasilkan beberapa output, salah satunya adalah indikator keberhasilan pembangunan kawasan perdesaan.

Uraian di atas bermaksud untuk mempertegas bahwasanya kebijakan pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan pendekatan kawasan perdesaan, dimana menempatkan kekuatan ekonomi berbasis sumberdaya lokal, optimalisasi sumberdaya manusia di perdesaan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di perdesaan.

Uraian Kegiatan

Kajian pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan dilakukan melalui 5 kegiatan utama. Adapun kelima kegiatan yang dimaksud, sebagai berikut:

- 1) Analisis kebijakan pembangunan daerah dan penentuan lokus pembangunan kawasan perdesaan. Kegiatan ini diorientasikan untuk memetakan potensi keterhubungan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dan ditetapkan dengan pendekatan kawasan perdesaan sebagai *core* pembangunan daerah yang mampu mengentaskan kemiskinan. Selain itu, juga akan dilakukan diskusi dengan pihak terkait (pemerintah daerah) terkait lokus yang potensial untuk diterapkan pembangunan kawasan perdesaan;
- 2) Survei pola nafkah (*livelihood*) rumah tangga peternak dan nelayan (diutamakan untuk tangga miskin). Survei ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kekinian rumah tangga peternak dan nelayan yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengorganisasian pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) *Focus Group Discussion* (FGD) aparat desa. Kegiatan ini menitikberatkan pada para aparat desa di lima atau enam desa yang memiliki basis tipologi yang sama. FGD ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran pembangunan kawasan perdesaan sebagai pembangunan daerah yang mampu mengentaskan kemiskinan. Dalam kegiatan ini, juga akan digali tingkat resiliensi rumah tangga miskin di masing-masing desa. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki muatan untuk melakukan pengorganisasian aparat desa dan pengurus kelembagaan yang ada di desa-desa yang menjadi lokus kajian;
- 4) *Focus Group Discussion* (FGD) rumah tangga peternak dan nelayan (diutamakan rumah tangga miskin). Kegiatan ini ditujukan untuk mendalami ragam persoalan yang dihadapi oleh rumah tangga peternak dan nelayan (khususnya rumah tangga miskin) dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh rumah tangga tersebut keluar dari problem kemiskinan yang dihadapi. Dalam kegiatan ini, juga akan dilakukan penggalian tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah atau pihak lain untuk mengentaskan kemiskinan yang dialami oleh rumah tangga-rumah tangga yang menjadi lokus kajian;
- 5) *Focus Group Discussion* (FGD) antar desa. Kegiatan ini diorientasikan untuk membangun kerjasama antar desa sebagai upaya mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan sebagai jalan pembangunan daerah untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam kegiatan ini, akan dilakukan perencanaan bisnis peternakan dan perikanan secara partisipatif antar desa, merumuskan kelembagaan kawasan perdesaan dan mengoprasionalkan perencanaan yang telah disusun untuk ditindaklanjuti secara bersama-sama;
- 6) *Focus Group Discussion* (FGD) multistakeholder. Kegiatan ini ditujukan untuk mengikat multistakeholder dalam kesepakatan kerja-kerja membangun kawasan perdesaan sebagai pendekatan pembangunan daerah. Dalam kegiatan ini, akan terurai peran dan fungsi masing-masing stakeholders dalam pembangunan daerah sebagai upaya pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Seminar dan lokakarya akhir. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendesiminasi hasil kajian pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya untuk pengentaskan kemiskinan.

Uraian Kebaruan Penelitian

Sejauh ini, pendekatan kawasan perdesaan yang menitikberatkan pada kerjasama antar desa untuk pengentasan kemiskinan belum ada yang melakukan. Meski regulasi pendekatan ini sudah ada, namun implementasi dalam bentuk proyek percontohan (*pilot project*) belum ditemukan dimanapun. Oleh karena itu, kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pada aksi perwujudan kawasan perdesaan sebagai pendekatan pembangunan daerah yang mampu mengentaskan kemiskinan.

Kawasan perdesaan adalah konsep yang mempertemukan desa dan sumberdaya alam pertanian sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam penerapan konsep ini, maka diperlukan model bisnis yang menekankan pada kerjasama antar swasta, pemerintah, dan komunitas atau warga. Adapun titik penekanan yang menjadi penting dalam konsep ini adalah adanya inovasi produk unggulan, *partnership* dan pemberdayaan, *socio-preneur* dan solidaritas, serta perluasan peluang kerja.

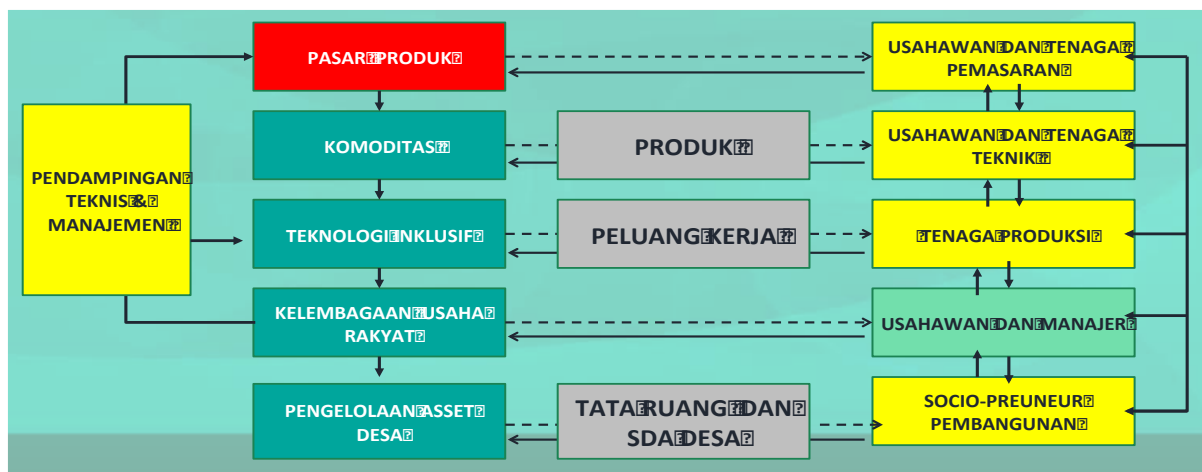
Selanjutnya konsep ini sudah seiring dengan konstitusi yang ada, seperti: UU No. 6/2014 tentang Desa, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No. 43/2014 dan PP 47/2015, Permen DPDTT No. 5/2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, sasaran prioritas nasional dalam RPJMN, dan NAWACITA ke-3. Agar konsep ini berjalan sesuai harapan, maka terdapat 5 pilar yang dibutuhkan, meliputi: penataan ruang partisipatif, model bisnis dan kemitraan, tata kelola dan *socio-preneur*, sistem pembiayaan, serta prasarana desa dan infrastruktur. Adapun maksud dan fokus dari masing-masing pilar, sebagai berikut:

- (1) Penataan ruang partisipatif, merupakan pilar yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dan desa dalam merumuskan pemanfaatan ruang (budidaya maupun konservasi) baik dalam aktivitas budidaya, pengolahan, maupun pemasaran produk unggulan yang dihasilkan dari kesepakatan kerjasama antar desa. Adapun peran serta dari masyarakat dan desa ini, diharapkan mampu memberikan masukan dan perbaikan atas penyusunan RPJMD yang dianggap belum sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat dan desa;
- (2) Model bisnis dan kemitraan, merupakan pilar pengembangan bisnis dari produk unggulan yang diproduksi oleh kawasan perdesaan. Pilar ini menitikberatkan pada pola-pola kerjasama berbasis pembiayaan aktivitas di dalam kawasan perdesaan. Agar terjalin relasi yang saling menguntungkan, maka kemitraan yang adil adalah prinsip yang harus ditumbuhkembangkan;
- (3) Tatakelola dan *socio-preneur*, merupakan pengelolaan kawasan perdesaan harus berbasis peraturan hukum yang berlaku dengan pendekatan yang holistik terhadap produksi, pengolahan, dan pemasaran produk unggulan kawasan perdesaan. Selain itu, pilar ini juga menitikberatkan lahirnya *socio-preneurs* yang berasal dari pemuda desa. Dikarenakan pendekatan ini merupakan pendekatan padat karya, maka penyerapan tenaga kerja di perdesaan merupakan keniscayaan untuk menjawab problem minimnya partisipatif usia produktif dan pengangguran di perdesaan Indonesia;
- (4) Sistem pembiayaan, merupakan pilar yang menitikberatkan pada sumber-sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kawasan perdesaan. Sejauh ini, terdapat empat sumber pembiayaan yang potensial: APBN, APBD (provinsi maupun kabupaten), APBDesa, dan pihak ketiga (swasta maupun kerjasama luar negeri); dan
- (5) Prasarana desa dan infrastruktur, merupakan pilar yang dibutuhkan dalam mengembangkan konsep kawasan perdesaan. Pilar ini menitikberatkan pada penyediaan prasarana desa dan infrastruktur dasar yang dibutuhkan dalam

pengembangan kawasan perdesaan. Beberapa yang dimaksud adalah kelembagaan, sistem informasi, jalan usahatani, dan lain-lain.

Selanjutnya orientasi bisnis yang diharapkan dari kawasan perdesaan merupakan bagian dari upaya untuk mendorong terciptanya aksi kawasan perdesaan sebagai penggerak ekonomi lokal maupun ekonomi pedesaan. Dalam hal ini, maka penting untuk melakukan *mapping* atas kontribusi faktor subyek dan faktor obyek dari kawasan perdesaan sebagai penggerak ekonomi lokal dan pedesaan. Untuk faktor subyek, diperlukan pendamping teknis dan manajemen kawasan perdesaan sebagai pihak luar yang dianggap memiliki kapasitas untuk melakukan pendampingan. Tidak itu saja, subyek lainnya yang dibutuhkan adalah usahawan, tenaga pemasaran, tenaga teknis, tenaga produksi, kelembagaan usaha rakyat, dan manajer yang kesemuanya merupakan output dari kawasan perdesaan, yakni *socio-preneur* pembangunan.

Kemudian untuk faktor obyek, hal penting yang memperoleh perhatian serius adalah pasar produk. Kondisi ini disadari karena persoalan yang seringkali ditemukan di lapangan adalah tidak terpasarkannya dengan baik hasil produksi pertanian. Namun demikian, komoditas unggulan dalam kawasan perdesaan menjadi prasyarat untuk mengembangkan ekonomi kawasan sebagai penggerak ekonomi lokal dan pedesaan. Tentunya, komoditas unggulan yang diproduksi secara terukur dan terencana membutuhkan sentuhan teknologi inklusif melalui kelembagaan usaha rakyat. Selain itu, kelembagaan usaha rakyat yang dimaksud, diharapkan mampu mengelola asset yang dimiliki desa dan kawasan perdesaan.



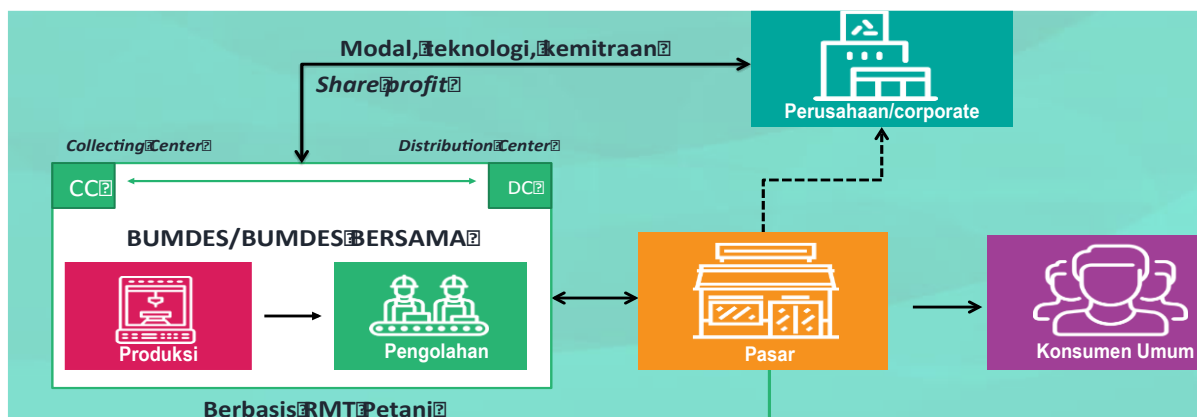
Gambar 1 Pola mekanisme penggerak ekonomi lokal dan pedesaan di Kawasan Perdesaan

Kelembagaan usaha rakyat sebagai basis pengorganisasian produksi maupun pengolahan membutuhkan pendampingan baik secara teknis maupun manajemen. Dalam hal pasar produk dibutuhkan tenaga pemasaran yang mampu memasarkan hasil-hasil produksi dan pengolahan komoditi dari kawasan perdesaan. Tenaga pemasaran dapat direkrut dari warga desa yang memiliki kemampuan memasarkan produk dan melakukan kerjasama dengan usahawan atau bisnisan. Tidak itu saja, agar komoditi unggulan memiliki nilai tambah, maka dibutuhkan pengolahan lanjutan oleh tenaga teknis yang berasal dari warga desa terlatih. Disini penguatan kapasitas dalam hal keterampilan teknis sangat dibutuhkan untuk memberikan nilai tambah komoditi unggulan kawasan perdesaan. Dalam konteks ini, maka peluang kerja bagi tenaga produksi yang memiliki keterampilan sangat dibutuhkan untuk mengoperasikan teknologi inklusif pengelolaan komoditas unggulan agar memiliki nilai tambah.

Namun demikian, hal yang penting untuk memperoleh perhatian serius adalah kesesuaian tata ruang dan sumberdaya alam yang dimiliki desa dengan dokumen perencanaan supra desa (RPJMD dan RPJMN). Tidak lain, semua ini bertujuan untuk menciptakan *socio-preneurs* yang diharapkan mampu sebagai champion pembangunan pada kawasan perdesaan.

Atas uraian di atas, maka peran sentral Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama sebagai bisnis kawasan perdesaan menjadi penting. Kelembagaan ini sangat penting sebagai fungsi *Collecting Center* (CC) dan *Distribution Center* (DC). Sebagai CC, BUMDES merupakan kelembagaan ekonomi masyarakat dan desa yang berfungsi sebagai penampung dan pengelola produk semi-jadi produk unggulan kawasan perdesaan. Disini setiap kelompok tani/sejenisnya dan RT peternak dan nelayan bertindak sebagai produsen bahan baku yang siap ditampung oleh BUMDES. Apabila BUMDES memiliki keterbatasan dalam unit pengolahan, maka BUMDES Bersama bisa digerakkan sebagai unit penampung sekaligus pengolahan produk semi-jadi. Baik BUMDES maupun BUMDES Bersama tersebut, diharapkan dapat sebagai penyaring masuknya investasi swasta ke desa/kawasan perdesaan dan juga sekaligus sebagai katalisator ekonomi lokal dan pedesaan. Dengan kata lain, BUMDES/BUMDES Bersama inilah sebagai *core of rural and local economic*.

Namun demikian, bukan berarti kawasan perdesaan menafikkan peran swasta. Peran swasta tetap dibutuhkan sebagai aktor yang memiliki alat produksi (modal dan teknologi), peluang kerjasama (kemitraan), dan pasar. Akan tetapi, modal dan teknologi yang dibutuhkan BUMDES/BUMDES Bersama dilakukan dalam bentuk investasi langsung maupun tidak langsung, dimana pengembalian modal dan teknologi tersebut dilakukan dalam bentuk *share profit*. Berbagi keuntungan antara BUMDES/BUMDES Bersama dengan swasta/perusahaan dapat dilakukan melalui penjualan produk unggulan yang dihasilkan ataupun berdasarkan kesepakatan bersama melalui MoU (*Momerandum of Understanding*).



Gambar 2 Peran dan fungsi BUMDes/BUMDes Bersama dalam Kawasan Perdesaan

Tidak itu saja, tata kelola kelembagaan usaha ekonomi di atas dimaksudkan untuk meminimalisir panjangnya mata rantai (*supply chain*) produk pertanian yang ada selama ini. Juga untuk menciptakan keadilan rantai pasok yang selama ini dirasakan sangat merugikan RT petani/peternak. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Tim PSP3 IPB (2016) bahwa panjangnya mata rantai komoditas berdampak terhadap minimnya keuntungan yang diperoleh RT petani (hanya 12% dari total harga komoditas di pasar) dibandingkan para pengumpul atau perusahaan yang sejauh ini memperoleh keuntungan sebesar 82% dari total harga komoditas di pasar.

Rich Picture

Rich picture merupakan salah satu tahapan yang digunakan pada *soft system methodology* (SSM) yang dituangkan dalam bentuk gambar yang menunjukkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait, termasuk di dalamnya peran dan perhatian pokok mereka (Hardjosoekarto 2012). Menurut Checkland and Poulter (2006), SSM adalah proses mencari tahu yang berorientasi aksi atas situasi problematis dari kehidupan nyata sehari-hari. Para pengguna SSM melakukan pembelajaran yang dimulai dari menemukan dan mengenali situasi sampai merumuskan dan/atau mengambil tindakan guna memperbaiki situasi problematis tersebut. Hasil analisis SSM berupa gagasan-gagasan baru atau kehendak untuk melakukan aktivitas yang memiliki maksud yang lebih segar terkait dengan situasi masalah yang dianggap problematis.

Pada *rich picture* berbagai permasalahan di dunia nyata diungkapkan berasal dari sebanyak mungkin informasi sehingga dapat dijadikan alat untuk membantu proses pemikiran situasi masalah ke arah yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hardjosoekarto (2012) mengungkapkan bahwa dari proses pembuatannya, *rich picture* merupakan hasil penuangan pengalaman dan persepsi praktisi SSM tentang situasi dunia nyata yang dianggap problematis yang diperoleh melalui proses identifikasi dan menghubungkan-hubungkan serangkaian konsep yang saling terkait. *Rich picture* dapat digunakan sebagai alat untuk membangun pemahaman bersama atas situasi masalah yang sedang menjadi perhatian. Informasi yang dikumpulkan untuk membuat dan menyajikan *rich picture* ini meliputi struktur, proses, hubungan antar struktur dengan proses tersebut, dan pokok perhatian. Contoh penggambaran situasi problematis di dunia nyata dapat dilihat pada Gambar 3. Checkland and Poulter (2006) menyarankan dilakukannya tiga jenis atau tahap analisis yang dilakukan dalam rangka memahami situasi dunia nyata, yaitu analisis satu, analisis dua, dan analisis tiga.

Analisis Satu (Intervensi)

Analisis satu ini dilakukan dengan menetapkan tiga pihak yang berperan sangat penting dalam kaitannya dengan situasi problematis yang menjadi kajian. Ketiga pihak tersebut adalah:

- *Clients* (C): orang atau sekelompok orang yang menyebabkan terjadinya intervensi terkait situasi problematis yang sedang dikaji.
- Praktisi (P): orang atau sekelompok orang yang melakukan kajian dengan menggunakan SSM.
- Pemilik Isu atau *Owner* (O): orang atau sekelompok orang yang berkepentingan atau yang terkena dampak dari situasi atau dampak dari hasil upaya perbaikan atas situasi problematis.

Analisis Dua (Sosial)

Proses SSM memerlukan dua pertimbangan, yaitu diterimanya argumen dan dimungkinkan secara kultural. Dengan memahami situasi sosial, secara umum praktisi SSM dapat membuat gambaran yang semakin komprehensif berkenaan dengan situasi dunia nyata (Hardjosoekarto 2012). Hal ini penting agar pemilihan sistem yang relevan dari aktivitas manusia atau aktivitas yang punya maksud benar-benar relevan dengan upaya untuk melakukan sesuatu terhadap dunia nyata. Menurut Checkland and Poulter (2006), ada tiga elemen sosial yang menjadi fokus analisis pada tahap ini, yaitu elemen peran (posisi sosial yang menandai perbedaan di antara anggota kelompok atau organisasi), norma (perilaku yang diharapkan terkait dengan peran), dan nilai-nilai (standar atau kriteria perilaku yang sesuai dengan peran dinilai).

Analisis Tiga (Politik)

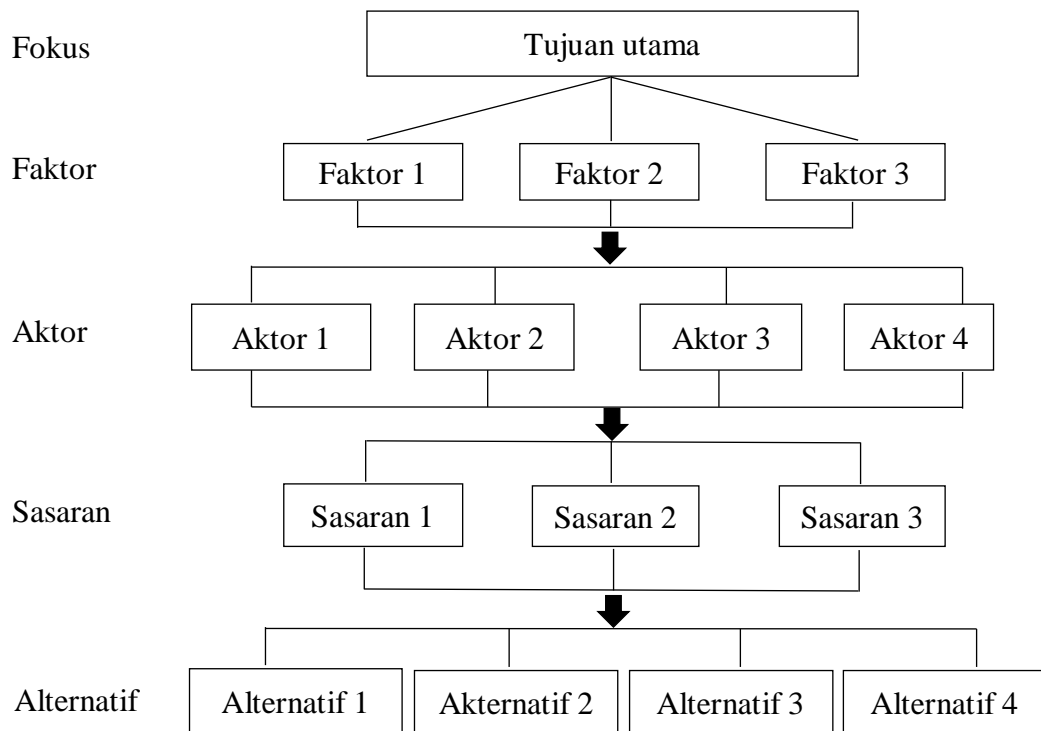
Dalam SSM, politik diyakini sangat menentukan banyak hal termasuk dalam memutuskan sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Fokus analisis ini adalah mempelajari struktur *power* dalam situasi dan proses yang mengontrolnya (Hardjosoekarto 2012). Checkland and Poulter (2006) menyarankan dalam analisis *power* ini digunakan metafora ‘komoditas’ sebagai sinyal bahwa *power* dimiliki di dalam situasi. Beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian dalam tahap ini, antara lain terkait dengan peran (kharisma personal, keanggotaan dalam berbagai komisi, akses yang teratur kepada pemegang kekuasaan), terkait dengan basis pengetahuan (otoritas dan reputasi intelektual, dan reputasi membuat laporan suatu pertemuan), dan terkait dengan penguasaan informasi (mempunyai akses terhadap informasi yang penting dan akses untuk menutup akses orang lain terhadap informasi penting).

Analytical Hierarchy Process

Perumusan strategi dapat dilakukan melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang telah dikembangkan oleh Dr Thomas L Saaty pada tahun 1970-an. AHP merupakan pendekatan dasar dalam pengambilan keputusan. Metode ini dirancang untuk menanggulangi pemilihan yang terbaik secara rasional dan intuitif dari sejumlah alternatif yang dievaluasi dengan beberapa kriteria (Saaty and Vargas 2012). Proses ini mempertimbangkan informasi dan pendapat dari para ahli dalam memilih suatu alternatif strategi yang dinilai efektif.

Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi sebuah bagian dan tertata dalam suatu hierarki (Marimin dan Maghfiroh 2010). Menurut Saaty and Vargas (2012), bentuk paling sederhana untuk membuat struktur keputusan adalah hirarki yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu tujuan keputusan pada tingkat yang paling atas, kemudian diikuti oleh tingkat kedua yang terdiri dari kriteria, lalu alternatif ditempatkan pada tingkat ketiga. Penyusunan hirarki ini dilakukan dengan dua tujuan, yaitu hirarki menyediakan pandangan secara keseluruhan akan hubungan kompleks yang melekat dalam situasi dan proses penilaian. Selain itu, hirarki juga membantu pengambil keputusan untuk menilai masalah penting yang sedang mereka perbandingkan.

Pada proses pemilihan, pengambil keputusan melakukan penilaian perbandingan berpasangan sederhana yang kemudian digunakan untuk mengembangkan secara keseluruhan prioritas untuk perbandingan alternatif (Saaty and Vargas 2012). Marimin *et al.* (2013) mengatakan bahwa AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan karena AHP digambarkan secara grafis sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, mampu menguraikan keputusan kompleks menjadi keputusan-keputusan kecil yang lebih sederhana. Beberapa keuntungan tersebut yaitu: kesatuan, kompleksitas, saling ketergantungan, penyusunan hirarki, pengukuran, konsistensi, sintesis, penilaian dan konsensus, dan pengulangan proses. Contoh struktur hierarki pada AHP dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Contoh Struktur Hierarki pada AHP

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Secara umum, kajian kebijakan pembangunan daerah ini bertujuan melakukan *action-research* formulasi model kebijakan pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Formulasi yang dimaksud menitikberatkan pada partisipasi subyek atau pelaku utama dalam bidang peternakan dan perikanan (termasuk kelompok warga miskin desa), kelembagaan produksi di tingkat pelaku utama (peternak dan pembudidaya ikan) dan kelembagaan penyangga produksi di tingkat daerah, pola pengorganisasian produksi dan pengolahan, pola kerjasama dengan para pihak, penguatan kapasitas dan pengembangan ekonomi solidaritas.

Sementara itu, tujuan khusus dari kajian ini adalah: (a) memahami pola nafkah (*livelihood*) peternak, pembudidaya ikan dan keluarga miskin; (b) menghitung potensi peternakan dan perikanan dalam satuan kawasan perdesaan; (c) memperkuat aparat desa dan pemangku desa lainnya perihal pembangunan kawasan perdesaan; (d) membentuk kelembagaan kawasan perdesaan (desa, antar desa dan regional); (e) menjembatani kerjasama antar desa melalui pembangunan kawasan perdesaan berbasis peternakan dan perikanan; dan (f) membangun kerjasama multipihak (pemerintah, swasta dan komunitas).

Kemudian untuk penerapan hasil kegiatan diimplementasikan dalam bentuk: (a) regulasi pendekatan pembangunan daerah yang berorientasi kawasan perdesaan di bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan; (b) terbentuknya rencana tindak lanjut pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan, serta rencana bisnis (*business plan*) kawasan perdesaan di bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya pengentasan kemiskinan; dan (c) terbangunnya kesepakatan kerja antara pemerintah daerah, komunitas dan swasta dalam pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

BAB 4. METODE PENELITIAN

Pendekatan Teoritik

Tujuan pembangunan adalah mensejahterakan rakyat atau masyarakat. Inilah mandat yang diberikan kepada para perencana pembangunan agar tidak mengulangi dosa-dosa perencana pembangunan yang disampaikan Mabhul Haq (1983). Dengan demikian, hal yang pokok dalam pembangunan adalah pelibatan subyek pembangunan, yakni manusia atau masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Tjokrowinoto (1999) bahwa secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi nasional yang satu ke kondisi nasional yang di pandang lebih baik atau kemajuan yang terus menerus menuju perbaikan kehidupan manusia yang mapan.

Dalam konteks tersebut, maka pembangunan seyogyanya mampu mengentaskan persoalan kemiskinan. Sejauh ini, kemiskinan di Indonesia tersebar di pedesaan yang sebagian besar adalah petani (62,8% dari 28,5 juta). Atau dengan kata lain, kemiskinan identik dengan desa-desa yang memiliki tipologi pertanian. Sjaf (2016) menyebutkan bahwa sebanyak 73,14% dari kurang lebih 75 ribu desa di Indonesia adalah desa-desa bertipologi pertanian. Kondisi ini dikarenakan desa-desa tersebut mengalami beberapa kesenjangan, seperti: kesenjangan aset, kesenjangan pengetahuan, kesenjangan spasial, informasi, dan lain sebagainya. Hal senada disampaikan Supriatna (1997) bahwa lima karakteristik penduduk miskin, yakni: (1) tidak memiliki faktor produksi sendiri; (2) tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri; (3) tingkat pendidikan pada umumnya rendah; (4) banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas; dan (5) diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut di atas, telah banyak pendekatan yang dilakukan para perencana pembangunan baik secara struktural maupun kultural. Umumnya, pendekatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian barang yang dibutuhkan orang miskin, sebaliknya tidak didekati dengan memberdayakan orang miskin agar mampu memiliki pengetahuan, aset, informasi dan lain-lain (Yulfita 1998; Sumodiningrat 1999; Hikmat 2004).

Dengan diterbitkannya UU No. 6/2014 tentang Desa memberikan peluang pendekatan baru untuk merancang pembangunan daerah yang mampu mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Tonny, Sjaf *et al.* (2016) mengungkapkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang memiliki kekuatan kerjasama antar desa dan pengorganisasian komoditas antar desa yang berbasis partisipatif mampu memberikan solusi pengentasan kemiskinan di pedesaan. Dengan kondisi sosiologis masyarakat di pedesaan yang memiliki berbagai keterbatasan, maka kerjasama antar desa yang menitikberatkan pada kekuatan ekonomi lokal berbasis sumberdaya lokal, penguatan kapasitas warga desa, dan penguatan kelembagaan yang potensial untuk membangkitkan ekonomi lokal merupakan pendekatan alternatif pembangunan daerah yang mampu memberikan jawaban atas persoalan kemiskinan yang terjadi di pedesaan Indonesia.

Sistematika Kegiatan

Kajian kebijakan pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya pengentasan kemiskinan ini dilaksanakan selama satu tahun. Untuk mencapai tujuan yang telah disusun, maka pendekatan yang dilakukan adalah *action-research* atau

dikenal dengan nama lain, yakni kaji tindak partisipatif. Dalam konteks ilmu sosial, pendekatan ini sudah sering digunakan sebagai upaya konkrit dari peneliti (orang luar) untuk membantu orang dalam (warga) dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Dengan demikian, sistematika kegiatan dari kajian ini lebih menitikberatkan pada dialogis dengan multistakeholder mulai tingkat rumah tangga peternak/pembudidaya ikan, desa, antar desa, kabupaten, hingga lintas kabupaten. Pada masing-masing tingkatan, memiliki fokus penajaman yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap subyek memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap kebijakan pembangunan daerah dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Adapun sistematika kegiatan yang dimaksud disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Sistematika Kegiatan Kajian Pembangunan Daerah di Bidang Peternakan dan Perikanan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

Item	Tingkatan				
	RT peternak/ pembudidaya ikan	Desa	Antar Desa	Pemda Kabupaten	Multipihak
1. Fokus	Pola nafkah, <i>need assessment</i>	Pengetahuan kawasan perdesaan, potensi desa, program kemiskinan	Pengetahuan kawasan perdesaan, antar desa yang sudah dilakukan, pembentukan kawasan perdesaan, kelayakan usaha, kelembagaan pengelolaan ekonomi lokal, dan lain-lain yang dianggap potensial	Kebijakan yang disusun dan telah berjalan, upaya yang dilakukan pemda terkait kemiskinan, fasilitasi aktivitas ekonomi desa, dan lain-lain yang dianggap potensial	Kontribusi pengentasan kemiskinan, peran yang bisa dikerjasamakan, dan lain-lain yang dianggap potensial
2. Aktor yang terlibat	RT peternak dan pembudidaya ikan (termasuk warga miskin)	Aparat desa, lembaga-lembaga formal desa, tokoh masyarakat.	Wakil desa-desa yang menjadi lokus kajian	Bappeda dan OPD terkait dengan kajian	Swasta, NGO, Pemda
3. Manfaat	Terpetakannya pola nafkah warga miskin	Keterlekatan konsep kawasan perdesaan, kekuatan desa, program kemiskinan yang sesuai konteks warga	Keterlekatan konsep kawasan perdesaan, terbangunnya kerjasama antar desa, kelembagaan yang mengorganisir kawasan perdesaan, kekuatan ekonomi kawasan perdesaan, dan spasial potensi kawasan perdesaan	Kelembagaan penyangga kawasan perdesaan, kebijakan pro miskin, komitmen pemda, dan lokus yang ditetapkan sebagai pilot	Keberlanjutan bisnis, pendampingan, dan lain-lain yang dianggap potensial

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih delapan bulan, yaitu Maret-Oktober 2017. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mendatangi dinas terkait, yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Pengumpulan data primer berasal dari beberapa kegiatan FGD (*Forum Group Discussion*) dan pengisian kuisisioner oleh para ahli. FGD ini dilakukan dalam rangka diskusi permasalahan dan solusi terkait bidang peternakan yang dilaksanakan di Kota Malang dan

bidang perikanan di Kecamatan Kepanjen dan Ngajum, dan survey pola nafkah masyarakat setempat yang dilakukan di 2 Kecamatan, yaitu Wajak dan Kalipare.

Pada bidang peternakan, ahli yang diwawancara dan mengisi kuisioner AHP yaitu pihak akademisi selaku penggagas SPR, Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kasubid Ekonomi Primer, Kasubid Perencanaan Ekonomi Tersier, Kabid Perencanaan Ekonomi Bappeda Kabupaten Malang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ketua GPPT Kalipare, Manajer SPR Megajaya, Ketua SPR Wahyu Lestari, Perwakilan Investor.

Pada bidang perikanan, ahli yang diwawancara dan mengisi kuisioner AHP yaitu adalah pihak Pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Balai Benih Ikan (BBI), Penyuluh Perikanan. Selain itu adapula pihak lain seperti pelaku usaha antara lain: pembudidaya pembesaran, Unit Pembenihan Rakyat (UPR), pedagang ikan, dan pemasok pakan.

Jenis dan Sumber Data

Berbagai data dan informasi dikumpulkan untuk selanjutnya diolah dan menjawab permasalahan yang menjadi tujuan penelitian. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengisian kuisioner pada para pakar di bidang SPR, Peternakan, Perikanan dan Pemerintah. Teknik pengambilan data dilakukan dengan *purposive sampling*. Data primer digunakan sebagai informasi terkait situasi problematis terkait penyediaan SDM dan pembobotan prioritas strategi berdasarkan preferensi atau tingkat kesukaan pakar. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berasal dari jurnal, *website* relevan, buku teks, laporan, dan penelitian ilmiah lainnya.

Responden Ahli

Berdasarkan kriteria yang digunakan untuk pemilihan subjek SSM dan AHP setiap individu yang dijadikan sebagai responden penelitian ini memenuhi syarat untuk ikut serta berpartisipasi. Para ahli disarankan memiliki latar belakang dan pengalaman yang relevan terkait isu target, cakap untuk berkontribusi memberikan input yang baik. Subjek penelitian terdiri atas orang-orang yang terlatih dengan baik dan kompeten dengan pengetahuan yang berkaitan dengan spesialisasi area isu target. Saaty and Vargas (2012), subjek penelitian adalah:

1. Pengambil keputusan dari kalangan *top management*.
2. Para ahli dari berbagai latar belakang fungsional yang memiliki ide terkait tugas-tugas yang diberikan di masing-masing fungsi.
3. Pimpinan atau anggota divisi SDM perusahaan atau industri.

Prosedur Analisis Data

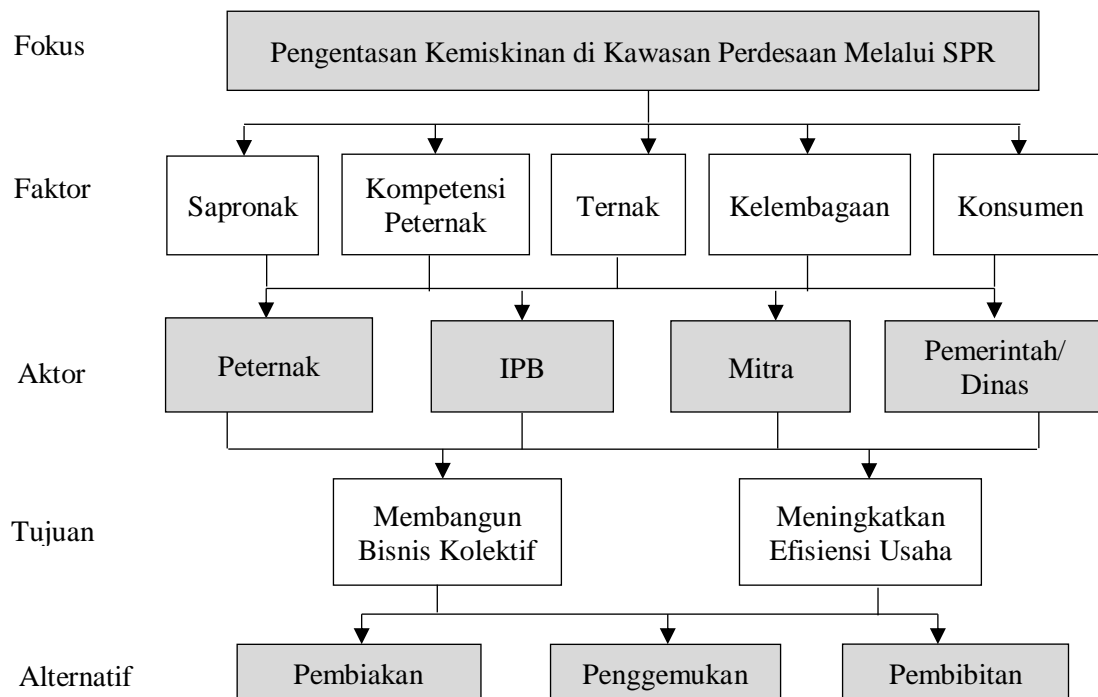
Analisis data menjelaskan cara menganalisis atau teknik mengolah data yang digunakan untuk menarik simpulan dari hasil kajian dari topik yang diteliti. Prosedur analisis data yang digunakan pada penelitian ini akan diuraikan secara merinci pada bab ini. Adapun *tools* yang digunakan adalah *rich picture*, AHP, dan statistik deskriptif.

Rich Picture

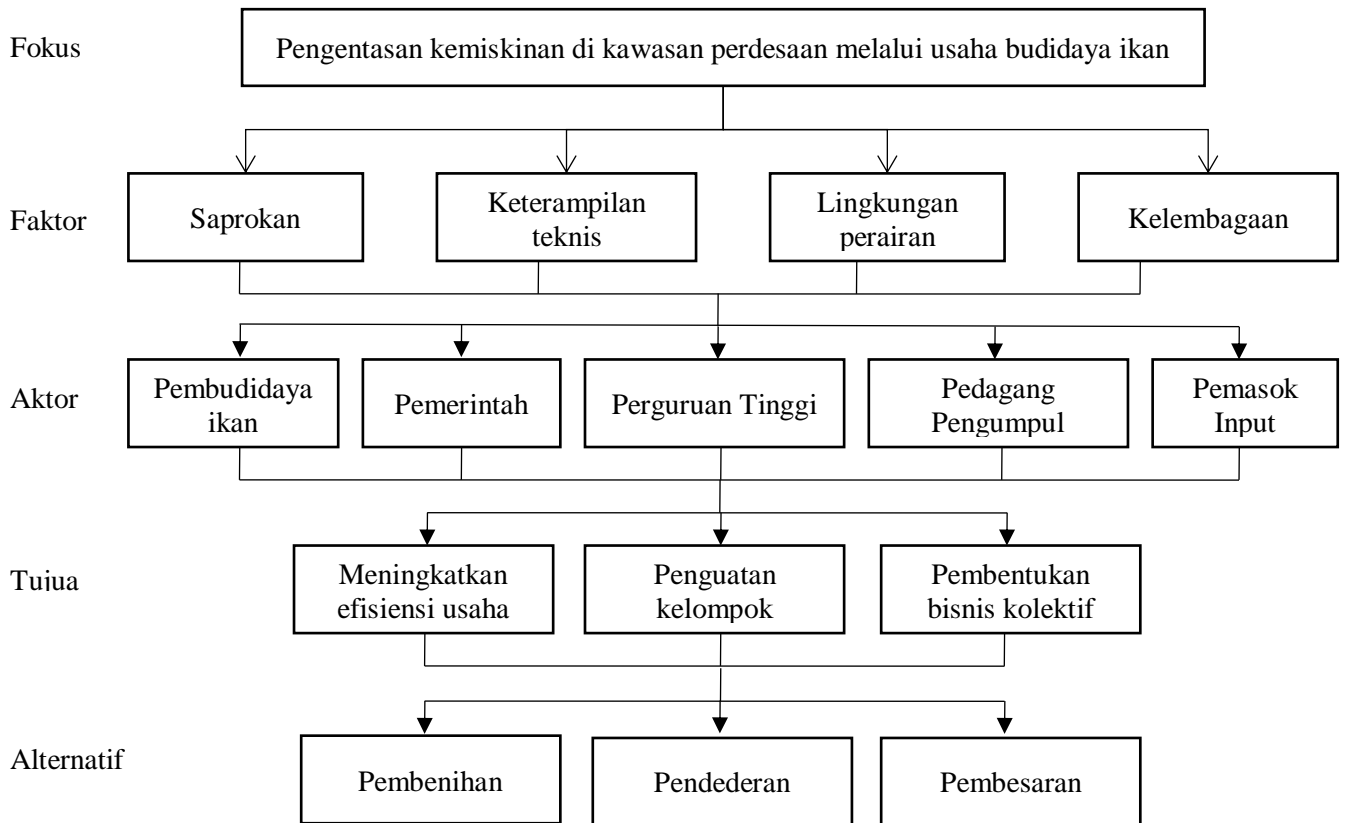
Situasi permasalahan atau problematis dunia nyata dapat diungkapkan melalui *rich picture*. Permasalahan utama pada penelitian ini disebabkan adanya kesenjangan kompetensi SDM pada saat ini dengan kualitas kompetensi SDM yang ideal. Pada proses pembuatan *rich picture*, dilakukan penentuan pihak-pihak yang berperan sebagai *Client* (C), Praktisi atau pemecah masalah (P), dan Pemilik Isu (O).

Analytical Hierarchy Process

Penetapan prioritas strategi dengan menggunakan AHP dilakukan dengan penyusunan hirarki terlebih dahulu. Penyusunan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor, aktor, tujuan, dan alternatif strategi berdasarkan hasil diskusi dengan pakar. Hierarki ini terdiri dari beberapa tingkat atau elemen-elemen yang telah diuraikan dari elemen pokoknya (Gambar 4 dan 5). Kuisisioner terkait AHP dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2.



Gambar 4 Struktur hierarki AHP bidang peternakan



Gambar 5 Struktur hierarki AHP bidang perikanan

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Bidang Peternakan

Potensi Peternakan

Potensi bidang peternakan di Kabupaten ditunjukkan dengan jumlah populasi ternak yang ada di wilayah tersebut. Adapun ternak yang dibudidayakan di kabupaten tersebut adalah sapi potong, sapi perah, kambing, domba, dan babi. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada tahun 2017 populasi ternak yang paling banyak dibudidayakan oleh peternak adalah kambing yang mencapai 250.514 ekor dan diikuti oleh populasi sapi potong sebesar 231.009 ekor (Tabel 2).

Tabel 2 Populasi Ternak Per Wilayah di Kabupaten Malang Tahun 2017

No	Kecamatan	Populasi Ternak (ekor)				
		Sapi Potong	Sapi Perah	Kambing	Domba	Babi
1	Donomulyo	11950	147	2802	141	0
2	Kalipare	15100	217	5296	217	0
3	Pagak	11901	66	4457	291	0
4	Bantur	13254	1709	7259	89	615
5	Gedangan	16240	62	5571	678	0
6	Sumbermanjing Wt	9615	0	6445	132	653
7	Dampit	8437	62	19451	34	2354
8	Tirtoyudo	2196	0	45084	1845	159
9	Ampelgading	918	27	51295	330	77
10	Poncokusumo	13998	2523	5351	265	0
11	Wajak	17018	2117	7383	332	0
12	Turen	9803	702	4975	266	0
13	Bululawang	2513	100	2946	18	0
14	Gondanglegi	6378	342	3412	123	0
15	Pagelaran	3030	667	3172	298	0
16	Kepanjen	1239	297	2777	28	2682
17	Sumberpucung	4565	125	802	66	221
18	Kromengan	2118	20	6377	31	5281
19	Ngajum	6429	8541	7561	39	0
20	Wonosari	2869	152	20044	250	0
21	Wagir	6682	552	3441	71	50
22	Pakisaji	2215	65	2655	23	0
23	Tajinan	6894	292	3618	22	101
24	Tumpang	6188	519	1652	91	72
25	Pakis	8387	262	1252	217	0
26	Jabung	5897	14083	5387	718	7
27	Lawang	8745	2243	5718	393	0
28	Singosari	13110	580	2669	250	0
29	Karangploso	4458	2685	1581	2627	65

30	Dau	6818	1453	3212	13177	1354
31	Pujon	358	21123	2115	4402	10
32	Ngantang	277	15850	2649	6096	0
33	Kasembon	1409	5328	2105	0	0
Jumlah		231009	82911	250514	33560	13701

Di Kabupaten Malang, terdapat 12 SPR yang sudah berdiri. SPR-SPR tersebut terdiri dari 3 SPR sapi perah, 7 SPR sapi potong, dan 3 SPR kambing. Daftar SPR Kabupaten Malang tertera pada Tabel 3.

Tabel 3 Daftar SPR Kabupaten Malang Tahun 2016

No	Nama SPR	Komoditi	Jumlah Ternak (Ekor)		Jumlah Ternak	Jumlah Peternak
			Indukan	Jantan		
1	SPR Sapi Perah Ngajum	Sapi Perah	1537	17	1554	247
2	SPR Sapi Perah Lawang	Sapi Perah	283	80	363	173
3	SPR Sapi Perah Wajak	Sapi Perah	474	44	518	216
4	SPR Sapi Potong Gedangan	Sapi Potong	411	31	442	292
5	SPR Sapi Potong Kalipare	Sapi Potong	721	202	923	383
6	SPR Sapi Potong Pagak	Sapi Potong	563	112	675	343
7	SPR Sapi Potong Donomulyo	Sapi Potong	906	37	943	538
8	SPR Sapi Potong Singosari	Sapi Potong	456	23	479	297
9	SPR Sapi Potong Pakis	Sapi Potong	298	41	339	195
10	SPR Sapi Potong Wajak	Sapi Potong	580	188	768	374
11	SPR Kambing Ampelgading	Kambing	1641	753	2394	295
12	SPR Kambing Wonosari	Kambing	2520	479	2999	450

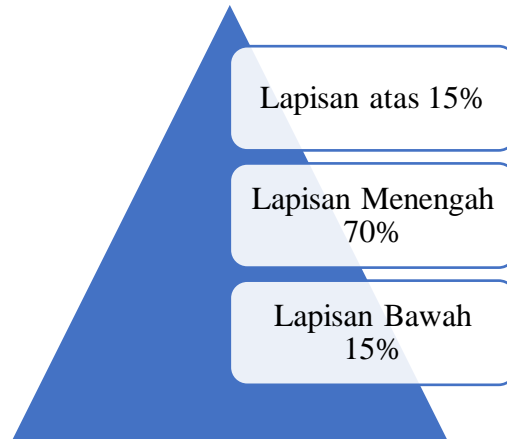
Survey Pola Nafkah

Desa Arjowilangun merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kali brantas, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukowilangun, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tumpakrejo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Arjosari. Luas wilayah Desa Arjowilangun adalah 1.356.324 Ha. Jumlah penduduk menurut profil desa tahun 2017 sebanyak 15.343 yang terdiri dari 4.308 KK. Wilayah Arjowilangun terbagi atas lima dukuh dan tiga dusun, diantaranya yaitu Panggang Lele, Duren, Bengkok, Dung Dampar, Lodalem dan Bonsari dengan 7 RW, 68 RT.

Kerjasama yang ada di Desa Arjowilangun masih cukup kuat diantara masyarakat. Budaya gotong royong masih melekat pada aktivitas sehari-hari. Misalnya dalam hal pembuatan rumah, diantara masyarakat saling membantu dalam hal tenaga. Disamping itu juga budaya gotong royong dalam kegiatan hajatan dan kematian. Hal tersebut dibangun berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri tanpa paksaan dari siapapun.

Stratifikasi sosial di Desa Arjowilangun terbagi menjadi 3, yaitu lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah. Indikator yang menjadi acuan sebutan lapisan atas, menengah, dan bawah adalah berdasarkan penilaian lokal masyarakat, diantaranya adalah: (1) Indikator lapisan atas adalah rumah tangga yang memiliki pekerjaan tetap, memiliki perhiasan, memiliki tanah sawah yang luas, rumahnya mewah, memiliki mobil mewah,

memiliki sapi lebih dari 10, memiliki usaha, dan dermawan. (2) Indikator lapisan menengah adalah rumah tangga yang memiliki sepeda motor, memiliki mobil tapi tidak terlalu mewah, rumahnya sudah keramik, dan memiliki sapi maksimal 5. (3) Indikator lapisan bawah dilihat dari rumahnya yang masih terbuat dari bambu, lantainya masih dari tanah, tidak memiliki kendaraan pribadi, tidak memiliki sapi hanya memiliki ayam. Piramida stratifikasi sosial dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6 Stratifikasi sosial masyarakat di Kecamatan Kalipare, Desa Arjowilangun

Sumber mata pencaharian yang ada di Desa ini cukup beragam, diantaranya: petani sawah, peternak, pedagang, supir, perkebunan, TKI/TKW, guru, tukang bangunan, buruh tani, dan *home industry*. Desa Arjowilangun merupakan salah satu desa penyumbang TKI terbesar di kecamatan Kalipare sebagai dan memberi kontribusi terhadap devisa negara. Selain itu, Desa Arjowilangun juga merupakan salah satu desa yang mendapatkan program SPR (Sekolah Peternakan Rakyat). Pemerintah memberikan 10 ekor sapi potong yang dikelola oleh SPR yang dinamakan SPR Wahyu Sejati. Dari hasil FGD ada beberapa masalah yang dihadapi oleh peternak sapi potong. Penjelasan secara rinci, dijelaskan pada tabel dibawah ini (Tabel 4).

Tabel 4 Deskripsi dan Akar Masalah

Masalah	Deskripsi (dampak)	Akar Masalah
1. Pola penjualan sapi, membeli dengan harga mahal, dijual dengan harga murah	Karena sering rugi, peternak mencari alternatif pekerjaan lain	Kurangnya mengelola waktu penjualan, dan adanya konspirasi antar penjual sapi
2. Makanan pendukung (polar) sangat mahal	Peternak mengalami kerugian	Tidak bisa mengolah makanannya sendiri
3. Sapi betina sulit hamil	Terlalu banyak impor sapi dari luar negeri, hasilnya peternak menjadi rugi	Akibat sapi diberi polar dan salah waktu penyuntikan disaat birahi
4. Kekurangan bahan pakan	Harus membeli makanan pendukung	Tidak berimbang antar ternak dan pakannya, apalagi pada bulan kemarau
5. Sapi cacat harganya menjadi murah	Keuntungan peternak sangat kecil	Karena tidak ada timbangan

Dari masalah-masalah diatas, harapan peternak sapi potong diantaranya:

1. Perguruan Tinggi diharapkan segera mungkin turun ke peternak agar mentransfer ilmunya kepada peternak di Desa sehingga mengurangi tingkat kerugian yang ada
2. Diharapkan adanya program yang berkelanjutan
3. Berharap ada investor yang masuk ke Desa untuk meningkatkan pengembangan ternak di Desa
4. Adanya tindak lanjut dari pelatihan-pelatihan yang pernah dilakukan

Berdasarkan hasil *focus group discussion* (FGD), masyarakat Desa Arjowilangun secara ekonomi mayoritas ada pada lapisan menengah. Untuk menggali informasi lebih dalam mengenai perekonomian rumah tangga, dilakukan survey untuk mengetahui sumber penghasilan terbesar dan pengeluaran terbesar. Berikut data masyarakat peternak sapi potong menurut sumber pendapatan.

Tabel 5 Persentase masyarakat peternak sapi potong di Desa Arjowilangun menurut sumber pendapatan

No	Sumber pendapatan	Persentase (%)
1	Non pertanian	6.4
2	Pertanian	30.0
3	Perikanan	0
4	Kehutanan	8.3
5	Peternakan	45.0
6	<i>Off farm</i>	10.3
Total		100

Dari Tabel 5 terlihat, penghasilan terbesar ada pada bidang peternakan sebesar 45% dari ternak sapi, kambing dan ayam. Sedangkan penghasil terbesar kedua ada pada bidang pertanian sebesar 30% dari hasil komoditas padi dan tebu. Sebagian besar masyarakat tidak hanya memiliki pekerjaan utama saja, tetapi juga memiliki pekerjaan sampingan. Ada yang pekerjaan utamanya sebagai perangkat desa, pekerjaan sampingannya sebagai peternak. Ada juga yang pekerjaan utamanya sebagai peternak, pekerjaan sampingannya sebagai petani sawah. Selain itu juga ada yang pekerjaan utamanya sebagai pedagang, pekerjaan sampingannya sebagai peternak. Strategi-strategi dalam pengelolaan nafkah di Desa Arjowilangun terlihat sangat beragam.

Tabel 6 Persentase masyarakat peternak sapi potong di Desa Arjowilangun menurut pengeluaran

No	Pengeluaran	Persentase (%)
1	Pangan	24.8
2	Energi	18.0
3	Usaha Tani	6.4
4	Usaha Ternak	14.0
5	Usaha Perikanan	0
6	Pendidikan	9.9
7	Pakaian	4.5
8	Sosial	3.4
9	Lainnya	19
Total		100

Berdasarkan Tabel 6, pengeluaran rumah tangga peternak sapi potong terbesar adalah pengeluaran pangan (beras, sayur, lauk, bumbu dapur, dan air bersih) sebesar 24.8%. Pengeluaran terbesar kedua pada energi (listrik, BBM/Transport, dan Gas).

Mekanisme adaptasi rumah tangga peternak sapi potong di Desa Arjowilangun dilihat dari persepsi masyarakat terhadap ketersediaan, kemudahan, dan intensitas penggunaan modal sumber daya alam (*natural capital*), modal finansial, modal sumber daya manusia (*human capital*), dan modal sosial (*social capital*). Berikut adalah persentase ketersediaan modal sumber daya berdasarkan persepsi peternak sapi potong di Desa Arjowilangun.

Tabel 7 Persentase ketersediaan modal sumber daya berdasarkan persepsi masyarakat peternak sapi potong di Desa Arjowilangun

Modal	Sumber daya	Tidak tersedia (%)	Kurang tersedia (%)	Cukup tersedia (%)	Tersedia (%)	Sangat tersedia (%)	Total (%)
Alam	Sungai	21,4	7,1	28,6	42,9	0	100
	Lahan kebun	35,7	7,1	21,4	35,7	0	100
	Kolam	85,7	0	0	14,3	0	100
Fisik	Listrik	0	0	0	28,6	71,4	100
	Air	0	0	0	42,9	57,1	100
	Jalan	0	0	0	78,6	21,4	100
	Ternak	0	0	7,1	57,1	35,7	100
	Kendaraan pribadi	7,1	0	14,3	57,1	35,7	100
Sumber daya manusia	Pelatihan keterampilan	28,6	14,3	21,4	35,7	0	100
	Penyuluhan	14,3	21,4	35,7	28,6	0	100
	Keterampilan lain	14,3	21,4	35,7	28,6	0	100
Finansial	Bank	7,1	14,3	21,4	50,0	7,1	100
	Koperasi	50,0	14,3	0	35,7	0	100
	Lembaga keuangan mikro	71,4	7,1	7,1	14,3	0	100
	Tabungan rumah tangga	7,1	14,3	21,4	57,1	0	100
Sosial	Lembaga agama	0	21,4	28,6	50,0	0	100
	Kelompok tani	7,1	7,1	21,4	64,3	0	100
	Kelompok keagamaan	14,3	28,6	28,6	28,6	0	100
	Kelompok pengelola air	78,6	0	7,1	14,3	0	100
	ASKES	50,0	0	28,6	21,4	0	100
	BPJS	50,0	0	28,6	21,4	0	100
	KIS	92,9	0	0	7,1	0	100

Berdasarkan Tabel 7, tersedia sumber daya alam berupa sungai yang bisa menunjang aktivitas kegiatan pertanian masyarakat, salah satunya untuk pengairan sawah. Selain itu juga tersedia lahan kebun, yang dimanfaatkan untuk menanam tebu dan jagung. Sebagian besar peternak sapi potong memanfaatkan kebunnya sebagai sumber makanan bagi sapi. Terkait sumber daya fisik, seperti jalan, air, ternak, dan kendaraan pribadi juga sudah tersedia di Desa Arjowilangun. Sumber daya yang bisa menunjang kapasitas masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan penyuluhan cukup tersedia, hanya saja program pelatihan keterampilan yang masuk ke Desa Arjowilangun sebagian besar tidak berkelanjutan. Sumber daya finansial yang ada di Desa Arjowilangun sudah tersedia yang

bisa dimanfaatkan peternak untuk mendukung aktivitasnya. Selanjutnya, sumber daya sosial seperti kelompok tani dan lembaga agama juga tersedia, sedangkan ASKES, BPJS, dan KIS masih banyak masyarakat yang tidak memilikinya. Ada sebagian masyarakat yang menganggap tidak penting adanya asuransi kesehatan.

Tabel 8 Persentase tingkat kemudahan akses modal sumber daya berdasarkan persepsi masyarakat peternak sapi potong di Desa Arjowilangun

Modal	Sumber daya	Sangat sulit (%)	Sulit (%)	Cukup mudah (%)	Mudah (%)	Sangat mudah (%)	Total (%)
Sumber daya alam	Sungai	7,1	35,7	14,3	35,7	7,1	100
	Lahan kebun	0	42,9	28,6	28,6	0	100
	Kolam	35,7	50	7,1	7,1	0	100
Fisik	Listrik	0	0	0	71,4	28,6	100
	Air	0	0	7,1	64,3	28,6	100
	Jalan	0	0	0	50,0	50,0	100
	Ternak	0	0	7,1	50,0	42,9	100
	Kendaraan pribadi	0	7,1	0	64,3	28,6	100
Sumber daya manusia	Pelatihan keterampilan	0	42,9	35,7	14,3	7,1	100
	Penyuluhan	0	28,6	35,7	28,6	7,1	100
	Keterampilan lain	14,3	57,1	28,6	0	0	100
Finansial	Bank	0	21,4	7,1	57,1	14,3	100
	Koperasi	7,1	35,7	28,6	21,4	7,1	100
	Lembaga keuangan mikro	28,6	42,9	7,1	21,4	0	100
	Tabungan rumah tangga	7,1	14,3	21,4	57,1	0	100
	Lembaga agama	0	14,3	21,4	57,1	0	100
Sosial	Kelompok tani	0	21,4	28,6	42,9	7,1	100
	Kelompok keagamaan	7,1	35,7	28,6	21,4	7,1	100
	Kelompok pengelola air	57,1	21,4	7,1	14,3	0	100
	ASKES	35,7	21,4	21,4	21,4	0	100
	BPJS	42,9	0	35,7	21,4	0	100
	KIS	78,6	7,1	7,1	7,1	0	100

Tabel 8 menunjukkan tingkat kemudahan akses terhadap sumber daya bergantung pada ketersediaan sumber daya yang ada. Adanya sumber daya yang tersedia, menjadikan masyarakat lebih mudah mengaksesnya baik pada sumber daya alam, fisik, finansial, maupun sosial. Seperti ketersediaan sumber daya alam lahan kebun, masyarakat yang memiliki lahan kebun secara otomatis akan mudah dalam mengaksesnya. Begitupun dengan sumber daya fisik, ketersediaan air, jalan, ternak, listrik, dan kendaraan pribadi menjadikan masyarakat mudah untuk mengakses/memanfaatkannya sebagai sarana penunjang kehidupan.

Tabel 9 Persentase tingkat penggunaan modal sumber daya berdasarkan persepsi masyarakat peternak sapi potong di Desa Arjowilangun

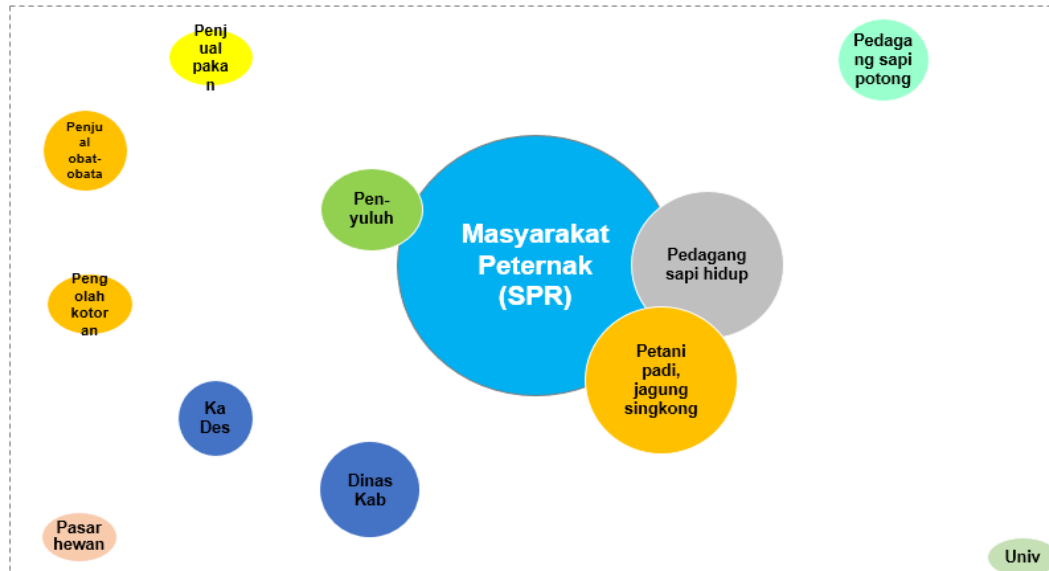
Modal	Sumber daya	Tidak pernah (%)	Jarang (%)	Kadang-kadang (%)	Sering (%)	Sangat sering (%)	Total (%)
Sumber daya alam	Sungai	35,7	28,6	7,1	14,3	14,3	100
	Lahan kebun	21,4	28,6	14,3	35,7	0	100
	Kolam	85,7	0	0	14,3	0	100
Fisik	Listrik	0	0	0	21,4	78,6	100
	Air	0	0	0	35,7	64,3	100
	Jalan	0	0	0	42,9	57,1	100
	Ternak	0	0	14,3	57,1	28,6	100
	Kendaraan pribadi	7,1	0	0	42,9	50,0	100
Sumber daya manusia	Pelatihan keterampilan	21,4	14,3	35,7	21,4	7,1	100
	Penyuluhan	21,4	14,3	28,6	28,6	7,1	100
	Keterampilan lain	14,3	50,0	35,7	0	0	100
Finansial	Bank	21,4	14,3	21,4	42,9	0	100
	Koperasi	57,1	7,1	21,4	14,3	0	100
	Lembaga keuangan mikro	78,6	7,1	7,1	7,1	0	100
	Tabungan rumah tangga	7,1	14,3	21,4	57,1	0	100
	Lembaga agama	14,3	21,4	21,4	14,3	28,6	100
Sosial	Kelompok tani	7,1	21,4	21,4	42,9	7,1	100
	Kelompok keagamaan	28,6	21,4	28,6	21,4	0	100
	Kelompok pengelola air	78,6	0	7,1	14,3	0	100
	ASKES	57,1	35,7	0	7,1	0	100
	BPJS	71,4	14,3	7,1	7,1	0	100
	KIS	92,9	0	0	7,1	0	100

Tabel 9 menunjukkan data intensitas penggunaan sumber daya yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat adalah sumber daya fisik. Diantaranya jalan, listrik, air, ternak, dan kendaraan pribadi. Sumber daya tersebut digunakan sebagai sarana penunjang kehidupan masyarakat yang hampir setiap hari tidak bisa lepas dari aktivitas masyarakat. Untuk sumber daya sosial, masyarakat sebagian besar tidak pernah menggunakan asuransi kesehatan. Hanya sebagian kecil saja yang menggunakan asuransi kesehatan ketika sakit.

Jumlah populasi sapi potong di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Khususnya di Kecamatan Kalipare, selain di Desa Arjowilangun yang terdapat banyak peternak sapi potong juga terdapat di Desa Arjosari. Pada tanggal 5 Oktober 2017, Dinas Peternakan Kabupaten Malang mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan pakan ternak di Desa Arjosari. Desa Arjowilangun adalah satu-satunya desa yang diundang pada kegiatan pelatihan tersebut, karena secara geografis jaraknya cukup dekat.

Berdasarkan kesamaan visi antara Desa Arjowilangun dan Desa Arjosari untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sapi potong, kedua desa tersebut memiliki peluang untuk melakukan kerjasama antar desa. Pada tanggal 6 Oktober 2017, Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan aparat desa dari masing-masing perwakilan Desa Arjosari dan Desa Arjowilangun memenuhi undangan FGD. Materi FGD yang dibahas mengenai analisis kelembagaan-kelembagaan yang memiliki kedekatan dan kepentingan

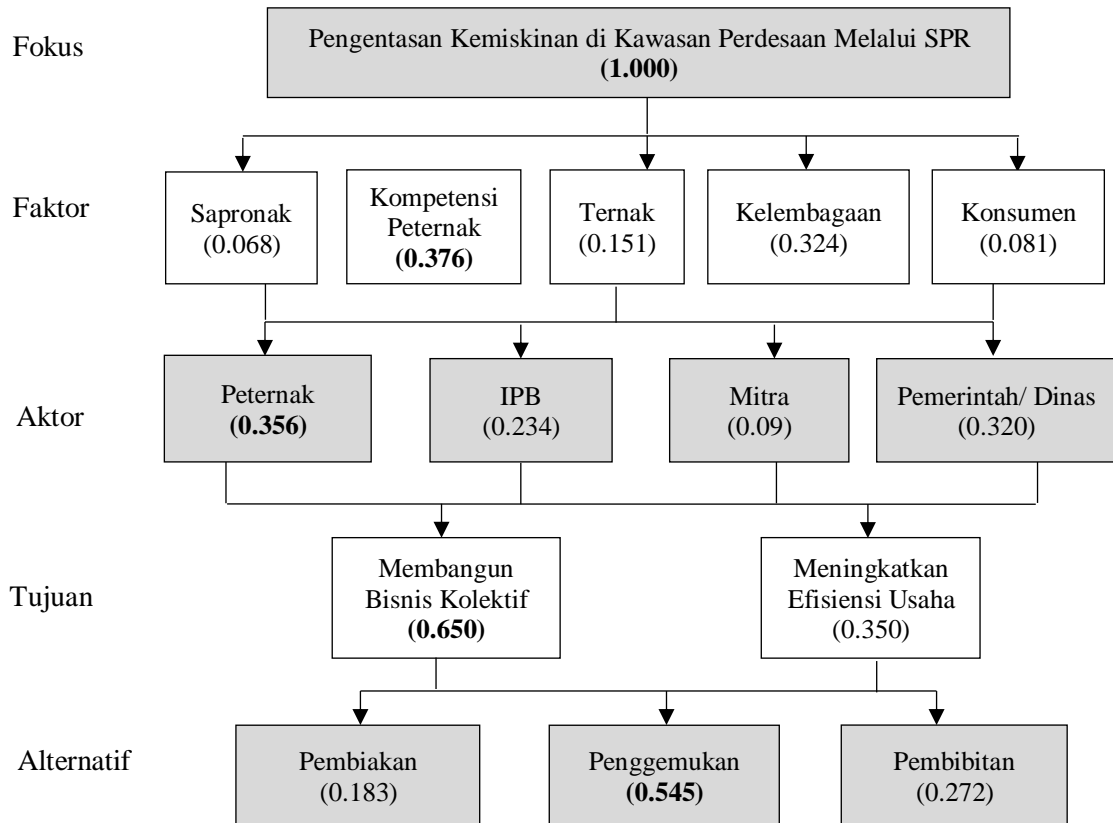
dengan SPR yang ada di Desa Arjowilangun dan Desa Arjosari. Kelembagaan-kelembagaan tersebut, seperti lembaga keuangan, lembaga pendidikan tinggi, dan kelembagaan yang lainnya diharapkan menjadi pendukung berjalannya kegiatan pengelolaan ternak secara kolektif tersebut. Tingkat kepentingan dan kedekatan antar lembaga-lembaga dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7 Diagram venn terkait kelembagaan dan aktor yang berpengaruh

Model Pembentukan SPR

Kebijakan pengentasan kemiskinan untuk pelaku usaha budidaya peternakan dianalisis dengan menggunakan analisis hierarki proses (AHP). Hierarki dibuat dengan menggunakan 5 tingkat yaitu: tingkat pertama yaitu fokus yang merupakan tujuan utama pembentukan SPR yaitu pengentasan kemiskinan di perdesaan melalui SPR; tingkat kedua faktor yang mempengaruhi pembentukan SPR sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi upaya pengentasan kemiskinan. Adapun faktornya yaitu sarana produksi ternak, kompetensi peternak, ternak, kelembagaan, dan konsumen; tingkat ketiga aktor yang terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan yang mencakup peternak, pemerintah, perguruan tinggi, dan investor; tingkat keempat yaitu tujuan yang ingin dicapai untuk pengentasan kemiskinan, yaitu membangun bisnis kolektif dan meningkatkan efisiensi usaha; dan tingkat kelima yaitu alternatif kebijakan untuk mencapai upaya pengentasan kemiskinan, yaitu pembiakan, penggemukan, dan pembibitan. Struktur dan hasil pembobotan prioritas AHP dengan fokus Pengentasan Kemiskinan di Kawasan Perdesaan Melalui SPR (Sekolah Peternakan Rakyat) dapat dilihat pada Gambar 8. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software expert choice*. Nilai *consistency ratio* dari pengolahan data AHP ini sebesar 0.05 yang berarti nilai konsistensi penilaian pakar sudah baik, karena tidak melebihi nilai 0.1.



Gambar 8 Struktur AHP Bidang Peternakan dan Bobot Prioritas

1. Hasil Pengolahan Elemen Faktor

Berdasarkan hasil pengolahan diketahui bahwa faktor kelembagaan menempati urutan pertama prioritas dengan bobot 0.324, faktor lingkungan perairan menempati urutan kedua, keterampilan teknis ketiga dan keempat faktor kelembagaan. Hasil analisis AHP untuk analisis elemen faktor disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Bobot nilai analisis elemen faktor

Faktor	Bobot nilai
Sapronak	0.068
Kompetensi Ternak	0.376
Ternak	0.151
Kelembagaan	0.324
Konsumen	0.081

Faktor kelembagaan merupakan faktor yang harus ada untuk membangun SPR. Kelembagaan meliputi struktur organisasi yang disertai dengan kesadaran semua anggotanya untuk bekerja sama merupakan syarat mutlak yang harus tersedia. Faktor sarana produksi ternak memiliki nilai terendah diduga karena tidak memiliki peran yang kuat dalam pembentukan SPR ini.

2. Hasil Pengolahan Elemen Aktor

Dari hasil analisis elemen aktor diperoleh urutan nilai sebagai berikut: peternak (0,356), pemerintah (0,320), perguruan tinggi/IPB (0,234), mitra atau investor (0,090). Secara lengkap nilai analisis elemen aktor terhadap faktor disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11 Bobot nilai analisis elemen aktor terhadap faktor

Aktor	Sapronak	Kompetensi ternak	Ternak	Kelembagaan	Konsumen	Bobot Faktor	Bobot Aktor
Peternak	0,241	0,079	0,617	0,584	0,338	0,068	0,356
IPB	0,145	0,385	0,097	0,163	0,145	0,376	0,234
Mitra	0,184	0,075	0,058	0,064	0,245	0,151	0,090
Pemerintah/ Dinas	0,430	0,461	0,228	0,189	0,272	0,324	0,320

Analisis Aktor terhadap faktor menunjukkan hasil bahwa peternak lebih prioritas dibandingkan dengan aktor lainnya dengan bobot 0.356. Mitra memiliki bobot yang terendah terhadap elemen faktor yaitu 0.090. Hal ini diduga karena masih minimnya peran dan keterlibatan mitra yang ada di kawasan Kabupaten Malang dan Kota Malang dalam pengembangan SPR.

3. Hasil Pengolahan Elemen Tujuan

Dari hasil analisis elemen tujuan terhadap aktor menunjukkan hasil bahwa bisnis kolektif merupakan tujuan prioritas pertama dibandingkan dengan tujuan lainnya dengan bobot 0,650. Tujuan prioritas kedua yaitu penguatan bisnis kolektif (0,350). Secara lengkap nilai analisis elemen tujuan terhadap aktor disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12 Bobot nilai analisis elemen tujuan terhadap aktor

Tujuan	Peternak	IPB	Mitra	Pemerintah/ Dinas	Bobot Aktor	Bobot Tujuan
Bisnis Kolektif	0,758	0,586	0,579	0,598	0,356	0,650
Efisiensi Usaha	0,242	0,414	0,421	0,402	0,234	0,350

Bisnis kolektif merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi penguatan kelembagaan usaha. Jika penguatan lembaga bagus maka motivasi dan juga tingkat kerja sama antar anggota menjadi lebih tinggi dan hal ini akan mempengaruhi usaha secara keseluruhan. Oleh karena bisnis kolektif merupakan tujuan prioritas pertama dibanding dengan efisiensi usaha.

4. Hasil Pengolahan Elemen Alternatif Kebijakan

Dari hasil analisis elemen alternatif terhadap tujuan menunjukkan hasil bahwa usaha penggemukan merupakan alternatif kebijakan prioritas dibandingkan dengan alternatif lainnya dengan bobot 0.553. Alternatif kebijakan kedua yaitu usaha pembibitan (0,265) dan ketiga usaha pembiakan (0,183). Secara lengkap nilai analisis elemen alternatif kebijakan terhadap tujuan disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13 Bobot nilai analisis elemen alternatif terhadap tujuan

Alternatif	Bisnis Kolektif	Efisiensi Usaha	Bobot Tujuan	Bobot Alternatif
Pembiakan	0,185	0,178	0,650	0,183
Penggemukan	0,506	0,641	0,350	0,553
Pembibitan	0,310	0,181		0,265

Usaha penggemukan umumnya memberikan tingkat pendapatan yang relatif lebih tinggi dibanding usaha pembibitan dan pembiakan. Oleh karena itu alternatif kebijakan usaha penggemukan merupakan prioritas pertama dibanding kedua jenis usaha budidaya lainnya.

Bidang Perikanan

Potensi Perikanan

Potensi perikanan yang ada di Kabupaten Malang berupa potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Potensi perikanan budidaya antara lain budidaya perairan umum, mina padi, mina mendong, kolam, tambak (budidaya air payau) dan budidaya laut. Sedangkan potensi perikanan tangkap berupa perikanan tangkap laut dan perairan umum.

Pembentukan SPR bidang Perikanan pada kajian ini adalah terfokus pada perikanan budidaya, dari hasil survey pendahuluan berupa pengumpulan data dan interview didapat hasil bahwa Potensi budidaya perairan umum antara lain berada di Kecamatan Kalipare, Pagak, Sumberpucung, Kromengan, Ngantang, dan Pagelaran. Potensi mina padi antara lain berada di Kecamatan Wajak, Turen, Bululawang, Gondanglegi, Ngajum, Wonosari, Tajinan, dan Pakis. Potensi mina mendong ada di Kecamatan Wajak. Potensi budidaya kolam tersebar di semua kecamatan se-wilayah Kabupaten Malang. Potensi tambak (budidaya air payau) berada di Kecamatan Gedangan, Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo. Potensi budidaya laut berada di 6 (enam) kecamatan pantai yaitu Kecamatan Donomulyo, Gedangan, Bantur, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo dan Ampelgading.

Tabel 14 menunjukkan luas lahan potensi budidaya yang ada di Kabupaten Malang pada tahun 2015 seluas 20.521,40 Ha. Budidaya minapadi menempati urutan pertama yang paling potensial dari segi luas potensi sebesar 12.882 Ha. Luas lahan budidaya perikanan pada tahun 2016 sebesar 516,64 Ha dan telah mengalami penurunan dari tahun 2015 (Tabel 15).

Tabel 14 Luas Potensi Budidaya Kabupaten Malang

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Budidaya Perairan Umum	2.325,9
2	Minapadi	12.882
3	Minamendong	180
4	Kolam	4.418
5	Tambak	185,5
6	Budidaya laut	530
Total		20.521,4

Tabel 15 Luas Lahan Perikanan Budidaya Tahun 2012 – 2016 (dalam Ha)

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tambak	84,50	84,50	84,50	84,50	84,50
	Kolam	157,47	185,15	190,19	195,32	195,50
2	Minapadi	10,00	11,00	11,00	11,00	12,00
3	Minamendong	41,25	42,33	42,33	42,33	33,00
4	Jaring Sekat/Jaring Apung	241,00	241,00	241,00	241,00	191,64
6	Budidaya Laut	-	-	-	-	-
Total Luas		534,17	563,98	569,02	574,15	516,64

Produksi perikanan budidaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seperti yang tercantum pada Rencana Strategik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 2016/2021, pada tahun 2011 produksi budidaya sebesar 12.237,49 ton. Pada tahun 2012 meningkat sebesar 25,69% menjadi 15.380,75 ton. Pada tahun 2013 meningkat sebesar 10,98% menjadi 17.070,16 ton. Pada tahun 2014 meningkat sebesar 14,56% atau sebesar 19.555,84 ton. Dan pada tahun 2015 meningkat sebesar 4,71% menjadi 20.476,92 ton.

Pada tahun 2016 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 0,42% atau sebesar 21.162 ton, dengan rincian produksi Budidaya perWadah sebagai berikut.

Produksi perikanan budidaya Kabupaten Malang berdasarkan wadah budidaya dapat dilihat pada Tabel 16. Produksi perikanan budidaya yang paling tinggi berasal dari kolam yakni mencapai luas sebesar 9.956,96 Ha yang kemudian diikuti oleh keramba jaring apung sebesar 8.783,27 Ha.

Tabel 16 Produksi Perikanan Budidaya Per Wadah Budidaya Tahun 2016

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Kolam (beton, Terpal, Tanah)	9.956,96
2	Minapadi	26,04
3	Minamendong	0,00
4	Tambak	2.357,28
5	Keramba Jaring Apung/Jaring sekat	8.783,27
Total		21.162,55

Tabel 17 menunjukkan produksi perikanan budidaya tahun 2012-2016. Kenaikan produksi terbesar berasal dari jenis perairan air payau dengan wadah tambak yang mencapai 169,40%. Jenis perairan air tawar khususnya dengan wadah budidaya kolam memiliki persentase kenaikan produksi tertinggi, yaitu sebesar 90,52%.

Tabel 17 Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Perairan / Wadah Budidaya	Tahun					Kenaikan/ Penurunan (%)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2015-2016	2012-2016
1	Air Payau	875,00	982,00	2.657,00	2.189,00	2.357,28	7,69	169,40
	a. Tambak	875,00	982,00	2.657,00	2.189,00	2.357,28	7,69	169,40
2	Air Tawar	14.505,75	16.008,16	16.898,84	18.287,92	18.205,26	-0,45	25,50
	a. Jaring sekat/KJ A	9.407,25	10.243,03	9.339,41	8.761,40	8.583,27	-2,03	-8,76
	b. Kolam	4.990,00	5.732,91	7.445,60	9.416,97	9.506,75	0,95	90,52
	c. Mina Mendong	87,45	88,90	89,40	89,10	89,20	0,11	2,00
	d. Mina Padi	21,05	23,32	24,43	20,45	26,04	27,35	23,72
Jumlah		15.380,75	17.070,16	19.555,84	20.476,92	20.562,55	0,42	33,69

Komoditas unggulan perikanan Budidaya di Kabupaten Malang adalah Nila dan Lele hal ini terlihat pada data tabel produksi tahun 2016 (Tabel 18) produksi lele sebesar 8.940,13 Ton dan Lele sebesar 9.593,97 Ton sedangkan untuk komoditas penunjang adalah ikan Mas dan Gurame.

Tabel 18 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Tahun 2016 (ton)

No	Jenis Ikan	Jenis Usaha					Jumlah
		Kolam	Jaring Sekat	Tambak	Mina Mendong	Mina Padi	
1	Lele	9.193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,97
2	Nila	219,60	8.417,03	0,00	89,20	14,29	8.740,12
3	Udang	0,00	0,00	2.357,28	0,00	0,00	2.357,28
4	Vannamei						
4	Tombro/Mas	60,67	166,24	0,00	0,00	11,75	238,65
5	Gurame	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28
6	Lain – lain	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16
7	Patin	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07
	Jumlah	9.506,75	8.583,27	2.357,28	89,20	26,04	20.562,55

*) Statistik KKP : Produksi Mina Mendong Masuk Katogori Kolam

Apabila Produksi Perikanan Budidaya dikelompokkan berdasarkan kewilayahan di Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 Kecamatan untuk tahun 2016 produksi tertinggi adalah kecamatan Sumber Pucung sebesar 3.850 ton dan produksi terendah pada kecamatan Pujon sebesar 20 ton, perkembangan produksi perikanan budidaya tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut (Tabel 19).

Tabel 19 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2012 – 2016 (ton)

No	Kecamatan	Tahun					Kenaikan /Penurunan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Sumber Pucung	3.772,00	4.164,26	4.042,27	3.937,05	3.850,29	3,45
2	Kalipare	2.565,50	2.041,67	2.269,83	2.347,43	2.291,40	-10,68
3	Pagak	2.180,39	2.558,38	2.264,88	1.912,10	1.872,01	-14,14
4	Kromengan	650,60	797,17	1.148,89	1.412,02	1.464,73	125,14
5	Gedangan	430,97	493,25	1.433,10	1.297,42	1.815,46	321,25
6	Wajak	959,95	963,86	974,64	977,21	980,12	2,1
7	Tirtoyudo	323,18	403,50	925,00	862,59	726,42	124,77
8	Gondanglegi	479,31	430,50	508,90	522,17	530,31	10,64
9	Turen	272,80	280,68	504,41	581,66	588,72	115,8
10	Singosari	300,22	295,41	467,12	549,86	556,28	85,29
11	Donomulyo	360,70	362,37	460,20	456,80	449,15	24,52
12	Pagelaran	251,28	377,26	461,00	493,24	388,00	54,41
13	Wonosari	414,25	330,33	336,19	413,57	416,38	0,51
14	Pakisaji	71,82	250,68	427,29	506,12	511,87	612,7
15	Bululawang	244,39	250,68	347,81	359,12	364,40	49,1
16	Sbr. Manjingwetan	124,58	174,03	463,30	494,30	286,80	130,21
17	Ngantang	440,65	923,80	11,43	12,91	15,30	-96,53
18	Kepanjen	115,78	173,64	290,53	366,73	373,67	222,73
19	Jabung	144,89	174,26	240,53	276,62	277,38	91,45

20	Poncokusumo	166,40	200,38	216,78	249,10	251,40	51,08
21	Dampit	155,13	156,63	220,65	267,08	267	72,12
22	Ngajum	130,97	130,19	201,5	277,52	285,71	118,15
23	Pakis	133,92	133,72	186,38	243,22	250,76	87,25
24	Tumpang	71	130,87	149,62	283,78	286,75	303,87
25	Lawang	90,74	124,5	192,18	225,55	228,16	151,43
26	Dau	113,72	98,68	137,47	251,16	259,04	127,78
27	Bantur	94,88	120,38	141,7	163,2	163	71,79
28	Tajinan	52,67	72,18	144,86	202,6	206,7	292,42
29	Ampelgading	77,71	98,61	136,48	165,5	164,5	111,69
30	Wagir	21,75	37,69	84,22	195,55	261,37	1101,54
31	Kasembon	142,55	182,68	51,66	47,26	49,66	-65,16
32	Karangploso	45,93	68,6	85,54	105,58	109,8	139,04
33	Pujon	30,1	69,32	29,48	19,9	20	-33,55
JUMLAH		15.430,73	17.070,16	19.555,84	20.475,92	20.562,54	33,69

Potensi perikanan budidaya juga didukung oleh keberadaan pembudidaya yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang, baik pembudidaya tambak, kolam, minapadi, minamendong dan perairan umum. Tabel 20 menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 jumlah pembudidaya sebanyak 5.491, Sedangkan untuk kelompok Pembudidaya ikan yang telah teregistrasi sebanyak 168 kelompok.

Tabel 20 Jumlah Pembudidaya Ikan Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Budidaya	Tahun					Kenaikan / Penurunan (%)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2015-2016	2012-2016
1	Pembudidaya Kolam	2.383	2.683	3.176	3.285	3.295	0,3	38,27
2	Pembudidaya Jaring Sekat	3.240	3.240	2.807	2.288	2.000	-12,59	-38,27
3	Pembudidaya Mina Mendong	162	162	142	142	132	-7	-18,52
4	Pembudidaya Mina Padi	54	56	56	52	56	7,69	3,70
5	Pembudidaya Tambak	9	9	9	9	8	-11,11	-11,11
Jumlah		5.848	6.150	6.190	5.776	5.491	-4,93	-6,10

Survey Pola Nafkah

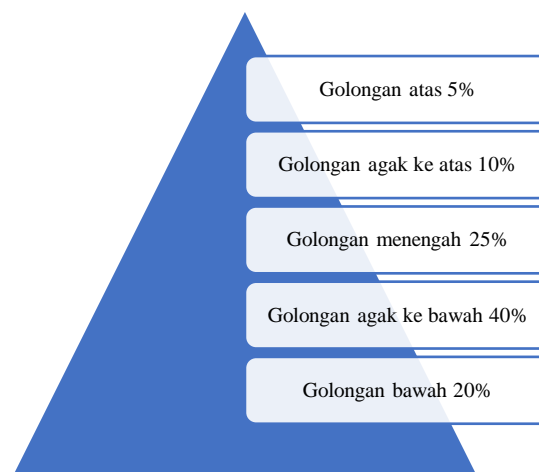
Survey ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa teknik-teknik partisipatoris untuk menggali informasi. Informasi mengenai kondisi ekonomi masyarakat digali dengan menggunakan teknik stratifikasi sosial dan pohon masalah. Untuk informasi mengenai kohesivitas dan kerentanan sosial, hanya dilakukan teknik diagram venn. Penggalan informasi tidak dapat dilakukan secara lengkap mengingat waktu pelaksanaan FGD yang cukup terbatas. Diskusi dilaksanakan di saung depan kolam milik kepala desa. Peserta yang hadir sebanyak 10 orang sesuai dengan rencana awal yang telah disusun. Peserta terdiri dari perwakilan perangkat Desa Blayu (kepala desa dan ketua ibu PKK), masyarakat

pembudidaya ikan baik yang mendapatkan bantuan maupun swadaya, juga perwakilan tokoh-tokoh pemuda. Pelaksanaan diskusi berjalan dengan kondusif, dan banyak informasi yang didapatkan.

Teknik pertama yang dilakukan adalah stratifikasi sosial. Dari penerapan teknik ini, dapat diketahui pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan masyarakat, dan kondisi ekonomi masyarakat Desa Blayu. Menurut peserta FGD yang hadir, terdapat lima kategori pengelompokan masyarakat berdasarkan kesejahteraannya, yaitu kategori bawah, agak ke bawah, menengah, agak ke atas dan atas. Seluruh peserta FGD menyepakati bahwa untuk menggolongkan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang digunakan yaitu jenis dan jumlah kendaraan yang dimiliki, pekerjaan utamanya, jumlah pekerjaan sampingan, luasan lahan pertanian, dan jumlah pegawai yang dimiliki.

Desa Blayu adalah salah satu wilayah desa yang berada di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Masyarakat di Desa Blayu mayoritas bekerja sebagai petani sayur-sayuran. Desa Blayu merupakan salah satu desa sasaran penerima bantuan pengentasan kemiskinan dari Provinsi Jawa Timur. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan dalam program tersebut adalah dengan memberikan bantuan modal usaha perikanan perairan darat, usaha yang diharapkan dapat menunjang bahkan menggantikan pekerjaan utama masyarakat yang kebanyakan adalah sebagai petani.

Masyarakat Desa Blayu secara umum berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonominya dapat dikategorikan menjadi lima kelompok, yaitu kelompok atas, agak ke atas, menengah, agak ke bawah dan bawah. Pengategorian tersebut berdasarkan beberapa indikator kesejahteraan menurut perwakilan masyarakat setempat (indikator lokal yang sesuai di Desa Blayu), yaitu jenis dan jumlah kendaraan yang dimiliki, pekerjaan utamanya, jumlah pekerjaan sampingan, luasan lahan pertanian, dan jumlah pegawai yang dimiliki atau jumlah pekerjaan yang mereka miliki. Berikut adalah gambaran persentase dan penjelasan setiap golongan masyarakat Desa Blayu berdasarkan indikator-indikator tersebut.



Gambar 9 Stratifikasi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Wajak, Desa Blayu

Masyarakat yang termasuk golongan atas adalah masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai pemilik usaha material. Usaha material memang dinilai dapat mendongkrak kondisi ekonomi pemilikinya, dan setiap warga yang memiliki usaha material pasti memiliki kekayaan di atas rata-rata. Selain usaha material, mereka juga memiliki lahan yang diusahakan untuk pertanian dengan luasan di atas 1 Ha. Kendaraan yang dimiliki adalah mobil sebanyak 4 unit bahkan lebih, untuk menunjang usaha materialnya. Mereka juga memiliki lebih dari 10 pegawai. Di Desa Blayu, masyarakat yang termasuk golongan atas terdapat sebanyak 5%, dari total 100% warga masyarakat Desa Blayu.

Pekerjaan masyarakat yang termasuk golongan agak ke atas rata-rata adalah PNS ataupun petani pemilik lahan. Lahan yang mereka miliki ada pada kisaran 0,5-1 Ha. Kendaraan yang mereka miliki adalah mobil 1-3 unit. Mereka juga mempekerjakan 3-5 pegawai. Berdasarkan indikator ini, terdapat 20% masyarakat yang termasuk golongan agak ke atas.

Masyarakat golongan menengah menurut pandangan peserta FGD biasanya bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan. Kendaraan yang mereka miliki hanya motor lebih dari 1 unit. Usaha yang mereka jalankan, biasanya mempekerjakan 1-3 orang pegawai. Mereka juga memiliki lahan paling banyak 0,25 Ha. Masyarakat yang termasuk golongan menengah di Desa Blayu adalah sebanyak 35%.

Dari segi pekerjaan, masyarakat yang termasuk golongan agak ke bawah rata-rata memiliki pekerjaan sebagai buruh tani, buruh bangunan, buruh cuci, ataupun tukang ojeg. Mereka kebanyakan hanya memiliki kendaraan roda dua sebanyak 1 unit. Luasan lahan yang dimiliki kurang lebih sama dengan golongan menengah, yaitu maksimal 0,25 Ha. Berbeda dengan golongan atas, agak ke atas dan menengah, masyarakat golongan agak ke bawah tidak memiliki pegawai, namun memiliki beberapa pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rata-rata pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang adalah 3-4 pekerjaan. Terdapat sebanyak 30% masyarakat yang termasuk dalam golongan ini.

Pada golongan masyarakat bawah, mereka sama sekali tidak memiliki kendaraan bermotor. Pekerjaan yang mereka miliki tidak tetap (serabutan). Mereka juga tidak memiliki lahan pertanian. Pekerjaan yang mereka miliki paling banyak 2 jenis. Sebanyak 10% masyarakat Desa Blayu termasuk dalam golongan bawah.

Di Desa Blayu, masyarakat pemilik usaha perikanan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat yang mengawali usaha karena mendapatkan bantuan usaha dari pemerintah. Kelompok kedua adalah masyarakat yang memang menyukai usaha perikanan. Bagi kelompok masyarakat yang menyukai usaha perikanan, ada pula yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan ada pula yang tidak mendapatkan bantuan. Biasanya, masyarakat yang memang menyukai budidaya perikanan tidak tergabung dalam kelompok, dan hanya berusaha dengan modal pribadi. Mereka pun selalu mencoba memulai dari awal walaupun usaha perikanan darat mereka banyak mengalami kegagalan.

Kegagalan usaha perikanan dialami oleh kedua kelompok, baik kelompok penerima bantuan maupun masyarakat yang memiliki minat yang tinggi pada usaha perikanan. Penyebab kegagalan usaha termasuk kompleks, dan menyangkut seluruh tahapan usaha dari persiapan modal hingga pemasaran. Permasalahan-permasalahan tersebut dijelaskan secara singkat dalam matriks permasalahan pengusaha perikanan di Desa Blayu berikut (Tabel 21).

Tabel 21 Permasalahan, akar masalah dan dampak masalah yang dialami pembudidaya ikan di Desa Blayu

No	Masalah	Akar masalah	Dampak masalah
1	Kurang modal	Penghasilan terbatas	
2	Kurang kemampuan manajemen	Susahnya akses informasi	
3	Kesulitan pemasaran hasil	Harga tengkulak rendah, pasar tradisional tidak mampu menampung hasil panen pengusaha di Desa Blayu	
4	Harga pakan mahal	Harga pakan pabrikan yang berkualitas memang mahal, jika memilih yang murah pertumbuhan ikan kurang baik	Usaha sulit berkembang dan gagal
5	Tingkat pengetahuan budidaya rendah	Susahnya akses informasi	
6	Kurangnya lahan	Tidak mendapatkan warisan, penghasilan terbatas	

Para pembudidaya ikan mengaku bahwa permasalahan-permasalahan tersebut membuat mereka kesulitan mengembangkan usahanya. Harga pakan yang mahal, dengan biaya perawatan lainnya yang cukup besar, sedangkan harga jual hasil panen dari tengkulak rendah, menyebabkan keuntungan yang mereka dapat tidaklah besar, bahkan seringkali merugi. Tengkulak yang membeli produksi ikan di Desa Blayu datang dari luar desa. Mereka mampu menampung hasil produksi ikan, namun para tengkulak itu juga yang menentukan harga. Para pembudidaya tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan seluruhnya kepada tengkulak, karena tidak ada pasar lain yang mampu menampung hasil produksi ikan tersebut.

Selain keterbatasan modal dan pasar, mereka juga minim akan pengetahuan mendalam mengenai budidaya ikan. Bahkan, ada seorang pembudidaya yang selalu mengalami kegagalan dalam mengembangkan usahanya. Sudah berkali-kali beliau berusaha namun hasil yang didapatkan selalu minim. Mereka pun masih bingung dalam mengelola keuangan usaha mereka agar tetap dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan.

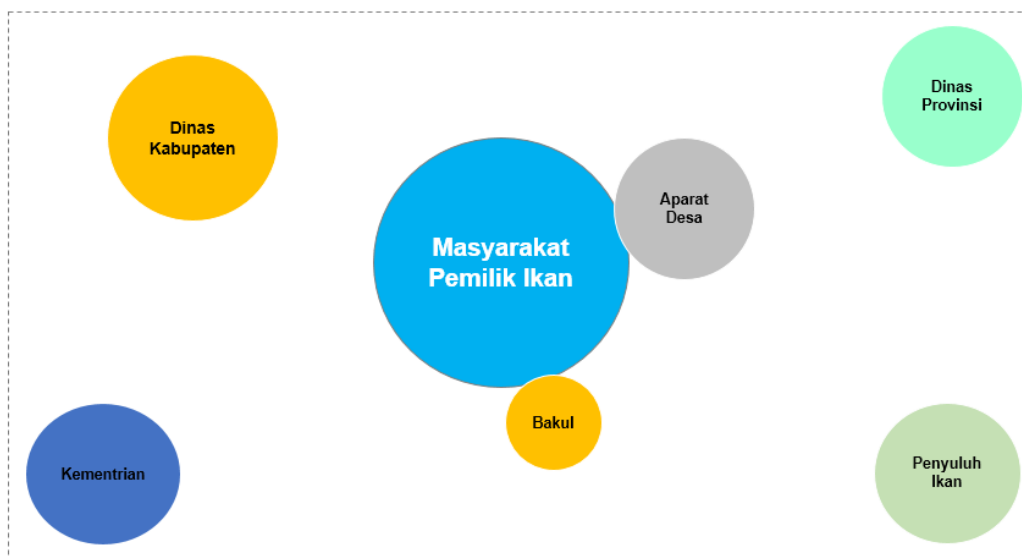
Menurut Kepala Desa, Pak Arif, pada dasarnya Desa Blayu masih membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk pengembangan usaha perikanan. Namun, seringkali bantuan-bantuan tersebut turun kepada masyarakat tanpa koordinasi dengan pihak desa, sehingga bantuan terkadang tidak tepat sasaran. Pak Arif merasa koordinasi dengan pihak desa sebelum bantuan diturunkan kepada masyarakatnya perlu, karena pihak desa sudah mengetahui dengan baik karakteristik masyarakat di Desa Blayu. Tidak ada niat lain selain membantu masyarakat agar lebih maju.

Jika ditelusuri dari aktor-aktor yang dapat menunjang keberhasilan usaha perikanan, dapat diketahui bahwa terdapat aktor-aktor yang dianggap penting bagi pengembangan usaha perikanan perairan darat. Aktor-aktor tersebut adalah pemerintah desa, dinas provinsi, penyuluh perikanan, akademisi, bakul (tengkulak), dinas kabupaten dan kementerian perikanan. Setelah dianalisis berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kedekatan setiap aktor terhadap usaha perikanan masyarakat, dapat diketahui bahwa

sebagian dari mereka masih tergolong jauh dari masyarakat, padahal aktor-aktor tersebut sangatlah penting bagi masyarakat. Berikut adalah matriks yang menggambarkan tingkat kepentingan dan tingkat kedekatan setiap aktor (Tabel 22).

Tabel 22 Tingkat kepentingan dan kedekatan aktor terhadap masyarakat pembudidaya ikan di Desa Blayu

No	Aktor	Tingkat kepentingan	Tingkat kedekatan
1	Pemerintah desa	Penting	Dekat
2	Dinas provinsi	Penting	Jauh
3	Penyuluh perikanan	Penting	Sedang
4	Akademisi	Penting	Jauh
5	Bakul (tengkulak)	Kurang penting	Dekat
6	Dinas kabupaten	Penting	Sedang
7	Kementerian perikanan	Penting	Jauh



Gambar 10 Diagram venn terkait kelembagaan dan aktor yang berpengaruh

Pada Tabel 22, dapat diketahui bahwa aktor yang penting dan dekat dengan masyarakat hanyalah pemerintah desa. Aktor yang perlu disoroti dalam diagram venn ini adalah bakul atau tengkulak. Walaupun pada dasarnya para pembudidaya menganggap bahwa bakul itu penting, namun perasaan penting tersebut muncul karena keterpaksaan. Pada dasarnya, mereka tidak ingin menjual hasil panennya dengan harga yang rendah. Namun, hanya para bakul yang mampu menerima seluruh hasil produksinya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bakul dianggap kurang penting bagi masyarakat, karena kualitas penting muncul karena keterpaksaan.

Akademisi, dinas provinsi dan kementerian perikanan dirasa penting dalam menunjang pengembangan usaha, namun ternyata masih sulit untuk dijangkau oleh masyarakat pembudidaya. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan manajemen, mungkin dapat ditunjang dengan adanya kehadiran akademisi. Hingga saat ini, baru ada dua universitas yang menyentuh ranah perikanan, yaitu universitas di lingkungan Malang dan IPB.

Penyuluh perikanan dan dinas kabupaten sudah cukup dekat dengan masyarakat pembudidaya. Setidaknya, mereka sering menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Begitu

juga dengan penyuluh yang seringkali berkunjung untuk mengontrol pengembangan usaha perikanan di Desa Blayu.

Secara umum, masyarakat Desa Blayu masih tergolong kategori masyarakat menengah ke bawah berdasarkan tingkat ekonominya. Namun, perlu ditelusuri seperti apakah kondisi perekonomian rumah tangga jika ditelaah dari sumber penghasilan terbesar dan pengeluaran terbesar. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui seperti apa konsentrasi mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat Desa Blayu. Selain untuk mengetahui gambaran mata pencaharian, perlu juga untuk mengetahui seberapa penting budidaya perikanan berperan sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat Desa Blayu hingga saat ini. Berikut adalah pembahasannya.

Tabel 23 Persentase masyarakat pemilik usaha budidaya ikan di Desa Blayu menurut sumber penghasilan terbesar

No	Sumber penghasilan terbesar	Persentase (%)
1	Non pertanian	73,3
2	Pertanian	6,7
3	Perikanan	6,7
4	Peternakan	6,7
5	<i>Off farm</i>	6,7
	Total	100

Berdasarkan tabel 23, dapat diketahui bahwa pekerjaan utama masyarakat Desa Blayu adalah di bidang non pertanian. Pekerjaan utama dilihat dari persentase penghasilan terbanyak yang diperoleh oleh setiap rumah tangga. Mereka rata-rata memperoleh penghasilan terbanyak dari pekerjaan selain pertanian, seperti menjadi buruh tani, wiraswasta, supir, atau pegawai negeri maupun honor. Hanya 6,7 % masyarakat yang memperoleh penghasilan utama dari sektor perikanan. Hal ini memperkuat hasil temuan informasi dari wawancara bahwa di Desa Blayu, masyarakat belum menjadikan perikanan sebagai sektor utama penghasilan, hanya sebagai sampingan atau untuk kesenangan.

Tabel 24 Persentase masyarakat pemilik usaha budidaya ikan di Desa Blayu menurut pengeluaran yang paling dominan dan kedua paling dominan

No	Pengeluaran	Pengeluaran dominan (%)	Pengeluaran kedua paling dominan (%)
1	Pangan	60,0	13,3
2	Energi	6,7	6,7
3	Usaha Tani	26,7	13,3
4	Usaha Ternak	0,0	6,7
5	Usaha Perikanan	0,0	13,3
6	Pendidikan	6,7	13,3
7	Kesehatan	0,0	6,7
8	Lainnya	0,0	26,7
	Total	100	100

Berdasarkan tabel 24, dapat diketahui bahwa pangan menjadi pengeluaran yang paling besar bagi masyarakat pemilik usaha budidaya ikan di Desa Blayu. Kebutuhan untuk pangan lebih besar jika dibandingkan dengan kategori pengeluaran lainnya. Setelah pangan, modal untuk usaha tani juga menjadi pengeluaran yang paling besar bagi masyarakat Desa Blayu pemilik usaha budidaya ikan sebesar 26,7%. Tidak ada di antara

mereka yang memiliki pengeluaran terbesar untuk usaha perikanan. Perlu juga untuk ditelaah pengeluaran terbesar kedua, untuk melihat ragam gambaran kebutuhan terbesar selain pangan. Ternyata, banyak di antara mereka yang menggunakan penghasilannya untuk usaha tani, perikanan dan pendidikan. Namun, paling banyak adalah untuk pengeluaran lainnya, terutama rokok.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum menjadikan perikanan sebagai sektor perekonomian yang menunjang sebagai mata pencaharian utama. Hal tersebut diperkuat dari data yang menunjukkan bahwa pemasukan masyarakat paling banyak adalah dari sektor non pertanian (paling banyak menjadi buruh tani), dan pengeluaran terbesar adalah pangan. Pangan paling banyak menjadi pengeluaran dominan rumah tangga pemilik usaha perikanan, karena mereka juga banyak menjadi buruh tani. Mereka tidak perlu begitu banyak menanamkan modal ke dalam usahanya, karena penghasilan mereka yang paling besar berasal dari buruh. Berdasarkan hasil survey, dapat dipastikan hampir seluruh responden tidak memiliki tabungan rumah tangga. Penghasilan yang mereka dapatkan, seluruhnya digunakan sebagian besar untuk pangan. Ini juga merupakan salah satu ciri-ciri dari masyarakat golongan bawah, yang menggunakan sebagian besar pemasukannya hanya untuk pangan.

Mekanisme adaptasi rumah tangga yang dilihat dalam penelitian ini adalah berbagai cara yang masyarakat gunakan untuk bertahan hidup dari berbagai kondisi yang dialami. Hal tersebut, dilihat dari seberapa besar ketersediaan, tingkat kemudahan akses dan intensitas penggunaan berbagai sumber daya yang dapat menunjang kehidupan, yaitu sumber daya alam, fisik, sumber daya manusia, finansial dan sosial. Kelemahan dari data yang disajikan ini adalah penentuan ketersediaan, kemudahan akses, dan intensitas penggunaan sumber daya tidak menggunakan indikator pasti untuk setiap responden, namun menggunakan sudut pandang pribadi setiap responden. Berikut adalah tabel ketersediaan modal sumber daya di Desa Blayu.

Tabel 25 Persentase ketersediaan modal sumber daya berdasarkan persepsi masyarakat pemilik usaha budidaya perikanan di Desa Blayu

Modal	Sumber daya	Tidak tersedia (%)	Kurang tersedia (%)	Cukup tersedia (%)	Tersedia (%)	Sangat tersedia (%)	Total (%)
Alam	Sungai	0	13,3	13,3	53,3	20,0	100
	Lahan kebun	60,0	6,7	0	33,3	0	100
	Kolam	6,7	0	13,3	80,0	0	100
Fisik	Listrik	0	0	0	86,7	13,3	100
	Air	0	0	0	93,3	6,7	100
	Jalan	0	0	13,3	73,4	13,3	100
	Ternak	33,3	0	6,7	60,0	0	100
	Kendaraan pribadi	20,0	6,7	0	73,3	0	100
Sumber daya manusia	Pelatihan keterampilan	0	20,0	46,7	33,3	0	100
	Penyuluhan	0	20,0	40,0	40,0	0	100
	Keterampilan lain	73,3	0	0	26,7	0	100
Finansial	Bank	13,3	13,3	20,0	53,3	0	100
	Koperasi	0	0	6,7	86,7	6,7	100
	Lembaga keuangan mikro	20,0	0	13,3	66,7	0	100
	Tabungan rumah tangga	66,7	6,7	0	26,7	0	100
Sosial	Lembaga agama	26,7	0	13,3	46,7	13,3	100
	Kelompok tani	0	0	20,0	66,7	13,3	100
	Kelompok	13,3	0	13,3	60,0	13,3	100

keagamaan							
Kelompok pengelola air	13,3	6,7	6,7	66,7	6,7	100	
ASKES	66,7	0	0	33,3	0	100	
BPJS	60,0	0	0	40,0	0	100	
KIS	86,7	0	0	13,3	0	100	

Berdasarkan data yang disajikan di tabel 25, dapat diketahui bahwa untuk sumber daya sungai dan kolam ikan tersedia bagi masyarakat pembudidaya ikan. Dari seluruh sumber daya alam yang ditanyakan, hanya lahan kebun saja yang sebagian besar tidak tersedia bagi mereka. Hal ini menunjukkan, untuk usaha perikanan dari segi sungai dan kolam ketersediaannya sudah menunjang. Untuk sumber daya fisik seperti listrik, air, jalan, ternak dan kendaraan pribadi, hampir seluruhnya mengakui bahwa seluruh sumber daya telah tersedia di lingkungan desa mereka. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan penunjang sumber daya manusia seperti pelatihan keterampilan dan penyuluhan secara umum sudah tersedia bagi masyarakat dengan tingkat menengah. Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan banyaknya keterampilan lainnya yang dapat menunjang penghasilan ekonomi masyarakat. Masyarakat Desa Blayu yang membudidaya ikan mengaku mereka tidak memiliki keterampilan tambahan yang dapat menunjang pendapatan mereka.

Selanjutnya, ketersediaan bank, koperasi, dan lembaga keuangan mikro di lingkungan Desa Blayu dapat dikatakan sudah cukup tersedia. Namun, hal tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan tabungan rumah tangga. Banyak diantara mereka yang menganggap bahwa tabungan rumah tangga tidak penting, atau mereka tidak dapat menyisihkan sebagian penghasilan yang mereka dapat untuk ditabung. Untuk modal sosial, secara keseluruhan berbagai kelompok penunjang mata pencaharian dianggap telah tersedia oleh sebagian besar masyarakat, begitu juga dengan kelompok pengelola air yang sangat dirasakan manfaatnya. Berbeda halnya dengan asuransi kesehatan. Untuk modal sosial asuransi kesehatan seperti ASKES, BPJS dan KIS, banyak sekali masyarakat yang tidak memilikinya. Sebagian dari mereka tidak memprioritaskan diri dan keluarga mereka untuk memiliki asuransi kesehatan, bahkan mereka merasa sakit bukanlah hal yang diharapkan, sehingga tidak perlu untuk mempersiapkan solusi mengobati sakit.

Tabel 26 Persentase tingkat kemudahan akses modal sumber daya berdasarkan persepsi masyarakat pemilik usaha budidaya perikanan di Desa Blayu

Modal	Sumber daya	Sangat sulit (%)	Sulit (%)	Cukup mudah (%)	Mudah (%)	Sangat mudah (%)	Total (%)
Sumber daya alam	Sungai	0	0	0	73,3	26,7	100
	Lahan kebun	66,7	0	0	33,3	0	100
	Kolam	6,7	0	0	86,6	6,7	100
Fisik	Listrik	0	0	0	73,3	26,7	100
	Air	0	0	13,3	66,7	20,0	100
	Jalan	0	0	6,7	80,0	13,3	100
	Ternak	0	46,7	0	46,7	6,7	100
	Kendaraan pribadi	20,0	0	0	60	20,0	100
Sumber daya manusia	Pelatihan keterampilan	33,3	20,0	6,7	40,0	0	100
	Penyuluhan	0	46,7	6,7	46,7	0	100
	Keterampilan lain	80,0	0	13,3	6,7	0	100
Finansial	Bank	13,3	40,0	13,3	33,3	0	100
	Koperasi	13,3	20,0	53,4	13,3	0	100
	Lembaga keuangan mikro	0	0	73,3	26,7	0	100
	Tabungan rumah tangga	13,3	60,0	6,7	6,7	13,3	100

Modal	Sumber daya	Sangat sulit (%)	Sulit (%)	Cukup mudah (%)	Mudah (%)	Sangat mudah (%)	Total (%)
Sosial	Lembaga agama	0	0	46,7	33,3	20,0	100
	Kelompok tani	0	20,0	40,0	33,3	6,7	100
	Kelompok keagamaan	0	0	60,0	26,7	13,3	100
	Kelompok pengelola air	7,1	0	64,3	28,6	0	100
	ASKES	53,3	6,7	6,7	33,3	0	100
	BPJS	60,0	6,7	6,7	26,7	0	100
	KIS	66,7	6,7	6,7	20,0	0	100

Secara umum, berdasarkan Tabel 26, dapat dikatakan bahwa ketika sumber daya dianggap tersedia di lingkungan masyarakat, maka akan mudah bagi mereka untuk mengakses sumber daya tersebut. Begitu juga berlaku sebaliknya. Jika dibandingkan antara persentase ketersediaan sumber daya dan persentase tingkat kemudahan penggunaan sumber daya yang paling besar, hampir seluruh sumber daya memiliki nilai persentase yang sesuai. Jika persen ketersediaan sumber daya besar, persentase kemudahan penggunaan sumber daya juga akan besar. Namun, untuk beberapa sumber daya terdapat perbedaan yang cukup mencolok di antara keduanya. Sumber daya tersebut adalah sumber daya ternak, pelatihan keterampilan dan penyuluhan, serta bank.

Rata-rata masyarakat pemilik budidaya ikan memiliki ternak, namun tidak seluruhnya merasa ternak mudah diakses untuk menunjang ekonomi. Sebagian merasa mereka mudah untuk menjual ternaknya secara teratur atau disaat membutuhkan, namun sebagian lainnya merasa bahwa menjual ternak merupakan tugas yang cukup sulit. Biasanya, ternak yang sulit dijual seperti sapi, kambing, dengan jumlah ekor yang tidak banyak (skala kecil), sedangkan ternak yang perputarannya cepat seperti ayam potong (skala besar) lebih mudah untuk dijual.

Untuk pelatihan keterampilan dan penyuluhan, masyarakat mengetahui bahwa kegiatan itu tersedia bagi mereka. Namun, tingkat kemudahannya untuk mengikuti tidak begitu banyak dipersepsikan mudah bagi masyarakat. Mereka terkadang merasa sulit, dan kegiatan-kegiatan pelatihan tersebut tidak membuka sistem pendaftaran, namun mengundang peserta sasaran yang memiliki potensi mengikuti pelatihan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat lain yang tidak diundang tidak dapat mendapatkan informasi, wawasan dan ilmu baru dari pelatihan tersebut. Terakhir, bank dianggap ada oleh sebagian masyarakat. Namun, tidak seluruh masyarakat menganggap mengakses bank itu mudah. Banyak proses yang menurut mereka sulit untuk diikuti sehingga mereka lebih menganggap koperasi ataupun lembaga keuangan mikro ada di antara mereka.

Tabel 27 Persentase tingkat penggunaan modal sumber daya berdasarkan persepsi masyarakat pemilik usaha budidaya perikanan di Desa Blayu

Modal	Sumber daya	Tidak pernah (%)	Jarang (%)	Kadang-kadang (%)	Sering (%)	Sangat sering (%)	Total (%)
Sumber daya alam	Sungai	0	0	6,7	66,6	26,7	100
	Lahan kebun	60,0	0	0	40,0	0	100
	Kolam	0	6,7	0	86,7	6,7	100
Fisik	Listrik	0	0	0	66,7	33,3	100
	Air	0	0	13,3	60,0	26,7	100
	Jalan	0	0	6,7	73,3	20,0	100
	Ternak	26,7	6,7	6,7	53,3	6,7	100
	Kendaraan pribadi	40,0	0	0	40,0	20,0	100
Sumber daya manusia	Pelatihan keterampilan	13,3	33,3	6,7	46,7	0	100

Modal	Sumber daya	Tidak pernah (%)	Jarang (%)	Kadang-kadang (%)	Sering (%)	Sangat sering (%)	Total (%)
	Penyuluhan	0	33,3	6,7	60,0	0	100
	Keterampilan lain	93,3	0	0	6,7	0	100
Finansial	Bank	46,6	6,7	13,3	33,3	0	100
	Koperasi	53,3	20,0	6,7	20,0	0	100
	Lembaga keuangan mikro	66,7	0	6,7	26,7	0	100
	Tabungan rumah tangga	66,6	0	6,7	13,3	13,3	100
Sosial	Lembaga agama	20,0	20,0	0	40,0	20,0	100
	Kelompok tani	0	26,7	26,7	40,0	6,7	100
	Kelompok keagamaan	0	0	53,4	33,3	13,3	100
	Kelompok pengelola air	6,7	0	53,3	40,0	0	100
	ASKES	46,7	6,7	6,7	40,0	0	100
	BPJS	53,3	6,7	13,3	26,7	0	100
	KIS	60,0	6,7	6,7	26,7	0	100

Pada tabel 23, dapat diketahui terdapat beberapa sumber daya yang dianggap tersedia dan mudah digunakan, namun pada kenyataannya jarang bahkan tidak pernah diakses oleh sebagian besar masyarakat. Sumber daya tersebut adalah kendaraan pribadi, koperasi, dan lembaga keuangan mikro. Untuk kendaraan pribadi, mereka tidak menganggap bahwa kendaraan pribadi dapat menunjang penghasilan rumah tangga. Mereka hanya menggunakan kendaraan untuk kepentingan-kepentingan lain di luar aktivitas mencari nafkah. Selain itu, masyarakat lebih memilih untuk tidak berurusan atau menghindari transaksi dengan koperasi atau lembaga keuangan mikro. Mereka lebih percaya untuk meminta pertolongan kepada saudara atau tetangga yang telah mengenalnya.

Selain di Desa Blayu, masyarakat yang paling banyak membudidaya perikanan darat terdapat pula di Desa Kidangbang. Bahkan, dapat dikatakan di Desa Kidangbang masyarakatnya benar-benar menjadikan usaha perikanan sebagai penyumbang penghasilan rumah tangga yang cukup besar, jika dibandingkan dengan Desa Blayu. Sebanyak kurang lebih 50 persen warga di Desa Kidangbang telah melakukan budidaya perikanan. Jarak Desa Kidangbang dengan Desa Blayu kurang lebih 6 km.

Untuk di Desa Blayu sendiri, masyarakat yang membudidaya ikan bukanlah dari keinginan sendiri, melainkan mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Mereka yang mendapat bantuan usaha ikan darat termasuk sebagai masyarakat kurang mampu, dan mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan melalui usaha perikanan. Rata-rata mereka baru memulai usaha tersebut.

Jika dilihat dari riwayat desa-desa yang mendapatkan bantuan Minapolitan, desa-desa yang memiliki fokus pengembangan perikanan selain Desa Blayu adalah Desa Codo dan Desa Patokpicis. Jika dibandingkan antara ketiga desa tersebut, Desa Codo merupakan desa yang paling baik usaha perikananannya, karena berdasarkan pengalaman, orang-orang banyak mencari dan membeli bibit ikan di Desa Codo. Namun, jika dilihat dari data administrasi kabupaten, desa yang seringkali mendapatkan bantuan usaha perikanan (asumsi: desa tersebut memang memiliki potensi perikanan yang baik) adalah Desa Patokpicis. Kondisi yang berbeda dimiliki oleh Desa Blayu. Masyarakat Desa Codo dan Desa Patokpicis menjadikan usaha perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama, sedangkan di Desa Blayu masyarakat baru menjadikan usaha perikanan sebagai sampingan.

Masyarakat Desa Blayu mayoritas adalah petani. Mereka banyak membudidayakan sayur-sayuran. Namun, kondisi perekonomian masyarakat cenderung miskin, sehingga Program APP sedang berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan perikanan, yang tergolong di luar kebiasaan masyarakat. Konsep Minapolitan pun dirancang untuk dilaksanakan di Desa Blayu atas dasar kondisi tersebut.

Untuk membangun suatu kawasan perdesaan di bidang perikanan, desa-desa tersebut dapat dihimpun dan diajak untuk kerja sama. Walaupun secara geografis jarak antar desa cukup jauh, namun kerja sama di bidang perikanan dapat dimungkinkan. Dapat disimpulkan, desa-desa yang dapat dihimpun dan diajak untuk membangun kerja sama adalah Desa Blayu, Desa Codo, Desa Patokpilis dan Desa Kidangbang.

Model Pembentukan Budidaya Perikanan

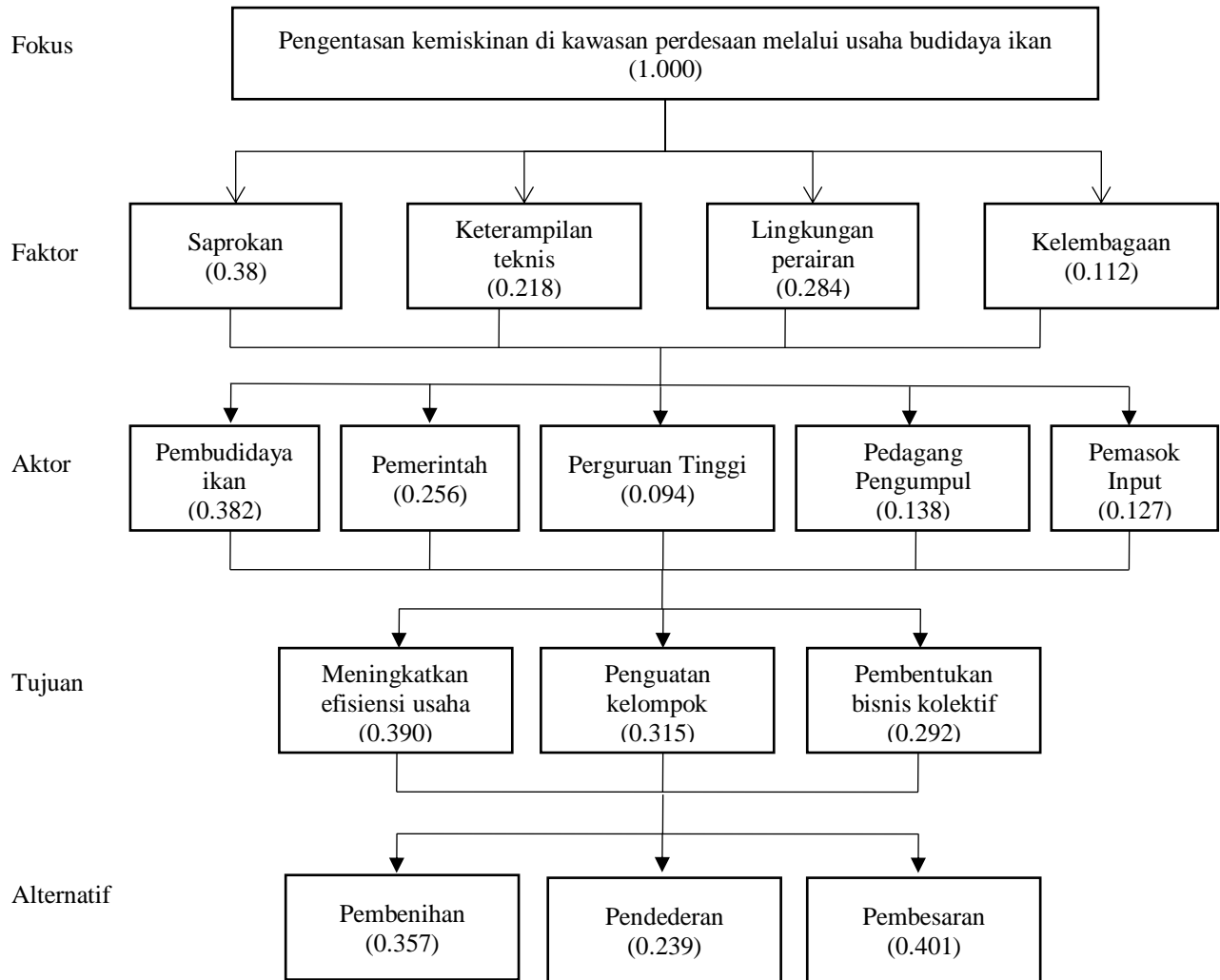
Sebagian desa-desa yang ada di Kabupaten Malang termasuk ke dalam desa yang dihuni oleh penduduk yang termasuk dalam kelompok penduduk miskin. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan di kabupaten ini dilakukan dengan melakukan pengembangan usaha budidaya perikanan. Hal ini dilakukan di Kecamatan Wajak melalui Program APP (*Anti Poverty Programme*) atau program anti kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pengembangan usaha budidaya perikanan melalui APP di Kabupaten Malang memiliki tujuan untuk melakukan pengentasan kemiskinan diantara melalui pengembangan usaha budidaya perikanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pengembangan usaha budidaya perikanan dibagi menjadi 4 faktor yaitu:

- a) Saprokan (sarana produksi perikanan) adalah semua hal atau unsur yang dibutuhkan atau dengan kata lain disebut juga bahan baku dalam pengelolaan produksi perikanan, termasuk bibit, pakan, dan obat-obatan ternak.
- b) Keterampilan teknis adalah kecakapan atau kemampuan yang dimiliki oleh pembudidaya ikan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan di dalam suatu organisasi.
- c) Lingkungan perairan adalah kondisi lingkungan perairan dimana kegiatan budidaya ikan dilakukan yang dapat mempengaruhi proses pemeliharaan ikan mulai dari persiapan hingga panen.
- d) Kelembagaan adalah suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang dan lembaga untuk tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur.

Kebijakan pengentasan kemiskinan untuk pelaku usaha budidaya perikanan melalui Program APP dianalisis dengan menggunakan analisis hierarki proses (AHP). Hierarki dibuat dengan menggunakan 5 tingkat yaitu: tingkat pertama yaitu fokus yang merupakan tujuan utama yaitu pengentasan kemiskinan di perdesaan melalui usaha budidaya perikanan; tingkat kedua faktor yang mempengaruhi usaha budidaya perikanan sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi upaya pengentasan kemiskinan; tingkat ketiga aktor yang terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan yang mencakup pembudidaya ikan, pemerintah, perguruan tinggi, pedagang pengumpul dan pemasok input produksi perikanan; tingkat keempat yaitu tujuan yang ingin dicapai untuk pengentasan kemiskinan; dan tingkat kelima yaitu alternatif kebijakan untuk mencapai upaya pengentasan kemiskinan.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software expert choice*. Hasil pengolahan AHP kebijakan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya perikanan di Kabupaten Malang disajikan pada Gambar 11.



Gambar 11 Struktur AHP Bidang Peternakan dan Bobot Prioritas

Perumusan strategi yang akan ditawarkan melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) pada Bidang Perikanan di Kabupaten Malang melibatkan 20 orang responden yang terdiri dari pemangku kepentingan bidang perikanan antara lain Pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Benih Ikan (BBI) dan Penyuluh, Pelaku Usaha antara lain Pembudidaya Pembesaran, Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Pedagang Ikan dan Pemasok Pakan.

Berdasarkan pengolahan data kuisisioner AHP menggunakan aplikasi *expert choice*, analisis tujuan diperoleh urutan sebagai berikut: meningkatkan efisiensi usaha (0.390), penguatan kelompok (0.315) dan pembentukan bisnis kolektif (0.292). Alternatif kebijakan diperoleh urutan sebagai berikut: pembesaran (0.401), pembenihan (0.357) dan pendederan (0.239).

1. Hasil Pengolahan Elemen Faktor

Berdasarkan hasil pengolahan diketahui bahwa faktor sarana produksi perikanan menempati urutan pertama prioritas dengan bobot 0.385, faktor lingkungan perairan menempati urutan kedua, keterampilan teknis ketiga dan keempat faktor kelembagaan. Hasil analisis AHP untuk analisis elemen faktor disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28 Analisis bobot faktor

Faktor	Bobot
Sarana produksi perikanan	0.385
Keterampilan teknis	0.218
Lingkungan perairan	0.284
Kelembagaan	0.112

Ketersediaan sarana produksi perikanan merupakan faktor yang harus ada untuk memulai usaha budidaya perikanan. Sarana produksi perikanan yang meliputi kolam atau wadah budidaya, peralatan produksi dan lainnya merupakan syarat mutlak yang harus tersedia. Faktor kelembagaan memiliki nilai terendah diduga karena belum adanya lembaga pembudidaya yang memiliki peran yang kuat dalam usaha perikanan di daerah ini.

2. Hasil Pengolahan Elemen Aktor

Dari hasil analisis elemen aktor diperoleh urutan nilai sebagai berikut: pembudidaya ikan (0.382), pemerintah (0.256), pedagang pengumpul (0.139), pemasok input (0.127), dan perguruan tinggi (0.094). Secara lengkap nilai analisis elemen aktor terhadap faktor disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29 Analisis bobot analisis elemen aktor terhadap faktor

Aktor	Terhadap faktor				Bobot faktor	Bobot aktor
	Saprokan	Keterampilan teknis	Lingkungan perairan	Kelembagaan		
Pembudidaya Ikan	0.336	0.456	0.400	0.357	0.385	0.382
Pemerintah	0.221	0.237	0.267	0.390	0.218	0.256
Perguruan Tinggi	0.060	0.117	0.121	0.102	0.284	0.094
Pedagang Pengumpul	0.216	0.091	0.096	0.075	0.112	0.139
Pemasok Input	0.167	0.098	0.116	0.077		0.127

Analisis Aktor terhadap faktor menunjukkan hasil bahwa pembudidaya ikan lebih prioritas dibandingkan dengan aktor lainnya dengan bobot 0.382. Para pembudidaya ikan melihat bahwa hampir seluruh faktor, yang mencakup sarana produksi perikanan, keterampilan teknis, lingkungan perairan dan kelembagaan merupakan faktor yang penting sehingga mereka memberi bobot yang tinggi terhadap keempat faktor tersebut.

Perguruan tinggi memiliki bobot yang terendah terhadap elemen faktor yaitu 0.094. Hal ini diduga karena masih minimnya peran dan keterlibatan perguruan tinggi yang ada di kawasan Kabupaten Malang dan Kota Malang dalam pengembangan usaha budidaya perikanan. Berdasar informasi dari pelaku usaha budidaya perikanan diketahui bahwa memang ada keterlibatan dan peran beberapa perguruan tinggi dalam diseminasi teknologi dan informasi budidaya, namun intensitasnya dirasakan relatif rendah.

3. Hasil Pengolahan Elemen Tujuan

Dari hasil analisis elemen tujuan terhadap aktor menunjukkan hasil bahwa efisiensi usaha merupakan tujuan prioritas pertama dibandingkan dengan tujuan lainnya dengan bobot 0.391. Tujuan prioritas kedua yaitu penguatan kelompok (0.315) dan prioritas ketiga yaitu penguatan bisnis kolektif (0.292). Secara lengkap nilai analisis elemen tujuan terhadap aktor disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30 Analisis bobot elemen tujuan terhadap elemen aktor

Tujuan	Terhadap aktor					Bobot Aktor	Bobot Tujuan
	Pembudidaya Ikan	Pemerintah	Perguruan Tinggi	Pedagang Pengumpul	Pemasok Input		
Efisiensi usaha	0,496	0,255	0,547	0,305	0,330	0,382	0,391
Penguatan kelompok	0,254	0,541	0,210	0,202	0,250	0,256	0,315
Bisnis kolektif	0,250	0,204	0,242	0,493	0,419	0,094	0,292

Efisiensi usaha merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan usaha. Jika efisiensi usaha bagus maka tingkat pendapatan akan relatif lebih tinggi. Oleh karena efisiensi usaha merupakan tujuan prioritas pertama dibanding dengan kedua tujuan lainnya yaitu penguatan kelompok dan bisnis kolektif.

4. Hasil Pengolahan Elemen Alternatif Kebijakan

Dari hasil analisis elemen alternatif terhadap tujuan menunjukkan hasil bahwa usaha pembesaran merupakan alternatif kebijakan prioritas dibandingkan dengan alternatif lainnya dengan bobot 0,402. Alternatif kebijakan kedua yaitu usaha pembenihan (0,357) dan ketiga usaha pendederan (0,239). Secara lengkap nilai analisis elemen alternatif kebijakan terhadap tujuan disajikan pada Tabel 31.

Tabel 31 Analisis bobot elemen alternatif terhadap tujuan

Alternatif	Terhadap tujuan			Bobot tujuan	Bobot alternatif
	Efisiensi usaha	Penguatan kelompok	Bisnis kolektif		
Pembenihan	0,396	0,446	0,212	0,391	0,357
Pendederan	0,293	0,165	0,249	0,315	0,239
Pembesaran	0,311	0,389	0,539	0,292	0,402

Usaha budidaya pembesaran ikan umumnya memberikan tingkat pendapatan yang relatif lebih tinggi dibanding usaha budidaya pendederan dan pembenihan. Oleh karena itu alternatif kebijakan usaha budidaya pembesaran merupakan prioritas pertama dibanding kedua jenis usaha budidaya lainnya. Namun satu hal yang harus diperhatikan apabila alternatif kebijakan ini akan diterapkan yaitu bahwa untuk usaha budidaya pembesaran memerlukan modal usaha yang relatif lebih besar dibanding usaha pembenihan dan pendederan.

Luaran dan Target Capaian

Terdapat empat luaran sebagai kontribusi pada ilmu pengetahuan. Adapun keempat luaran yang dimaksud, sebagai berikut: (a) model kebijakan pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya pengentasan kemiskinan; (b) publikasi

jurnal nasional terakreditasi atau internasional (terindeks *scopus*); (c) *policy paper* terkait topik pembangunan daerah berbasis kawasan perdesaan untuk pengentasan kemiskinan; dan (d) penyaji atau pemakalah pada seminar nasional. Adapun target capaian dari luaran tersebut adalah terlaksana selama satu tahun anggaran kegiatan. Hingga saat ini, penelitian ini telah mencapai luaran berupa model kebijakan pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dari hasil FGD dan pengisian kuisioner AHP.

BAB 6. RENCANA TAHUN BERIKUTNYA

Tabel 32 Rencana Tahun Berikutnya

No	Bentuk Kegiatan	Tahun ke-1							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hasil penelitian tahap 1								
	- Laporan kemajuan								
	- Persiapan berupa pemantapan tim peneliti, persiapan alat, rapat dan kordinasi dengan pihak kabupaten								
2	Pengembangan model bisnis kolektif di lokasi pilot project								
	- Pelaksanaan kegiatan di lokasi pilot project bidang peternakan								
	- Pelaksanaan kegiatan di lokasi pilot project bidang perikanan								
3	Pembuatan laporan								
	- Lanjutan pengolahan, analisis data, dan perumusan kesimpulan								
	- Pembuatan laporan final								
	- Presentasi								
	- Revisi laporan								
	- Pengandaan laporan								
	- Publikasi dalam jurnal								

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Malang memiliki potensi peternakan untuk dibangun SPR sapi potong. SPR sapi potong ini akan dibentuk di Kecamatan Kalipare. Selain itu, Kabupaten Malang juga memiliki potensi perikanan khususnya budidaya di Kecamatan Dau, Ngajum, dan Wajak.

Masyarakat di Kecamatan Kalipare, Desa Arjowilangun, memiliki strategi pengelolaan nafkah yang beragam berdasarkan ketersediaan, kemudahan, dan intensitas dalam penggunaan modal sumber daya alam (*natural capital*), modal finansial, modal sumber daya manusia (*human capital*), dan modal sosial (*social capital*). Penghasilan rumah tangga peternak sapi potong di desa ini mayoritas dari peternakan. Penghasilan rumah tangga terbesar kedua ada pada bidang pertanian dari hasil komoditas padi dan tebu. Sedangkan pengeluaran terbesar adalah pengeluaran dalam hal pangan (beras, sayur, lauk pauk, bumbu dapur, dan air bersih). Pengeluaran terbesar kedua, dalam hal pengeluaran untuk energi (listrik, BBM/Transport, dan Gas).

Pada Pengentasan Kemiskinan di Kawasan Perdesaan Melalui SPR (Sekolah Peternakan Rakyat), diperoleh faktor yang paling berpengaruh terhadap fokus tersebut yaitu kompetensi peternak. Aktor yang dianggap paling berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan ini adalah peternak. Adapun tujuan yang paling diprioritaskan melalui pembentukan SPR ini adalah untuk membangun bisnis kolektif. Alternatif strategi yang dapat diambil untuk menciptakan model SPR yang tepat adalah melalui penggemukan sapi potong.

Desa Blayu merupakan salah satu desa di Kecamatan Wajak, dimana masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani. Sebagian besar masyarakat Desa Blayu termasuk dalam golongan menengah ke bawah. Sektor usaha perikanan darat belum menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat Desa Blayu, hanya sebatas sumber penghasilan tambahan. Terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan usaha perikanan darat di Desa Blayu tidak dapat berkembang, yaitu kurangnya modal, kemampuan manajemen, pengetahuan budidaya, luasan lahan, dan kesulitan memasarkan hasil panen.

Untuk membangun suatu kawasan perdesaan di bidang perikanan, desa-desa yang dapat dihimpun dan diajak untuk membangun kerja sama adalah Desa Blayu, Desa Codo, Desa Patokpicias dan Desa Kidangbang. Walaupun secara geografis jarak antar desa cukup jauh, namun kerja sama di bidang perikanan dapat dimungkinkan.

SPR bidang perikanan dapat di bentuk sesuai dengan analisa AHP yang memprioritaskan faktor sarana produksi perikanan bagi pembudidaya ikan untuk mendukung efisiensi usaha dengan alternatif bidang usaha pada pembesaran (produksi ikan konsumsi). Untuk pembentukan SPR bidang Perikanan diperlukan kajian dan diskusi yang lebih mendalam dengan stakeholder terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Checkland P, Poulter J. 2006. *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology and Its Use for Practitioners, Teachers, and Students*. Chichester (GB): John Wiley and Sons.
- Hardjosoekarto S. 2012. *Soft System Methodology*. Jakarta (ID): UI Press.
- Haq, M.U. 1983. *Tirai Kemiskinan: Tantangan-Tantangan Untuk Dunia Ketiga*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Hikmat, H. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Humaniora.
- Marimin, Magfiroh N. 2013. *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok*. Bogor (ID): IPB Press.
- Marimin, Taufik D, Suharjito, Syarief H, Ditdit NU, Retno A, Sri M. 2003. *Teknik dan Analisis Pengambilan Keputusan Fuzzy Dalam Manajemen Rantai Pasok*. Bogor (ID): IPB Press.
- Saaty TL, Vargas LG. 2012. *Model, Methods, Concepts & Applications of The Analytical Hierarchy Process*. New York (US): Springer.
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suwandi, Rostyaningsih D. 2012. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon*. Jurnal, 8 (2), 97-107. Diunduh dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/1318/1339>
- Tjokrowinoto, M. 1999. *Restrukturisasi Ekonomi dan Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Todaro M. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga.
- Tonny, Sjaf *et al.* 2016. *Penyusunan Indikator Keberhasilan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Terpadu (Agricultural Estate)*. Bogor: PSP3 IPB

LAMPIRAN

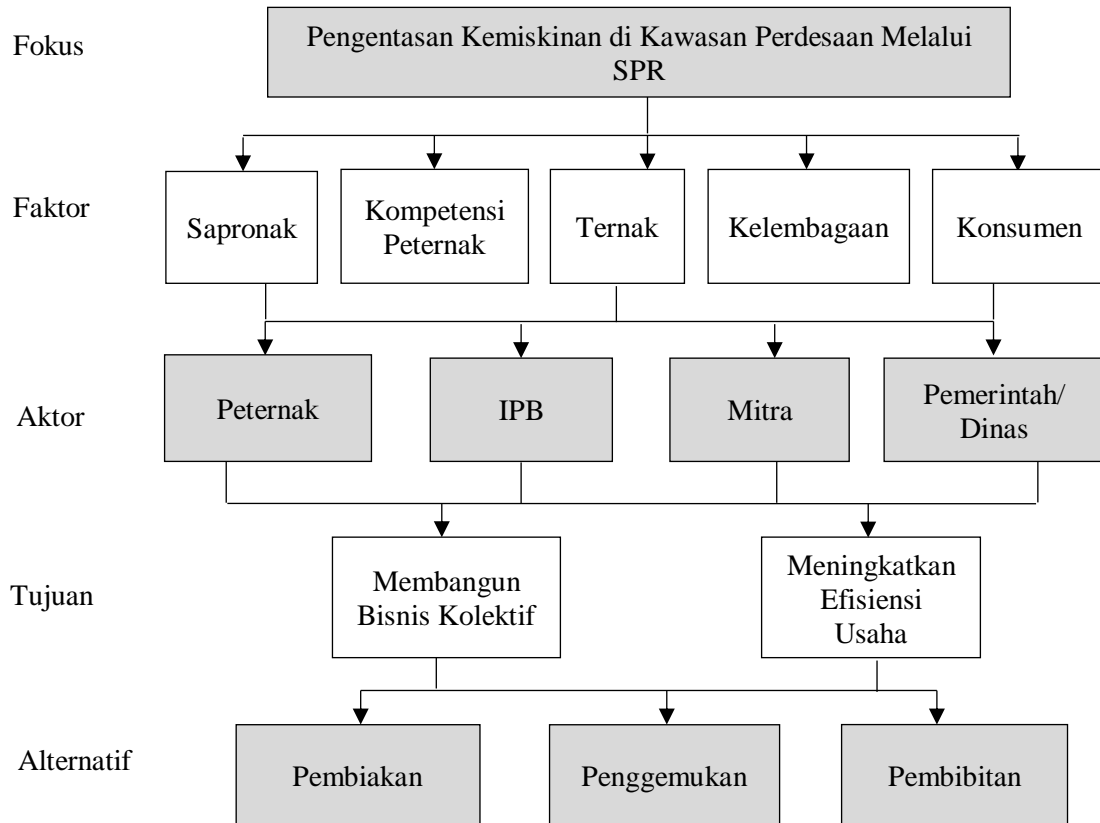
Lampiran 1 Borang kuisisioner AHP Peternakan

PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAWASAN PERDESAAN MELALUI SPR

EXPERT SURVEY

Nama Pakar :
Jabatan Pakar :
Alamat Pakar :
Keahlian :
Tanggal Wawancara :

Struktur AHP Bidang Peternakan



PETUNJUK PENGISIAN

1. Untuk menghindari inkonsistensi, dimohon agar Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini pada satu waktu.
2. Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis dengan **menjawab semua** pertanyaan tertulis.
3. Pada pengisian kuesioner ini, Bapak/Ibu diminta untuk membandingkan antara dua elemen yaitu elemen A (kolom kiri) dengan elemen B (kolom kanan). Nilai perbandingan antara dua elemen tersebut ditandai dengan tanda “√” (*checklist*).
4. Nilai perbandingan yang diberikan mempunyai skala 1 sampai 9. Berikut ini definisi dari skala banding yang digunakan.

Skala Penilaian	Definisi	Penjelasan
9	Mutlak lebih penting	Bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi
7	Sangat jelas lebih penting	Satu elemen dengan kuat disokong dan dominannya telah terlihat dalam praktik
5	Jelas lebih penting	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen yang lainnya
3	Sedikit lebih penting	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya
1	Sama penting	Kedua elemen menyumbang sama besar
2,4,6,8	Nilai-nilai antara	di antara kedua pertimbangan yang berdekatan

CONTOH CARA MENJAWAB

Instruksi :

Bandingkanlah besarnya peran antar faktor-faktor dibawah ini berkaitan dengan fokus “*Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Perdesaan Melalui SPR*”

Kolom Kiri	Lebih Penting					Lebih Penting					Kolom kanan
	9	7	5	3	1	3	5	7	9		
Faktor X											Faktor Y
Faktor X											Faktor Z
Faktor Y											Faktor Z

Pengertiannya :

1. Faktor X jelas lebih penting daripada faktor Y atau sebaliknya faktor Y jelas kurang penting daripada faktor X
2. Faktor X mutlak kurang penting daripada faktor Z atau sebaliknya faktor Z mutlak lebih penting daripada faktor
3. Ragu-ragu (diperlukan kompromi) untuk mengatakan bahwa faktor Z jelas lebih penting daripada faktor Y

BAGIAN II

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor pada bagian I, aktor-aktor utama yang paling berperan dalam “*Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Perdesaan Melalui SPR*” adalah:

- a) Peternak
- b) IPB
- c) Mitra
- d) Pemerintah/Dinas

Instruksi 2

Bandungkanlah tingkat kepentingan/pengaruh relatif antara satu aktor dengan aktor lainnya berkaitan dengan faktor “**Sapronak**” dalam “*Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Perdesaan Melalui SPR*”

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Peternak																		IPB	
Peternak																		Mitra	
Peternak																		Pemerintah/Dinas	
IPB																		Mitra	
IPB																		Pemerintah/Dinas	
Mitra																		Pemerintah/Dinas	

Instruksi 3

Bandungkanlah tingkat kepentingan/pengaruh relatif antara satu aktor dengan aktor lainnya berkaitan dengan faktor “**Pengetahuan dan Keterampilan**” dalam “*Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Perdesaan Melalui SPR*”

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Peternak																		IPB	
Peternak																		Mitra	
Peternak																		Pemerintah/Dinas	
IPB																		Mitra	
IPB																		Pemerintah/Dinas	
Mitra																		Pemerintah/Dinas	

Instruksi 4

Bandungkanlah tingkat kepentingan/pengaruh relatif antara satu aktor dengan aktor lainnya berkaitan dengan faktor “**Ternak**” dalam “*Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Perdesaan Melalui SPR*”

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Peternak																		IPB	
Peternak																		Mitra	
Peternak																		Pemerintah/Dinas	
IPB																		Mitra	
IPB																		Pemerintah/Dinas	
Mitra																		Pemerintah/Dinas	

Instruksi 5

Bandungkanlah tingkat kepentingan/pengaruh relatif antara satu aktor dengan aktor lainnya berkaitan dengan faktor “**Kelembagaan**” dalam “*Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Perdesaan Melalui SPR*”

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Peternak																		IPB	
Peternak																		Mitra	
Peternak																		Pemerintah/Dinas	
IPB																		Mitra	
IPB																		Pemerintah/Dinas	
Mitra																		Pemerintah/Dinas	

Instruksi 6

Bandungkanlah tingkat kepentingan/pengaruh relatif antara satu aktor dengan aktor lainnya berkaitan dengan faktor “**Konsumen**” dalam “*Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Perdesaan Melalui SPR*”

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Peternak																		IPB	
Peternak																		Mitra	
Peternak																		Pemerintah/Dinas	
IPB																		Mitra	
IPB																		Pemerintah/Dinas	

BAGIAN IV

Dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai, maka alternatif strategi yang dapat dikembangkan yaitu melalui:

- 1) Pembiakan adalah proses biologis untuk melahirkan individu ternak yang baru.
- 2) Penggemukan adalah usaha pemeliharaan ternak dengan cara mengandangkan secara terus-menerus selama periode tertentu yang bertujuan meningkatkan produksi daging dengan mutu yang lebih baik sebelum ternak dipotong
- 3) Pembibitan adalah usaha untuk menghasilkan ternak bibit, dimana yang dimaksud dengan ternak bibit adalah ternak yang memenuhi persyaratan dan karakter tertentu untuk dikembangbiakan dengan tujuan standar produksi /kinerja yang ditentukan.

Instruksi 11

Bandingkanlah tingkat kepentingan antar alternatif strategi berikut ini berkaitan dengan tujuan “**Membangun Bisnis Kolektif**” dalam “*Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Perdesaan Melalui SPR*”

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pembiakan																		Penggemukan	
Pembiakan																		Pembibitan	
Penggemukan																		Pembibitan	

Instruksi 12

Bandingkanlah tingkat kepentingan antar alternatif strategi berikut ini berkaitan dengan tujuan “**Meningkatkan Efisiensi Usaha**” dalam “*Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Perdesaan Melalui SPR*”

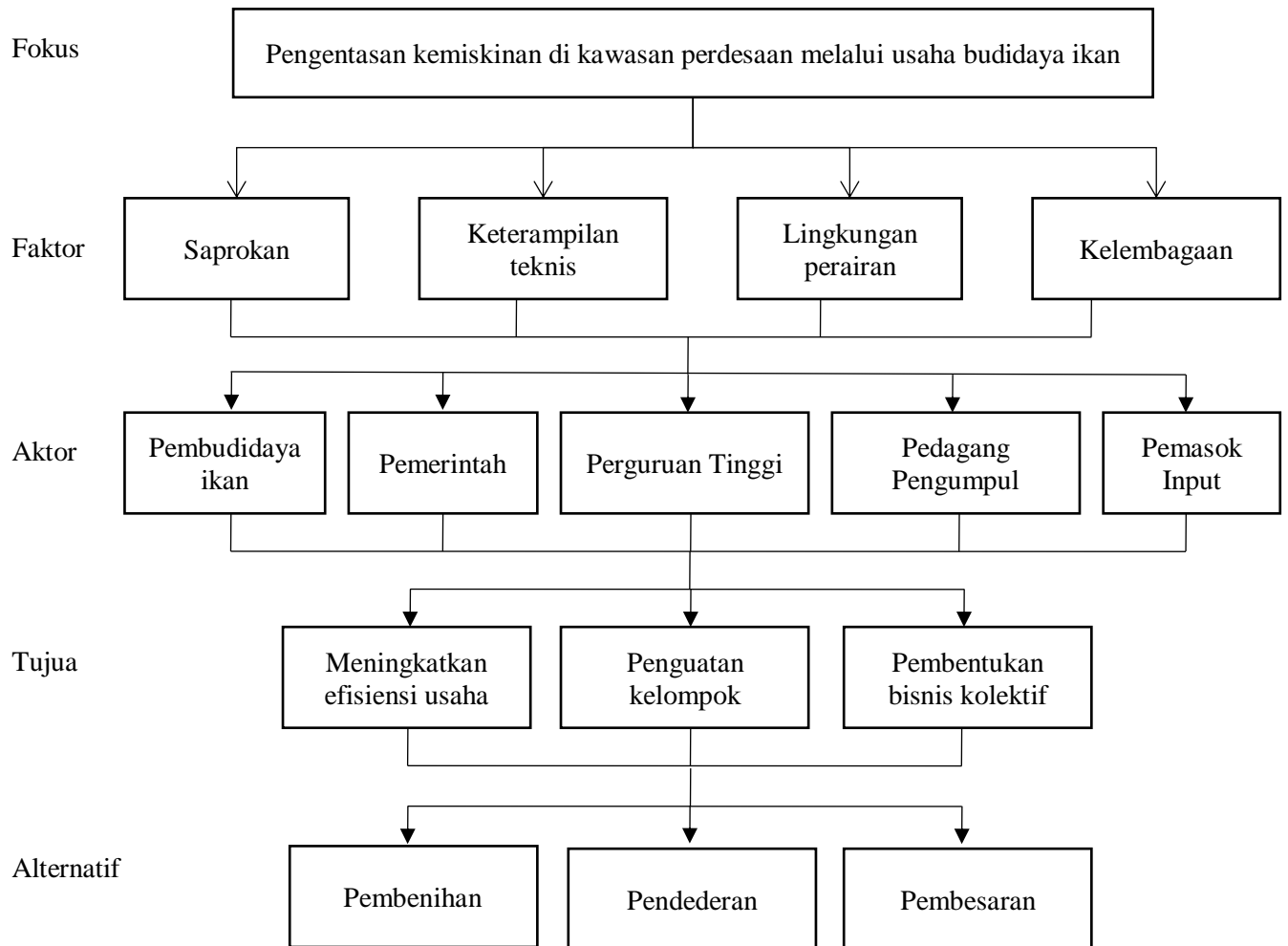
Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pembiakan																		Penggemukan	
Pembiakan																		Pembibitan	
Penggemukan																		Pembibitan	

Lampiran 2 Borang kuisisioner AHP Perikanan

**PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAWASAN PERDESAAN MELALUI
USAHA BUDIDAYA IKAN****EXPERT SURVEY**

Nama Pakar :
Jabatan Pakar :
Alamat Pakar :
Keahlian :
Tanggal Wawancara :

Struktur hierarki AHP Bidang Perikanan



PETUNJUK PENGISIAN

1. Untuk menghindari inkonsistensi, dimohon agar Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini pada satu waktu.
2. Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis dengan **menjawab semua** pertanyaan tertulis.
3. Pada pengisian kuesioner ini, Bapak/Ibu diminta untuk membandingkan antara dua elemen yaitu elemen A (kolom kiri) dengan elemen B (kolom kanan). Nilai perbandingan antara dua elemen tersebut ditandai dengan tanda “√” (*checklist*).
4. Nilai perbandingan yang diberikan mempunyai skala 1 sampai 9. Berikut ini definisi dari skala banding yang digunakan.

Skala Penilaian	Definisi	Penjelasan
9	Mutlak lebih penting	Bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi
7	Sangat jelas lebih penting	Satu elemen dengan kuat disokong dan dominannya telah terlihat dalam praktik
5	Jelas lebih penting	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen yang lainnya
3	Sedikit lebih penting	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya
1	Sama penting	Kedua elemen menyumbang sama besar
2,4,6,8	Nilai-nilai antara di antara kedua pertimbangan yang berdekatan	

CONTOH CARA MENJAWAB

Instruksi :

Bandungkanlah besarnya peran antar faktor-faktor dibawah ini berkaitan dengan fokus “*Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan*”

Kolom Kiri	Lebih Penting					Lebih Penting					Kolom kanan
	9	7	5	3	1	3	5	7	9		
FaktorX			√								FaktorY
FaktorX										√	FaktorZ
FaktorY							√				FaktorZ

Pengertiannya :

1. Faktor X jelas lebih penting dari faktor Y atau sebaliknya faktor Y jelas kurang penting dari faktor X
2. Faktor X mutlak kurang penting dari faktor Z atau sebaliknya faktor Z mutlak lebih penting dari faktor
3. Ragu-ragu (diperlukan kompromi) untuk mengatakan bahwa faktor Z jelas lebih penting dari faktor Y

BAGIAN I

Dalam kaitannya dengan fokus hirarki yaitu “*Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan*”, faktor yang teridentifikasi adalah :

- h) **Saprokan (sarana produksi perikanan)** adalah semua hal atau unsur yang dibutuhkan atau dengan kata lain disebut juga bahan baku dalam pengelolaan produksi perikanan, termasuk bibit, pakan, dan obat-obatan ternak.
- i) **Keterampilan teknis** adalah kecakapan atau kemampuan yang dimiliki oleh pembudidaya ikan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan di dalam suatu organisasi.
- j) **Lingkungan perairan** adalah kondisi lingkungan perairan dimana kegiatan budidaya ikan dilakukan yang dapat mempengaruhi proses pemeliharaan ikan mulai dari persiapan hingga panen.
- c) **Kelembagaan** adalah suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang dan lembaga untuk tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur.

Instruksi 1

Bandungkanlah besarnya peran masing-masing faktor dibawah ini berkaitan dengan fokus “*Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan*”

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Saprokan																		Keterampilan teknis	
Saprokan																		Lingkungan perairan	
Saprokan																		Kelembagaan	
Keterampilan teknis																		Lingkungan perairan	
Keterampilan teknis																		Kelembagaan	
Lingkungan perairan																		Kelembagaan	

BAGIAN II

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor pada bagian I, aktor-aktor utama yang paling berperan dalam “*Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan*” adalah:

- e) Pembudidaya ikan
- f) Pemerintah/Dinas
- g) Perguruan Tinggi
- h) Pedagang Pengumpul
- i) Pemasok Input

Instruksi 2

Bandingkanlah tingkat kepentingan/pengaruh relatif antara satu aktor dengan aktor lainnya berkaitan dengan faktor “**Saprokan**” dalam “*Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan*”

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pembudidaya ikan																		Pemerintah/Dinas	
Pembudidaya ikan																		Perguruan Tinggi	
Pembudidaya ikan																		Pedagang Pengumpul	
Pembudidaya ikan																		Pemasok Input	
Pemerintah/Dinas																		Perguruan Tinggi	
Pemerintah/Dinas																		Pedagang Pengumpul	
Pemerintah/Dinas																		Pemasok input	
Perguruan Tinggi																		Pedagang Pengumpul	
Perguruan Tinggi																		Pemasok input	
Pedagang pengumpul																		Pemasok input	

Instruksi 3

Bandungkanlah tingkat kepentingan/pengaruh relatif antara satu aktor dengan aktor lainnya berkaitan dengan faktor “**Keterampilan teknis**” dalam “*Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan*”

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pembudidaya ikan																		Pemerintah/Dinas	
Pembudidaya ikan																		Perguruan Tinggi	
Pembudidaya ikan																		Pedagang Pengumpul	
Pembudidaya ikan																		Pemasok Input	
Pemerintah/Dinas																		Perguruan Tinggi	
Pemerintah/Dinas																		Pedagang Pengumpul	
Pemerintah/Dinas																		Pemasok input	
Perguruan Tinggi																		Pedagang Pengumpul	
Perguruan Tinggi																		Pemasok input	
Pedagang pengumpul																		Pemasok input	

Instruksi 4

Bandungkanlah tingkat kepentingan/pengaruh relatif antara satu aktor dengan aktor lainnya berkaitan dengan faktor “**lingkungan perairan**” dalam “*Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan*”

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pembudidaya ikan																		Pemerintah/Dinas	
Pembudidaya ikan																		Perguruan Tinggi	
Pembudidaya ikan																		Pedagang Pengumpul	
Pembudidaya ikan																		Pemasok Input	
Pemerintah/Dinas																		Perguruan Tinggi	
Pemerintah/Dinas																		Pedagang Pengumpul	
Pemerintah/Dinas																		Pemasok input	
Perguruan Tinggi																		Pedagang Pengumpul	
Perguruan Tinggi																		Pemasok input	
Pedagang pengumpul																		Pemasok input	

Instruksi 5

Bandingkanlah tingkat kepentingan/pengaruh relatif antara satu aktor dengan aktor lainnya berkaitan dengan faktor “**Kelembagaan**” dalam “*Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan*”

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pembudidaya ikan																		Pemerintah/Dinas	
Pembudidaya ikan																		Perguruan Tinggi	
Pembudidaya ikan																		Pedagang Pengumpul	
Pembudidaya ikan																		Pemasok Input	
Pemerintah/Dinas																		Perguruan Tinggi	
Pemerintah/Dinas																		Pedagang Pengumpul	
Pemerintah/Dinas																		Pemasok input	
Perguruan Tinggi																		Pedagang Pengumpul	
Perguruan Tinggi																		Pemasok input	
Pedagang pengumpul																		Pemasok input	

BAGIAN III

Dalam kaitannya dengan aktor-aktor yang berpengaruh/bertanggungjawab dalam “*Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan*”, tujuan yang ingin dicapai adalah:

- c) Meningkatkan efisiensi usaha
- d) Penguatan kelompok
- e) Pembentukan bisnis kolektif

Instruksi 6

Bandingkanlah tingkat kepentingan/pengaruh relatif antara satu tujuan dengan tujuan lainnya bagi “**Pembudidaya Ikan**” dalam “*Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan*”

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Meningkatkan efisiensi usaha																		Penguatan kelompok	
Meningkatkan efisiensi usaha																		Pembentukan bisnis kolektif	
Penguatan kelompok																		Pembentukan bisnis kolektif	

Instruksi 7

Bandingkanlah tingkat kepentingan/pengaruh relatif antara satu tujuan dengan tujuan lainnya bagi **“Pemerintah/Dinas”** dalam *“Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan”*

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Meningkatkan efisiensi usaha																		Penguatan kelompok	
Meningkatkan efisiensi usaha																		Pembentukan bisnis kolektif	
Penguatan kelompok																		Pembentukan bisnis kolektif	

Instruksi 8

Bandingkanlah tingkat kepentingan/pengaruh relatif antara satu tujuan dengan tujuan lainnya bagi **“Perguruan Tinggi”** dalam *“Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan”*

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Meningkatkan efisiensi usaha																		Penguatan kelompok	
Meningkatkan efisiensi usaha																		Pembentukan bisnis kolektif	
Penguatan kelompok																		Pembentukan bisnis kolektif	

Instruksi 9

Bandingkanlah tingkat kepentingan/pengaruh relatif antara satu tujuan dengan tujuan lainnya bagi **“Pedagang Pengumpul”** dalam *“Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan”*

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Meningkatkan efisiensi usaha																		Penguatan kelompok	
Meningkatkan efisiensi usaha																		Pembentukan bisnis kolektif	
Penguatan kelompok																		Pembentukan bisnis kolektif	

Instruksi 10

Bandingkanlah tingkat kepentingan/pengaruh relatif antara satu tujuan dengan tujuan lainnya bagi **“Pemasok Input”** dalam *“Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan”*

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Meningkatkan efisiensi usaha																		Penguatan kelompok	
Meningkatkan efisiensi usaha																		Pembentukan bisnis kolektif	
Penguatan kelompok																		Pembentukan bisnis kolektif	

BAGIAN IV

Dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai, maka alternatif strategi yang dapat dikembangkan yaitu melalui:

- 4) Pembenihan ikan adalah kegiatan pemeliharaan ikan yang dilakukan untuk menghasilkan benih ikan yang siap untuk kegiatan pendederan dan/atau pembesaran
- 5) Pendederan ikan adalah kegiatan pemeliharaan benih yang dilakukan untuk menghasilkan benih sampai ukuran tertentu yang siap usaha pembesaran ikan.
- 6) Pembesaran ikan adalah kegiatan pemeliharaan benih ikan yang dilakukan untuk menghasilkan ikan ukuran konsumsi

Instruksi 11

Bandingkanlah tingkat kepentingan antar alternatif strategi berikut ini berkaitan dengan tujuan **“Meningkatkan Efisiensi Usaha”** dalam *“Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan”*

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pembenihan																		Pendederan	
Pembenihan																		Pembesaran	
Pendederan																		Pembesaran	

Instruksi 12

Bandingkanlah tingkat kepentingan antar alternatif strategi berikut ini berkaitan dengan tujuan **“Penguatan Kelompok”** dalam *“Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan”*

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pembenihan																		Pendederan	
Pembenihan																		Pembesaran	
Pendederan																		Pembesaran	

Instruksi 13




Bandingkanlah tingkat kepentingan antar alternatif strategi berikut ini berkaitan dengan tujuan **“Pembentukan Bisnis Kolektif”** dalam *“Pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan melalui usaha budidaya ikan”*

Kolom Kiri	Lebih Penting									Lebih Penting									Kolom Kanan
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pembenihan																		Pendederan	
Pembenihan																		Pembesaran	
Pendederan																		Pembesaran	

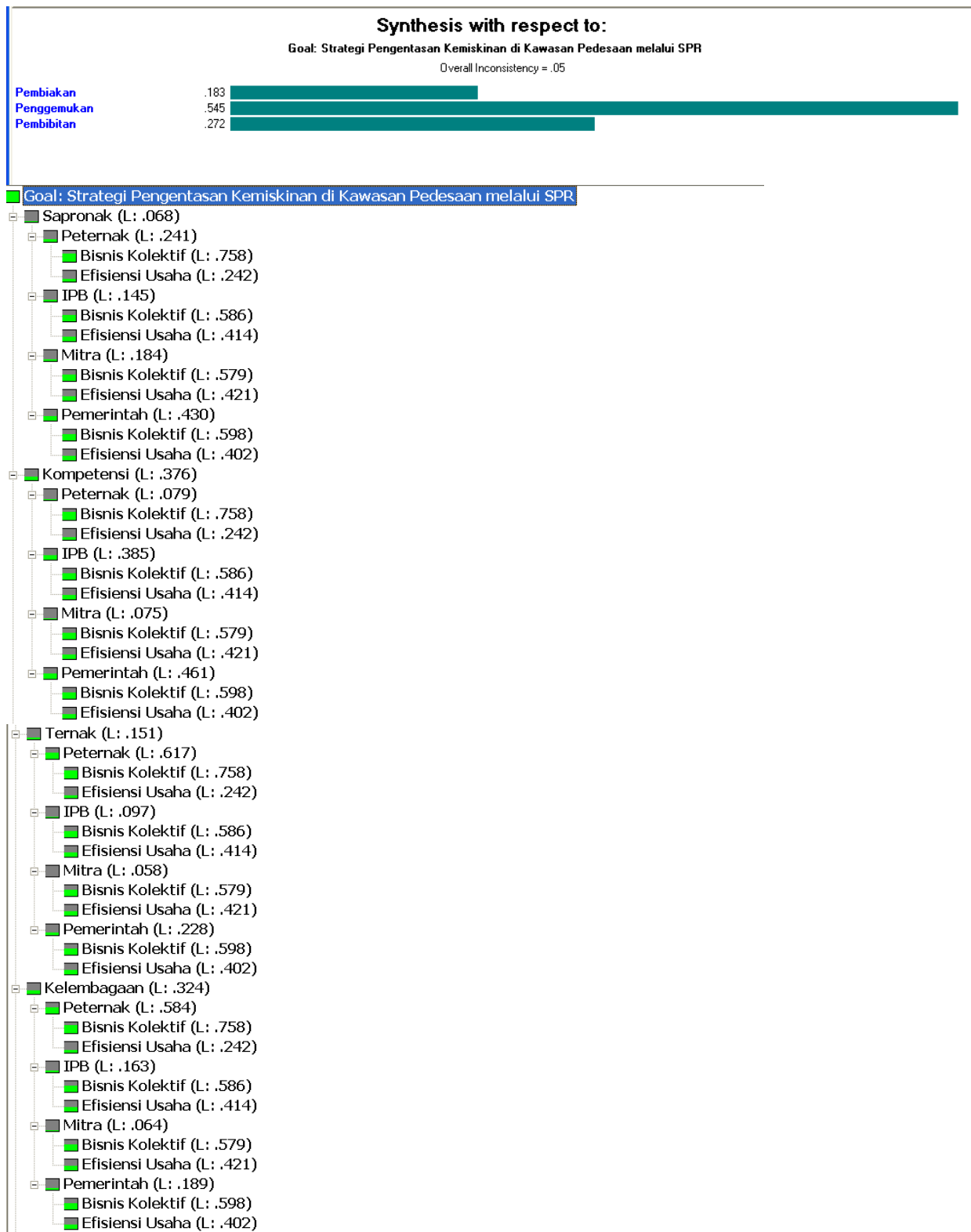
Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan

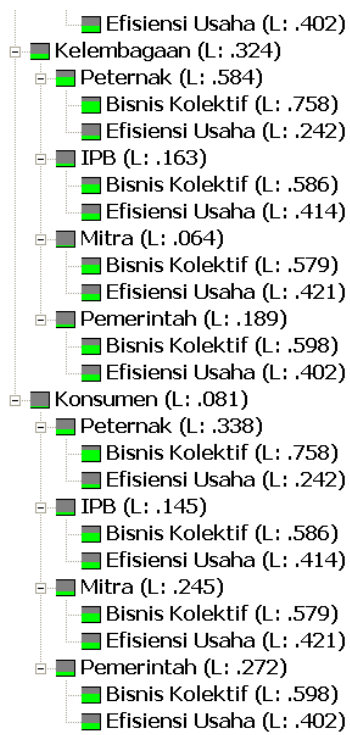
No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	FGD Bidang Perikanan di Kecamatan Kepanjen	
2.	Kunjungan ke Kecamatan Ngajum	

3.	FGD Bidang Peternakan di Kecamatan Kalipare	
4.	Kandang ternak di SPR Kalipare	
5.	Kunjungan ke SPR Kasiman	

6.	Ternak SPR Kasiman	
7.	Kunjungan ke Kecamatan Wajak	
8.	Kolam Ikan di Kecamatan Wajak	

Lampiran 4 Hasil pengolahan data AHP bidang peternakan menggunakan *software* Expert Choice





Lampiran 5 Hasil pengolahan data AHP bidang perikanan menggunakan *software* Expert Choice

Goal: Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kawasan Pedesaan melalui Usaha Budidaya Ikan

- Saprokan (L: .385)
 - Pembudidaya Ikan (L: .336)
 - Efisiensi Usaha (L: .496)
 - Penguatan Kelompok (L: .254)
 - Bisnis Kolektif (L: .250)
 - Pemerintah (L: .221)
 - Efisiensi Usaha (L: .255)
 - Penguatan Kelompok (L: .541)
 - Bisnis Kolektif (L: .204)
 - Perguruan Tinggi (L: .060)
 - Efisiensi Usaha (L: .547)
 - Penguatan Kelompok (L: .210)
 - Bisnis Kolektif (L: .242)
 - Pedagang Pengumpul (L: .216)
 - Efisiensi Usaha (L: .305)
 - Penguatan Kelompok (L: .202)
 - Bisnis Kolektif (L: .493)
 - Pemasok Input (L: .167)
 - Efisiensi Usaha (L: .330)
 - Penguatan Kelompok (L: .250)
 - Bisnis Kolektif (L: .419)
 - Keterampilan Teknis (L: .218)
 - Pembudidaya Ikan (L: .456)
 - Efisiensi Usaha (L: .496)
 - Penguatan Kelompok (L: .254)
 - Bisnis Kolektif (L: .250)
 - Pemerintah (L: .237)

Alternatives: Ideal mo

Pembenhian	.369
Pendederan	.241
Pembesaran	.390

Information Document

Goal: Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kawasan Pedesaan melalui Usaha Budidaya Ikan

- Pemerintah (L: .237)
 - Efisiensi Usaha (L: .255)
 - Penguatan Kelompok (L: .541)
 - Bisnis Kolektif (L: .204)
- Perguruan Tinggi (L: .117)
 - Efisiensi Usaha (L: .547)
 - Penguatan Kelompok (L: .210)
 - Bisnis Kolektif (L: .242)
- Pedagang Pengumpul (L: .091)
 - Efisiensi Usaha (L: .305)
 - Penguatan Kelompok (L: .202)
 - Bisnis Kolektif (L: .493)
- Pemasok Input (L: .098)
 - Efisiensi Usaha (L: .330)
 - Penguatan Kelompok (L: .250)
 - Bisnis Kolektif (L: .419)
- Lingkungan Perairan (L: .284)
 - Pembudidaya Ikan (L: .400)
 - Efisiensi Usaha (L: .496)
 - Penguatan Kelompok (L: .236)
 - Bisnis Kolektif (L: .268)
 - Pemerintah (L: .267)
 - Efisiensi Usaha (L: .255)
 - Penguatan Kelompok (L: .541)
 - Bisnis Kolektif (L: .204)
 - Perguruan Tinggi (L: .121)
 - Efisiensi Usaha (L: .547)
 - Penguatan Kelompok (L: .210)

Alternatives: Ideal mo

Pembenhian	.369
Pendederan	.241
Pembesaran	.390

Information Document

Expert Choice 2000 C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Budidaya Perikanan.ahp Combined

File Edit Assessment Synthesize Sensitivity-Graphs View Go Tools Help

3:1 ABC Y46

Alternatives: Ideal.mo

Pembenihan	.369
Pendederan	.241
Pembesaran	.390

Information Document

- Efisiensi Usaha (L: .496)
- Penguatan Kelompok (L: .236)
- Bisnis Kolektif (L: .268)
- Pemerintah (L: .267)
 - Efisiensi Usaha (L: .255)
 - Penguatan Kelompok (L: .541)
 - Bisnis Kolektif (L: .204)
- Perguruan Tinggi (L: .121)
 - Efisiensi Usaha (L: .547)
 - Penguatan Kelompok (L: .210)
 - Bisnis Kolektif (L: .242)
- Pedagang Pengumpul (L: .096)
 - Efisiensi Usaha (L: .305)
 - Penguatan Kelompok (L: .202)
 - Bisnis Kolektif (L: .493)
- Pemasok Input (L: .116)
 - Efisiensi Usaha (L: .330)
 - Penguatan Kelompok (L: .250)
 - Bisnis Kolektif (L: .419)
- Kelembagaan (L: .112)
 - Pembudidaya Ikan (L: .357)
 - Efisiensi Usaha (L: .496)
 - Penguatan Kelompok (L: .254)
 - Bisnis Kolektif (L: .250)
 - Pemerintah (L: .390)
 - Efisiensi Usaha (L: .255)
 - Penguatan Kelompok (L: .541)
 - Bisnis Kolektif (L: .204)

Expert Choice 2000 C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Budidaya Perikanan.ahp Combined

File Edit Assessment Synthesize Sensitivity-Graphs View Go Tools Help

3:1 ABC Y46

Alternatives: Ideal.mo

Pembenihan	.369
Pendederan	.241
Pembesaran	.390

Information Document

- Penguatan Kelompok (L: .202)
- Bisnis Kolektif (L: .493)
- Pemasok Input (L: .116)
 - Efisiensi Usaha (L: .330)
 - Penguatan Kelompok (L: .250)
 - Bisnis Kolektif (L: .419)
- Kelembagaan (L: .112)
 - Pembudidaya Ikan (L: .357)
 - Efisiensi Usaha (L: .496)
 - Penguatan Kelompok (L: .254)
 - Bisnis Kolektif (L: .250)
 - Pemerintah (L: .390)
 - Efisiensi Usaha (L: .255)
 - Penguatan Kelompok (L: .541)
 - Bisnis Kolektif (L: .204)
 - Perguruan Tinggi (L: .102)
 - Efisiensi Usaha (L: .547)
 - Penguatan Kelompok (L: .210)
 - Bisnis Kolektif (L: .242)
 - Pedagang Pengumpul (L: .075)
 - Efisiensi Usaha (L: .305)
 - Penguatan Kelompok (L: .202)
 - Bisnis Kolektif (L: .493)
 - Pemasok Input (L: .077)
 - Efisiensi Usaha (L: .330)
 - Penguatan Kelompok (L: .250)
 - Bisnis Kolektif (L: .419)

JENIS PENGELUARAN	PENGELUARAN DALAM RUPIAH 2015			2016									Total	% PENGELUARAN SEBELUMNYA	
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept		5 TAHUN LALU	2017
c.Lainnya.....															
F. USAHA KEHUTANAN (tenaga pikul, biaya pemotongan dan pengambilan dll)															
G. USAHA ON FARM (sesuaikan dengan 4.1. E)															
H. USAHA NON PERTANIAN (sesuaikan dengan 4.1. F)															
I. PENDIDIKAN															
J. PAKAIAN															
K. SOSIAL a.Iuran perayaan keagamaan..... b.Iuran perayaan...															
M.LAINNYA															
1. Pulsa															
2. Rokok															
3. Sirih dan pinang															
4. Kesehatan															
TOTAL															

5. LIVELIHOOD VULNERABILITY INDEX

5.1.Sensitifitas

Sub komponen	Indikator	
Kesehatan	1. Fasilitas kesehatan apa yang ada disekitar rumah anda?	1. Obat herbal sendiri 2. Dukun 3. Klinik/balai kesehatan 4. Pustu (puskesmas pembantu) 5. Puskesmas

		6. Rumah sakit
	2. Jika sakit fasilitas kesehatan apa yang paling sering didatangi ?	1. Obat herbal sendiri 2. Dukun 3. Klinik/balai kesehatan 4. Pustu (puskesmas pembantu) 5. Puskesmas 6. Rumah sakit
	3. Apakah ada anggota rumahtangga anda yang terkena penyakit akibat /kekeringan ?	0. Tidak 1. Iya
	4. Berapa banyak anggota rumahtangga anda yang terkena penyakit akibat /kekeringan ? orang
	5. Jenis penyakit apa yang sering diderita oleh anggota rumahtangga anda akibat /kekeringan ?	1. Demam 2. Flu 3. Penyakit kulit 4. Gangguan pencernaan 5. Busung lapar 6.....
Makanan	1. Apakah sumber makanan rumahtangga anda berasal dari hasil pertanian ?	0. Tidak 1. Iya
	2. Berapa persen pangan yang rumahtangga anda peroleh dari hasil pertanian ketika keadaan normal ? %
	3. Berapa persen pangan yang rumahtangga anda peroleh dari hasil pertanian ketika keadaan kekeringan ? %
	4. Apakah rumahtangga anda menyimpan hasil pertanian untuk konsumsi rumahtangga?	0. Tidak 1. Iya
	5. Berapa persen rumahtangga anda menyimpan hasil pertanian untuk konsumsi rumahtangga? %
	6. Berapa lama rumahtangga anda dapat bertahan hidup dengan sumber makanan dari hasil pertanian (selama 1 th)? bulan
Air	1. Apakah rumahtangga anda mengalami krisis air bersih ketika kekeringan melanda?	0. Tidak 1. Iya
	2. Darimana anda mendapatkan air bersih (untuk konsumsi) ketika terjadi kekeringan?	1. Sungai 2. Sumur 3. PAM SIMAS 4. Embung 5. Bendungan 6. beli air tangki 7. Beli air galon
	3. Darimana anda mendapatkan mendapatkan air bersih (untuk pengairan sawah) ketika terjadi kekeringan	1. Sungai 2. Sumur 3. PAM SIMAS

		4. Embung 5. Bendungan 6. beli air tangki 7. Beli air galon
	4. Berapa kali rumahtangga anda mendapatkan air bersih dengan cara membeli selama menghadapi kekeringan? kali
	5. Apakah keluarga Bapak/ibu mudah mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari?	1. Ya, Selalu 2. Ya, kadang-kadang 3. Tidak

5.3. Adaptive Capacity

5.3.1. sub komponen kelembagaan

Jenis Keanggotaan Perkumpulan	Keikutsertaan 0. Tidak 1. Ya	Status dalam kelompok 1. Anggota biasa 2. Anggota aktif 3. Pengurus
a. Kelompok tani		
b. Pemberdayaan petani pemakai air (P3A)		
c. Pemberdayaan kelompok tani (P2T)		
d. Dewan kemakmuran masjid (DKM)		
e. Kelompok keanggotaan gereja		
f. Credit Union (CU)		
g. Koperasi		
h. LSM		
i. Kelompok usaha bersama		
j. Keanggotaan sumur bersama		
k. Perkumpulan pertetangga		
l. Perkumpulan kekeluargaan/marga		
m. PAM SIMAS (pengelolaan air berbasis masyarakat)		
n. Pegadaian		

5.2. Exposure (kejadian dalam 10 tahun terakhir)

No	Indikator Perubahan	Tingkat Pengetahuan		Tahun kejadian	Jumlah kejadian (frekuensi)	Dampak Perubahan (1. Ya) atau (0. Tidak)			Sumber Pengetahuan 1. Media (TV, koran dll) 2. Kerabat 3. penyuluh 4. kepala desa 5. Pastur gereja 6. pengalaman 7. lainnya....
		Ya (1)	Tidak (0)			Sosial	Ekologi	Pendapatan Rumahtangga	
1.	Meningkatnya aktivitas Ekonomi								
2.	Berubahnya Sosial Budaya								
3.	Meningkatnya Infrastruktur								
4.	Kemudahan aksesibilitas								

5.3.2. Sub komponen strategi bertahan hidup saat menghadapi permasalahan hidup (eksisting)

NO	STRATEGI BERTAHAN HIDUP	SKALA PRIORITAS (pilihlah strategi sesuai di lokasi penelitian)					Tujuan pemanfaatan: 1. membeli pangan dan sandang (kebutuhan sehari hari) 2. biaya sekolah 3. biaya kesehatan 4. biaya upacara adat (kematian dan mengawinkan)	Lamanya <u>bertahan hidup</u> yang bisa didukung oleh keputusan strategi adaptive responden (hari) (jika responden menjawab tujuan pemanfaatan 1)	Kalkulasi	Catatan
		I. Prioritas sangat tinggi	II. Prioritas tinggi	III. Prioritas sedang	IV. Prioritas rendah	V. Prioritas sangat rendah				
A.	ADAPTASI EKONOMI									
1.	Memanfaatkan tabungan	I	II	III	IV	V			Jumlah adaptasi ekonomi yang dilakukan	
2.	Sewa lahan	I	II	III	IV	V				
3.	Jual binatang ternak	I	II	III	IV	V				
4.	Jual perhiasan	I	II	III	IV	V				

5.	Jual barang elektronik	I	II	III	IV	V				
6.	Jual sepeda motor/mobil	I	II	III	IV	V					
7.	Jual tanah	I	II	III	IV	V					
8.	Mengurangi konsumsi makanan per hari	I	II	III	IV	V					
9.	Berhutang pada lembaga formal (bank/koperasi)	I	II	III	IV	V					
10.	Berhutang pada lembaga non formal (rentenir/warung)	I	II	III	IV	V					
11.	Jual kayu cendana	I	II	III	IV	V					
12.	Jual stok jagung	I	II	III	IV	V					
13.	Jual stok padi	I	II	III	IV	V					
14.	Jual hasil pertanian (palawija dan hortikultura)	I	II	III	IV	V					
15.	Transfer payment	I	II	III	IV	V					
16.	I	II	III	IV	V					
17.										
B.	ADAPTASI EKOLOGI									Jumlah adaptasi ekologi yang dilakukan	
1.	Mencari ikan di sungai	I	II	III	IV	V					
2.	Menjadi buruh tani	I	II	III	IV	V					
3.	Menjadi pekerja non farm di desa	I	II	III	IV	V					
4.	Menjadi pekerja di kota	I	II	III	IV	V					
5.	Memanfaatkan teknologi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi (pupuk, dll)	I	II	III	IV	V				
6.	Membuat bedeng dengan plastik	I	II	III	IV	V					
7.	Mengganti pola tanam	I	II	III	IV	V					
8.	Mengganti komoditas pertanian/ perkebunan	I	II	III	IV	V					
9.	I	II	III	IV	V					
C.	ADAPTASI SOSIAL								Jumlah adaptasi sosial yang dilakukan		
1.	Pemanfaatan jaringan kekerabatan berupa kiriman uang	I	II	III	IV	V					
2.	Pemanfaatan jaringan kekerabatan berupa pangan	I	II	III	IV	V					
3.	Pemanfaatan jaringan kekerabatan berupa obat-obatan	I	II	III	IV	V				
4.	Pemanfaatan jaringan kekerabatan berupa air	I	II	III	IV	V					
5.	Pinjaman uang dari saudara	I	II	III	IV	V					
6.	Bantuan uang dari tetangga	I	II	III	IV	V					

7.	Bantuan pangan dari tetangga	I	II	III	IV	V			
8.	Bantuan obat-obatan dari tetangga	I	II	III	IV	V			
9.	Bantuan air dari tetangga	I	II	III	IV	V			
10.	Pinjaman uang dari tetangga	I	II	III	IV	V			
11.	Bantuan uang dari gereja	I	II	III	IV	V			
12.	Bantuan pangan dari gereja	I	II	III	IV	V			
13.	Bantuan obat-obatan dari gereja	I	II	III	IV	V			
14.	Bantuan air dari gereja	I	II	III	IV	V			
15.	Pinjaman uang dari gereja	I	II	III	IV	V			
16.	Pemanfaatan bantuan uang dari pemerintah	I	II	III	IV	V			
17.	Pemanfaatan bantuan air dari pemerintah	I	II	III	IV	V			
18.	Pemanfaatan bantuan pangan (raskin dll) dari pemerintah	I	II	III	IV	V			
19.	Pemanfaatan bantuan obat-obatan manusia dari pemerintah	I	II	III	IV	V			
20.	Pemanfaatan jaringan lembaga sosial kemasyarakatan	I	II	III	IV	V			
21.	Pemanfaatan bantuan donasi dari LSM/NGO								
22.	Pemanfaatan bantuan donasi lain CSR	I	II	III	IV	V			
23.	Aksi partisipatif kolektif masyarakat desa	I	II	III	IV	V			
24.	Aksi partisipatif lembaga adat	I	II	III	IV	V			
25.	I	II	III	IV	V			

6. KARAKTERISTIK RESILIENSI (luas dan dalamnya permasalahan)

Komponen	No	Pertanyaan	Kondisi faktual
Stability	1.	Menurut pengetahuan Bapak/Ibu, seberapa besar permasalahan di kawasan PLBN mengancam rumahtangga bapak/ibu? (kedalaman ancaman)	1. Sangat mengancam
			2. mengancam
			3. biasa saja
			4. tidak mengancam
			5. sangat tidak mengancam
Toughness	2.	Seberapa besar daya rusak masalah yang dihadapi berdampak pada kehidupan rumahtangga Bapak/Ibu? (luasan masalah)	1. sangat besar
			2. besar
			3. sedang
			4. kecil
			5. tidak ada kerusakan
Flexibility	3.	Apakah masaah yang dihadapi memaksa Bapak/Ibu untuk mengubah pola rumahtangga Bapak/Ibu? (kecenderungan berubah)	1. Sangat besar
			2. besar
			3. Sedang
			4. kecil
			5. tidak ada perubahan
Security	4.	Seberapa besar masalah yang dihadapi menyebabkan kehilangan pendapatan rumahtangga Bapak/Ibu? (besarnya kehilangan nafkah rumahtangga)	1. Sangat besar
			2. besar
			3. sedang
			4. kecil
			5. tidak ada
Rapidity	5.	Seberapa cepat rumahtangga Bapak/Ibu dapat pulih dari masalah yang dihadapi? (Kecepatan pulih)	1. Sangat lambat
			2. Lambat
			3. sedang
			4. Cepat
			5. Sangat Cepat

7. MEKANISME ADAPTASI RUMAHTANGGA PETANI TERHADAP MASALAH

A	Modal Sumberberdaya Alam (<i>Natural Capital</i>)	Kondisi Faktual	Kondisi Harapan/ideal
1.	Jika rumahtangga Bapak/Ibu menghadapi masalah, seberapa besar ketersediaan sungai dapat menjadi sumber nafkah alternatif/pengganti?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
2.	Jika rumahtangga Bapak/Ibu menghadapi masalah, seberapa besar ketersediaan savana/lahan rumput dapat menjadi sumber nafkah alternatif/pengganti?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
3.	Jika rumahtangga Bapak/Ibu menghadapi masalah, seberapa besar ketersediaan laut dapat menjadi sumber nafkah alternatif/pengganti?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
4.	Jika rumahtangga Bapak/Ibu menghadapi masalah, seberapa besar	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting

	ketersediaan hutan dapat menjadi sumber nafkah alternatif/pengganti?	2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
5.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan sungai sebagai sumber nafkah alternatif/pengganti?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
6.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan savana sebagai sumber nafkah alternatif/pengganti?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
7.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan laut sebagai sumber nafkah alternatif/pengganti?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
8.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan hutan sebagai sumber nafkah alternatif/pengganti?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
9.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
10.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan savana untuk memenuhi kebutuhan?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
11.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan laut untuk memenuhi kebutuhan?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
12.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting

B.	Modal Fisik (<i>Physical Capital</i>)		
1.	Seberapa besar ketersediaan listrik dapat menjadi sarana penunjang kehidupan Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
2.	Seberapa besar ketersediaan air dapat menjadi sarana penunjang kehidupan Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
3.	Seberapa besar ketersediaan jalan dapat menjadi sarana penunjang kehidupan rumahtangga Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
4.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan listrik sebagai sarana penunjang kehidupan?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
5.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan air sebagai sarana penunjang kehidupan?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
6.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan jalan sebagai sarana penunjang kehidupan?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
7.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan listrik untuk menunjang kehidupan?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
8.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan air untuk menunjang kehidupan?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
9.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan jalan untuk	1. tidak pernah	1. Tidak penting

	menunjang penghidupan?	2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
C.	Modal Sumberdaya Manusia (<i>Human capital</i>)		
1.	Seberapa ketersediaan pelatihan keterampilan dapat menjadi sarana penunjang penghidupan Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
2.	Seberapa ketersediaan penyuluhan-penyuluhan dapat menjadi sarana penunjang penghidupan Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
3.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan Pelatihan keterampilan sebagai sarana penunjang penghidupan?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
4.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan Penyuluhan sebagai sarana penunjang penghidupan?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
5.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan yang dapat menunjang penghidupan?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
6.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan penyuluhan untuk menunjang penghidupan?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
D.	Modal Finansial (<i>Finacial Capital</i>)		
1.	Seberapa ketersediaan bank dapat menjadi sarana penunjang sumber nafkah Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
2.	Seberapa ketersediaan koperasi dapat menjadi sarana penunjang sumber nafkah Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting

		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
3.	Seberapa ketersediaan lembaga keuangan mikro (CU) dapat menjadi sarana penunjang sumber nafkah Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
4.	Seberapa ketersediaan gereja/mesjid/lembaga agama dapat menjadi sarana penunjang sumber nafkah Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
5.	Seberapa besar kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan Bank sebagai sarana penunjang sumber nafkah Bapak/Ibu?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
6.	Seberapa besar kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan koperasi sebagai sarana penunjang sumber nafkah Bapak/Ibu?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
7.	Seberapa besar kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan lembaga keuangan mikro (CU) sebagai sarana penunjang sumber nafkah Bapak/Ibu?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
8.	Seberapa besar kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan gereja/mesjid/lembaga agama lainnya sebagai sarana penunjang sumber nafkah Bapak/Ibu?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
9.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan Bank untuk sarana penunjang sumber nafkah Bapak/Ibu?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
10.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan Koperasi untuk sarana penunjang sumber nafkah Bapak/Ibu?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
11.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan Lembaga keuangan mikro (CU) untuk sarana penunjang sumber nafkah Bapak/Ibu?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting

		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
12.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan gereja/mesjid/lembaga agama lainnya untuk sarana penunjang sumber nafkah Bapak/Ibu?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
E.	Modal Sosial (<i>Social Capital</i>)		
1.	Seberapa ketersediaan kelompok tani dapat menjadi sarana penunjang pertanian Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
2.	Seberapa ketersediaan kelompok keanggotaan gereja dapat menjadi sarana penunjang penghidupan Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
3.	Seberapa ketersediaan kelompok pemberdayaan petani pengguna air (P3A) dapat menjadi sarana penunjang pertanian Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
4.	Seberapa ketersediaan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dapat menjadi sarana penunjang penghidupan Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
5.	Seberapa besar kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan kelompok tani sebagai sarana penunjang pertanian Bapak/Ibu?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
6.	Seberapa besar kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan kelompok keanggotaan gereja sebagai sarana penunjang penghidupan Bapak/Ibu?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
7.	Seberapa besar kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan kelompok pemberdayaan petani pengguna air (P3A) sebagai sarana penunjang pertanian Bapak/Ibu?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
8.	Seberapa besar kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk	1. Sangat sulit	1. Tidak penting

	mengakses/memanfaatkan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagai sarana penunjang penghidupan Bapak/Ibu?	2. Sulit 3. cukup mudah 4. mudah 5. Sangat mudah	2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat penting
9.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan Kelompok tani untuk sarana penunjang pertanian Bapak/Ibu?	1.tidak pernah 2. jarang 3. kadang-kadang 4. Sering 5. Sangat sering	1. Tidak penting 2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat penting
10.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan Kelompok keanggotaan gereja untuk sarana penunjang penghidupan Bapak/Ibu?	1.tidak pernah 2. jarang 3. kadang-kadang 4. Sering 5. Sangat sering	1. Tidak penting 2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat penting
11.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan kelompok pemberdayaan petani pengguna air (P3A) untuk sarana penunjang pertanian Bapak/Ibu?	1.tidak pernah 2. jarang 3. kadang-kadang 4. Sering 5. Sangat sering	1. Tidak penting 2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat penting
12.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) untuk sarana penunjang penghidupan Bapak/Ibu?	1.tidak pernah 2. jarang 3. kadang-kadang 4. Sering 5. Sangat sering	1. Tidak penting 2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat penting

7.2. Modal nafkah bersifat privat

A	Modal Sumberberdaya Alam (<i>Natural Capital</i>)	Kondisi Faktual	Kondisi Harapan/ideal
1.	Jika Bapak/Ibu menghadapi masalah ekonomi di kawasan perbatasan, seberapa besar ketersediaan lahan kebun dapat menjadi sumber nafkah alternatif/pengganti?	1. Tidak tersedia 2. Kurang tersedia 3. cukup tersedia 4.Tersedia 5.Sangat tersedia	1. Tidak penting 2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat penting
2.	Jika Bapak/Ibu menghadapi masalah ekonomi di kawasan perbatasan, seberapa besar ketersediaan kolam dapat menjadi sumber nafkah alternatif/pengganti?	1. Tidak tersedia 2. Kurang tersedia 3. cukup tersedia 4.Tersedia 5.Sangat tersedia	1. Tidak penting 2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat penting
3.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan lahan kebun sebagai sumber nafkah alternatif/pengganti dalam menghadapi masalah ekonomi ?	1. Sangat sulit 2. Sulit 3. cukup mudah 4. mudah	1. Tidak penting 2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting

		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
4.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan kolam sebagai sumber nafkah alternatif/pengganti dalam menghadapi masalah ekonomi?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
5.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan lahan kebun untuk memenuhi kebutuhan dalam menghadapi masalah ekonomi?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
6.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan kolam untuk memenuhi kebutuhan dalam menghadapi masalah ekonomi?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
B. Modal Fisik (<i>Physical Capital</i>)			
1.	Jika dalam menghadapi masalah ekonomi, seberapa besar ketersediaan ternak dapat menjadi sumber nafkah alternatif/pengganti?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
2.	Jika dalam menghadapi masalah ekonomi, seberapa besar ketersediaan emas dapat menunjang keberlangsungan penghidupan Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
3.	Jika dalam menghadapi masalah ekonomi, seberapa besar ketersediaan kenderaan pribadi dapat menunjang keberlangsungan penghidupan Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting
4.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan ternak yang dimiliki sebagai sumber nafkah alternatif/pengganti?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
5.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan emas yang dimiliki untuk melanjutkan kehidupan?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
6.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk	1. Sangat sulit	1. Tidak penting

	mengakses/memanfaatkan tabungan yang dimiliki untuk melanjutkan kehidupan?	2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
7.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan ternak untuk menunjang kehidupan?	1.tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
8.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan emas untuk menunjang kehidupan?	1.tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
9.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan kendaraan pribadi untuk menunjang kehidupan?	1.tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
C.	Modal Sumberdaya Manusia (<i>Human capital</i>)		
1.	Seberapa ketersediaan keterampilan sebagai sumber nafkah alternatif/pengganti?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4.Tersedia	4. Penting
		5.Sangat tersedia	5. Sangat penting
2.	Seberapa ketersediaan keterampilan sebagai sumber nafkah alternatif/pengganti?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4.Tersedia	4. Penting
		5.Sangat tersedia	5. Sangat penting
3.	Seberapa ketersediaan keterampilan sebagai sumber nafkah alternatif/pengganti?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4.Tersedia	4. Penting
		5.Sangat tersedia	5. Sangat penting
4.	Seberapa ketersediaan keterampilan membuat sebagai sumber nafkah alternatif/pengganti?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4.Tersedia	4. Penting
		5.Sangat tersedia	5. Sangat penting
5.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan keterampilan sebagai sarana penunjang kehidupan?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting

		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
6.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan keterampilan sebagai sarana penunjang penghidupan?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
7.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan keterampilan sebagai sarana penunjang penghidupan?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
8.	Seberapa tingkat kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan keterampilan membuat sebagai sarana penunjang penghidupan?	1. Sangat sulit	1. Tidak penting
		2. Sulit	2. Kurang penting
		3. cukup mudah	3. Cukup Penting
		4. mudah	4. Penting
		5. Sangat mudah	5. Sangat penting
9.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan keterampilan sebagai sarana penunjang penghidupan?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
10.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan keterampilan sebagai sarana penunjang penghidupan?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
11.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan keterampilan sebagai sarana penunjang penghidupan?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
12.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan keterampilan sebagai sarana penunjang penghidupan?	1. tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
D. Modal Finansial (<i>Finacial Capital</i>)			
1.	Seberapa ketersediaan kepemilikan tabungan rumahtangga Bapak/Ibu dapat menjadi sarana penunjang sumber nafkah Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia	1. Tidak penting
		2. Kurang tersedia	2. Kurang penting
		3. cukup tersedia	3. Cukup Penting
		4. Tersedia	4. Penting
		5. Sangat tersedia	5. Sangat penting

2.	Seberapa besar kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan tabungan sebagai sarana penunjang sumber nafkah Bapak/Ibu?	1. Sangat sulit 2. Sulit 3. cukup mudah 4. mudah 5. Sangat mudah	1. Tidak penting 2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat penting
3.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan Tabungan untuk sarana penunjang sumber nafkah Bapak/Ibu?	1.tidak pernah 2. jarang 3. kadang-kadang 4. Sering 5. Sangat sering	1. Tidak penting 2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat penting
E. Modal Sosial (<i>Social Capital</i>)			
1.	Seberapa ketersediaan Asuransi Kesehatan (ASKES) dapat menjadi sarana penunjang kehidupan Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia 2. Kurang tersedia 3. cukup tersedia 4.Tersedia 5.Sangat tersedia	1. Tidak penting 2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat penting
2.	Seberapa ketersediaan BPJS dapat menjadi sarana penunjang kehidupan Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia 2. Kurang tersedia 3. cukup tersedia 4.Tersedia 5.Sangat tersedia	1. Tidak penting 2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat penting
3.	Seberapa ketersediaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dapat menjadi sarana penunjang kehidupan Bapak/Ibu?	1. Tidak tersedia 2. Kurang tersedia 3. cukup tersedia 4.Tersedia 5.Sangat tersedia	1. Tidak penting 2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat penting
4.	Seberapa besar kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan ASKES sebagai sarana penunjang kehidupan Bapak/Ibu?	1. Sangat sulit 2. Sulit 3. cukup mudah 4. mudah 5. Sangat mudah	1. Tidak penting 2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat penting
5.	Seberapa besar kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan BPJS sebagai sarana penunjang kehidupan Bapak/Ibu?	1. Sangat sulit 2. Sulit 3. cukup mudah 4. mudah 5. Sangat mudah	1. Tidak penting 2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat penting
6.	Seberapa besar kemudahan rumahtangga Bapak/Ibu untuk mengakses/memanfaatkan KIS sebagai sarana penunjang kehidupan Bapak/Ibu?	1. Sangat sulit 2. Sulit 3. cukup mudah 4. mudah 5. Sangat mudah	1. Tidak penting 2. Kurang penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat penting
7.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan ASKES sebagai sarana penunjang kehidupan Bapak/Ibu?	1.tidak pernah 2. jarang	1. Tidak penting 2. Kurang penting

		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
8.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan BPJS sebagai sarana penunjang kehidupan Bapak/Ibu?	1.tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting
9.	Seberapa sering rumahtangga Bapak/Ibu memanfaatkan KIS sebagai sarana penunjang kehidupan Bapak/Ibu?	1.tidak pernah	1. Tidak penting
		2. jarang	2. Kurang penting
		3. kadang-kadang	3. Cukup Penting
		4. Sering	4. Penting
		5. Sangat sering	5. Sangat penting